BALAIRUNG

EDISI NO. 28/TH.XIII/1998

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

CARUT MARUT GERAKAN KERAKYATAN

MENGGAPAI IMPIAN PERUBAHAN



ISSN : 0215 - 076X

Rp. 5.000,00

MENANG DENGAN STRATEGI BARU



PERTUMBUHAN PEMBACA REPUBLIKA



Memenangkan pertempuran tak hanya bergantung pada kekuatan pasukan dan kecanggihan teknologi. Ada yang lebih esensial, yakni perencanaan dan strategi. Ini berlaku pula dalam perang pemasaran. Manakala produk "me-too" berhamburan, waspadalah dengan pangsa pasar Anda. Sedikit lengah, lawan berkuasa. Ciptakan strategi baru dalam pemasaran atau ubahlah strategi komunikasi dan strategi media. Republika berarti sinergi baru untuk meluncurkan strategi Anda. Sebuah media yang efektif dan efesien guna menggempur pasar di mana pun, atau di wilayah khusus seperti Botabek, Bandung, dll.

Bila Anda ingin memenangkan pertempuran,
hubungi : 7944493 - 94 , 7944692 - 93

H A R I A N U M U M
REPUBLIKA
KORAN MASYARAKAT BARU

ISI

Pembaca, sepanjang umur kami, seluruh pengelola *Balairung* barangkali belum pernah menemui kondisi Indonesia seperti sepanjang tahun 1997-1998 ini.Berbagai macam krisis yang terakumulasi begitu rupa. Lagi-lagi mahasiswa menemukan peran besarnya melalui aksi-aksi mahasiswa yang menggelora laksana air bah. Dari aksi moral mahasiswa menuntut reformasi itulah kami mendapat pengalaman yang sangat berharga. Benar barangkali apa yang ditulis *Time* (March 30, 1998) bahwa pers mahasiswa selama aksi ini adalah *Behind the Scenes* (pendukung yang tak terduga). Oleh karena itu, begitu aksi-aksi mahasiswa mulai marak di kampus-kampus, kami meluncurkan *Balairung* edisi koran dinding. Dirasa kurang dinamis, maka lewat kerjasama dengan pengurus SKM *Bulaksumur*, media ini berganti nama menjadi *Bunderan*. Dan terakhir media ini pun diganti lagi namanya menjadi *Gugat*, yang terbit di bawah naungan BPPM UGM langsung dan dibantu beberapa 'orang tua'. Satu hal yang menarik adalah kami bisa banyak belajar tentang kinerja media dengan tenggang terbit lebih cepat. Dengan *Gugat* ini kami terus terang bisa lebih bisa mengkonkretkan dukungan kepada aksi-aksi mahasiswa dan rakyat selama ini. Mungkin ini menjadi *trend* bagi semakin menggejalanya media alternatif atau yang populer disebut sebagai *newsletter*. Sebab selain *Gugat* ini di UI juga terbit media *Bergerak!*, kemudian juga *Suara Airlangga alternatif* di Unair, *Cangkruk Retorika* di Fisip Unair, *Mini Ekspresi* di IKIP Karangmalang. Sebuah keterlibatan secara sadar bahwa kami perlu menyebarkan informasi yang tidak dimuat oleh pers umum (sebelum Soeharto jatuh).

21 Mei 1998 jam 09:02:45 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Sebuah kebahagiaan yang melahirkan harapan baru. Namun jangan sampai membuat kita lupa diri, bahwa perjuangan bagi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi masih belum tercapai. Meminjam ucapan Wimar Witoelar, kita hanya berganti sopir, bus kita masih sama. Ini jelas masih jauh dari tuntutan kawan-kawan mahasiswa ketika mempelopori demonstrasi beberapa waktu lalu. Sekedar mengingatkan Habibie itu muridnya Soeharto, seperti diakuinya sendiri "Soeharto adalah profesor saya". Berarti bukan tak mungkin Habibie nanti akan setali tiga uang dengan Soeharto.

Tema *Balairung* edisi 27 lalu seakan tersambut oleh realitas turunnya Soeharto, momen yang sangat diharapkan seluruh rakyat Indonesia minus seribu orang yang duduk dikursi DPR sana. Edisi tersebut telah membuat tak tersisa di kantor redaksi. Dalam edisi 28 ini kami belum beranjak dari tema besar perubahan pada Indonesia baru, yaitu evaluasi terhadap gerakan "*People Power*" (masih dalam tanda kutip) di Indonesia. Yang hasilnya ada di depan pembaca ini.



REPRO:THE JAKARTA POST

Bunderan, Gugat ***di UGM, dan*** **Bergerak,** ***Milik Mahasiswa UI***
untuk masa depan Indonesia.

Saat kebebasan pers menemukan tempat, menyusul terjungkalnya Soeharto, pers mahasiswa menemukan tantangan baru. Yaitu ruang apalagi yang ditawarkan pers mahasiswa manakala ruang kebebasan itu bisa dimasuki dan diaduk-aduk pers umum. Ketika hal itu terjadi maka tinggal ada dua pilihan bagi pers mahasiswa termasuk *Balairung*. Menuruti apa yang pernah dikatakan Nugroho Notosusanto (alm.), menjadi sebuah *Community Paper*, yaitu menarik diri ke kampus lagi atau berani bersaing dengan pers umum yang memiliki infrastruktur kuat. Kedua hal itu masih menjadi pikiran kami untuk penampilan *Balairung* di masa-masa yang akan datang.

Satu lagi pembaca, perubahan posisi pengurus *Balairung* juga telah merubah suasana kerja. Terutama adalah tim artistik yang menjelang naik cetak sempat membuat komputer *lay-out* tidak pernah off selama lebih 300 jam, kini tiga dari lima personalnya adalah perempuan. Tentu suasana yang belum pernah dialami *Balairung* selama ini.

Pembaca, itu saja...❐

Penjaga dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

❐**Diterbitkan oleh** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ❐ **Ijin Terbit:** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No. UGM/82/7789/UM/01/37, *International Standard Series Number* (ISSN): 0215-076X ❐**Pelindung:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.(Rektor UGM)❐ **Penasehat:** Ir. Bambang Kartika (Pembantu Rektor III UGM), Drs. Amir Effendi Siregar, M.A., Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., Ir. Abdul Hammid Dipopramono ❐**Pemimpin Umum:** Irfan Muktiono ❐ **Sekretaris Umum:** Nurhidayati ❐**Pemimpin Redaksi:** Hery Trianto ❐**Sekretaris Redaksi:** Bekti Dwi Andari ❐**Ka. Litbang:** Ajianto Dwi Nugroho ❐**Staf Litbang:** Mashudi, M G Amanullah, Farah Adibah ❐**Pemimpin Perusahaan:** F. Ika Yuniarti ❐**Sekretaris Perusahaan:** Agung Widyatmoko ❐**Kabag. Keuangan:** Sholihah❐**Kabag. Iklan:** Yusuf Waluyo Jati ❐**Kabag. Distribusi:** Rima Rahmania ❐**Kabag. Promosi:** Yuki Susanti ❐**Staf Perusahaan:** Houtmand Parulian, Uki Hemuning, Anastasia Maya, Arina Jaya Putireni ❐ **Redaktur Bahasa:** Asep Mulyana ❐ **Redaktur Pelaksana:** Melanie Wahyu Wulandari, Irma HIdayana❐**Penjaga Rubrik:** Imam Risdiyanto, Aprilina Prastari, Radyah Maharastri, M Ugoran Prasad, Lukman Hakim A, Dedy Sushandoyo, Eka Rinanda, Monica Eviandaru, Ibrahim Z. Fahmi, ❐**Staf redaksi:**Dirmawan Hatta, M.A Fitrianto, Sholahuddin Ghozali, M. Bustom, M. Mushthafa, Aris Mustafa, Rio BTM Hutagaol, Hertasning Ichlas, Barlian Kahuripan, Iwan Hermanto, Agung Christianto, Rofika Nora A., Didik Mas'adi, Lisa R. Rahmad, Rhiska P Irawan, Syahrial, Shohiffulloh, Yohanes Putra Mbama ❐ **Redaktur Artistik:** Andy Seno Aji ❐**Staf Artistik:** Agung Arief Budiman, Riza Afifi, Afiaty Dian Irfanti, Titik Puji Lestari, Lalu Rizki Rahman ❐**Redaktur Foto:** Fernando Bestral❐**Fotografer:** Destianto, Bambang Pamungkas ❐**Staf Magang:**. Fanny Arif R., Sohiffullah, Iman Subhan, Suwardah, ❐ **Alamat Redaksi:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 901703 Faks. (0274) 566171❐ **E-mail:** *balairung.ugm@eudoramail.com* ❐**Rekening:** TAPLUS BNI 1946, No.Rek. 228.007 816 062.901(atas nama Sholihah) ❐**Percetakan:** Cahaya Timur Offset, Jl. Taman Siswa No 63 Yogyakarta 55151, Telp. (0274) 376730. **Isi diluar tanggungjawab percetakan**

Balairung **on-line, URL: http://members.tripod.com/~balairung**

Redaksi menerima tulisan dan foto tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Atau dalam bentuk file disket dengan program pengolah kata microsoft word atau wordstar. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko balasan secukupnya. Tulisan maksimum 200 kb, juga dapat dikirim melalui e-mail (dalam format extension RTF=*Rich Text Format*), semua file (teks dan gambar) dijadikan satu folder.

BALAIRUNG
Nafas Intelektualitas Mahasiswa

Berita tema

Gerakan Kerakyatan

** Catatan untuk Perjuangan Demokratik*

Jatuhnya Soeharto adalah kemenangan mahasiswa.
Begitulah kata-kata yang tergiang di setiap ruang.
Mahasiswa dan seluruh masyarakat bersorak, berteriak."Inilah people power Indonesia"
Namun, benarkah demikian? Kalau benar, mengapa reformasi yang sedang berjalan hanya setengah hati.
Sebuah otokritik untuk gerakan mahasiswa dan catatan untuk perjuangan demokratik menuju Indonesia Baru.



11

Humaniora

Kembali Mereka yang Dipinggirkan

Orang-Orang di Dasar Penderitaan

Memperbincangkan kondisi masyarakat Indonesia kontemporer, tak lepas dari orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Konsep pembangunan ekonomi yang sentralis, berpaku pada stabilitas dengan jargon pertumbuhan, berhasil menciptakan masyarakat yang sarat dengan tekanan. Kaum miskin kota adalah bukti konkret kegagalan Orde Baru menciptakan masyarakat berkeadilan sosial. Inilah potret kehidupan komunitas marginal di Indonesia yang menjadi tumbal kapitalisme semu negara dan tumbal pembangunan Indonesia



DOK. INSTITUT SOSIAL JAKARTA

47

Lingkungan

Tarik Ulur Partai Lingkungan

Selama ini keadaan lingkungan sangat terabaikan. Menyusul eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang melimpah. Sangat tidak adil, kalau sekarang kita menggadaikan alam yang sebenarnya untuk anak cucu kita kelak. Lebih parah lagi persoalan lingkungan, menjadi bagian yang dimarginalkan oleh negara. Keberadaan partai khususnya partai lingkungan diharapkan dapat mengangkat isu lingkungan menjadi isu yang penting bagi kehidupan kita bersama. dapatkah kemudian partai lingkungan terwujud di Indonesia? Kita tunggu gerakan dari para aktivis lingkungan.

51

COVER: A.SENO AJI



FATCHUR/BUL

Di Yogya, Pancasila bukan untuk umum, nah lo

Mohon dikirim *Balairung* (I)

Mohon penjelasan harga per eksemplar dan cara berlangganan

Bila mungkin mohon sekalian dikirim 1 eksemplar saja edisi terbaru, *duit nyusul*.

Info ini saya dapat di *Republika* 8 Februari 1998.

Viva! Teruskan perjuangan!

Lasidi
Jl Welirang 5 Kediri Jawa Timur Telp 72776 Kodepos 64112

Mohon dikirim *Balairung* (II)

Saya ingin berlangganan majalah *Balairung*. Tolong kami dikirim majalah tersebut dan cara berlangganan

terima kasih

Tonsah Minanda, S.H.
Notaris/PPAT
Jl Jenderal Sudirman No. 210 Dumai
Telp. (0765) 34332

Yogya lebih maju

Saat melakukan koordinasi dalam rangka gerakan reformasi beberapa saat yang lalu saya sempat membawa Majalah *Balairung* dari kota tempat kelahiran saya, Yogyakarta. Kata teman-teman saya di Bandung, Yogya memang lebih maju dari Bandung dalam hal pers mahasiswa (penerbitan mahasiswa). Semoga *Balairung* dapat meneruskan perjuangan!

Beni
Mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Bandung angkatan '93
e-mail: beni@ti.itb.ac.id

Ternyata saya tidak sendiri!

Salam demokrasi!

Saya adalah seorang pekerja di kawasan industri Batam. Kenal majalah *Balairung* sejak kelas dua SMP melalui kakak saya yang kebetulan menjadi salah satu reporternya.

Mengomentari *Balairung* edisi lalu, membuat saya semakin sadar, bahwa saya tidak sendiri! Ternyata saya berada di tengah-tengah barisan yang menghendaki reformasi. Dan saya kira kita semua sudah cukup lelah dengan rezim orde baru membuat satu langkah mundur.

Maka dari itu bersama *Balairung* langkah kita pantang surut, maju terus demi tegaknya demokrasi. Hidup reformasi

Nen Sasiaprilleana
Dormitori Blok K2/14.
Batam Industrial Park
Batam

Terima kasih atas dukungannya. Kami berharap Anda akan terus menjadi pelopor bagi munculnya pekerja-pekerja profesional lain yang terus sadar dan kritis akan perubahan, sehingga cita-cita akan masyarakat sipil demokratis yang terberdayakan di negeri ini akan segera terwujud. Salam dari Yogya-red.

Salut pada UGM atas semuanya

Beberapa bekas mahasiswa saya menulis surat dan memberi salut atas keputusan saya bekerja di daerah asal. Tidak ada unsur patriotiknya di dalamnya. Cuma ingin dekat dengan anak yang pindah dari Bekasi ke Flores untuk SMU-nya.

Salah satu aspek menarik dari kerja di pelosok adalah menyaksikan kawan-kawan UGM mengambil peranan sentral dalam reformasi yang sedang berjalan ini. Saya dengan bangga menyaksikan bagaimana rektor UGM *(Prof.Dr. Ichlasul Amal, M.A.-red)* mendukung mahasiswanya dan bagaimana Pak Amien Rais menjadi tokoh dalam menggulingkan Soeharto. Kebetulan pada tahun 1976 saya ketemu Pak Amien di Chicago AS dan ada foto berdua. Saya *copot* dari album dan saya bawa kemana-mana.

Saya juga ingin mengucapkan selamat untuk *Balairung* atas di raihnya juara pertama *ISAI Award 1998*, mudah-mudahan penghargaan itu mendorong para pengurus *Balairung* untuk semakin menyempurnakan terbitannya. Saya akan sangat berterima kasih kalau saya dapat meperoleh *Balairung* secara teratur. Kalau perlu nomor-nomor yang lalupun ingin saya peroleh. Tentu saja sebagai pelanggan yang membayar.

Mudah-mudahan satu waktu saya bisa bertemu dengan rekan-rekan redaksi dan kritis bisa *ngobrol* di mana saja, termasuk di lesehan. Sayangnya Malioboro itu sudah super komersial. Berkali-kali saya kembali ke Yogya pada waktu lalu dan tentu saja harus lewat kampus biru. Ada rasa sendu karena telah meninggalkan almamater. Tetapi saya tidak meyesali keputusan untuk pergi, karena saya tahu, almamater diserahkan kepada kawan-kawan yang penuh dedikasi dan beridealisme tinggi. Salam dari Labuhan Bajo.

Dr. Peter Hagul
The Nature Conservancy
Pimpinan proyek Yayasan Pusaka Alam Nusantara
Kantor Labuan Bajo, Manggarai Flores NTT
Alumni UGM

Terima kasih atas dukunganya. Kami tawarkan Dr. Peter menjadi Pelanggan abadi Balairung. *Silakan*

mengirimkan uang minimal Rp 100.000,00. Ketentuan lain telah kami kirim-red.

Diharapkan jadi pionir

Salam setengah merdeka,

Semakin bertambah usia, semakin dewasa menginjak usia ketigabelas (masa nakal-nakalnya) anak, terbersit keinginan untuk mewujudkan pers mahasiswa sebagai pers yang bebas, merdeka, kritis, dan bertanggungjawab. Hal itu bermuara pada adanya kesatuan gerak langkah di dalam penyatuan visi, misi dan orientasi pers mahasiswa. Selain juga pengapresiasian idealisme jurnalistik mahasiswa sebagai suatu dogma yang harus dikejawantahkan. Pentingnya komunikasi multidimensional (antar lembaga pers, nantinya justru berimplikasi pada munculnya suatu advokasi secara utuh. Sebagai senior (relatif terhadap kami) *Balairung* diharapkan menjadi pionir yang berhasil, di dalam menggagas setiap ide yang membawa kearah perbaikan kehidupan demokrasi Indonesia. Sikap profesionalisme yang selama ini ditunjukkan aktivis *Balairung* (dalam segala hal) nantinya justeru akan menambahkan padat muatan misioner *Balairung*, menjadi sebuah wacana yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan (*untouchable*). Bravo *Balairung*!

Barlian
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Majalah Mahasiswa Solid. *Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Kampus Ketawang Gede Malang Jawa Timur*

Beda Makna

Terima kasih atas dimuatnya foto saya pada *Balairung* edisi 27. Namun saya merasa agak kecewa, sebab judul foto yang seharus "Yes, ketahuan..! diubah menjadi "Yaa, ketahuan..!. Sebagai seorang pegelut dunia pemotretan (barangkali juga berlaku bagi yang menekuni dunia seni lain) Masalah judul tentu saja berkaitan dengan tema dan makna foto. Makna kata "Yess" (yang menunjukkan suatu kesombongan) berbeda sekali dengan dengan kata "Yaa" (yang menunjukkan rasa kecewa).

Demikian koreksi saya.

Yunita
Unit Fotografi Gelanggang Mahasiswa UGM

Koreksi ini sekaligus sebagai ralat-red

Surat dari Koeln

Mon, 6 Jul 1998 16:18:24 +0200,

Salam dari Koeln, Jerman.

Saya pernah berkunjung ke redaksi *Balairung* di Bulaksumur Yogyakarta. Waktu itu saya berdiskusi tentang persoalan PLTN. Saya adalah pembantu *Deutsche Welle* (Radio Jerman seksi Bahasa Indonesia), di *desk* Warta Berita.

Sayang terakhir kali ke Indonesia, bulan Maret tahun ini (1998), saya tidak sempat lagi *nyowan* ke *Balairung*. Tapi saya masih tetap bisa dapat edisi-edisi no. 26 dan 27 di toko buku. Selamat untuk kawan-kawan yang makin lama makin mantap saja.

Saya dengar terakhir *Balairung* juga dapat penghargaan dari ISAI. Dari dulu saya sudah yakin bahwa tim *Balairung* punya potensi yang bisa jadi modal profesional.

Selamat bekerja di masa-masa pergolakan reformasi yang penting ini.

Dan salam kenal untuk tim Anda semua. Saya sendiri sudah pindah, ini alamat yang baru:

Suhendra Pasuhuk
Eifelstrasse 31 - 59677 KOELN Germany Tel./Fax: +49-221-326949 e-mail: indok@t.online.de

Mohon Bantuan

Alhamdullillah atas ridla Allah SWT dan atas bantuan para dermawan. Bangunan Mushola Sabilul Muhtadin saat ini telah selesai 56%. Sedangkan pekerjaan yang belum diselesaiakan adalah pemasangan tegel, langit-langit, pintu dan jendela Mushola yang kesemuanya dibutuhkan biaya kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah.

Untuk itu, karena jamaah pengajian rata-rata berusia lanjut dengan ekonomi yang pas-pasan, maka kami sangat senang sekali apabila para pembaca *Balairung* membantu kami dengan beramal jariyah baik berupa Infak, zakat, untuk pembangunan Mushola Sabilul Muhtadin agar bangunan tersebut dapat segera terpakai. Berapapun besarnya pembaca sangat besar nilainya bagi kami. Kami yakin tanpa bantuan para pembaca, bangunan tersebut akan terbengkalai. Kami sangat senang sekali apabila amal bantuan diwujudkan barang kemudian diantar atau kami yang mengambilnya.

Bantaun tersebut dapat dialamatkan pada alamat dibawah ini.

K. Zainuddin *(pimpinan)*
Jalan Kapolsek Kecamatan Pragaan , Pos Prenduan, Sumenep Madura.

❑ **Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM)** ❑ **Ketua Presidium,merangkap anggota:**Ahmad Nasir(Ketua Departemen Penerbitan Surat Kabar)❑**Anggota presidium:** Irfan Muktiono (Ketua Departemen Penerbitan Majalah), Retno Inderawati (Sekretaris Umum SKM *Bulaksumur*), Nur Hidayati (Sekretaris Umum Majalah *Balairung*)

SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS GADJAH MADA 1998

".....Tapi kalian memiliki daya khayal yang lebih kaya, jauh lebih warna-warni seperti tampak pada grafiti yang tertulis di dinding dan tembok Universitas Sorbone. Suatu hal yang mengagetkan, suatu hal yang mengetarkan, bahwa mahasiswa menyangkali apa saja yang dilaksanakan dan menjadi kenyataan masyarakat sekarang..."

(Wawancara Jean Paul Sartre dengan Daniel Cohn Bendit)





"REFOR, EH REPARASI SETENGAH HATI..."

LALU RIZKI RAHMAN

Saya Datang, Anda Datang, Mereka Menikmati



Tatkala tuntutan perubahan menemukan momentumnya. Lagi-lagi mahasiswa dijunjung bak pahlawan menang perang. Kejadian serupa juga terjadi saat demokrasi terpimpin menemui titik nadir. Kali ini, mahasiswapun (yang di televisi selalu disebut sebagai pelopor reformasi) berhasil menggilas kediktatoran Soeharto yang bercokol lebih dari tiga puluh tahun.

Bola telah ditendang. Namun sekali lagi sejarah terulang. Mahasiswa ternyata tak segarang ketika puluhan ribu massa mengelu-ngelukannya. Bahkan ada kecenderungan mahasiswa kehabisan nafas untuk terus meyerukan perubahan lewat aksi-aksi massanya yang kental. Tak ada lagi teriakan yang membakar emosi di jalan, tak ada lagi puluhan spanduk protes yang terbentang, semua seolah tenggelam bersamaan dengan dengan turunnya Soeharto, Kamis 21 Mei lalu.

Semua tahu, bahwa apa yang diimpikan dengan Indonesia baru masih tergantung dilangit. Sistem kita tetap, pun ketika Habibie naik dengan gaya bicara yang menggemaskan dan peci yang kebesaran itu. Keterbukaan yang ditawarkan Habibie lebih karena belum adanya legitimasi yang kukuh dari rakyat. Persis dengan yang dilakukan Soeharto saat baru berkuasa, melepaskan tahanan politik, atau memberi ruang kebebasan pers yang luas. Pada saat yang sama ABRI justru semakin cenderung menunjukkan dominasinya dalam konstalasi elit kekuasaan.

Saat momentum itu masih ada, kemana, sebenarnya mahasiswa berada? Lalu apa arti gerakan massa yang menggelora dahulu, jika Soeharto-Soeharto kecil masih bergentayangan. Belum lagi bila momentum perubahan ini dipakai oleh orang-orang plin plan mengambil keuntungan. Meminjam ungkapan Jawa *Pejah gesang nderek sing menang (mati hidup ikut yang menang)* begitu mungkin motto hidup orang-orang itu.

Sementara di tempat lain format gerakan rakyat kita telah bergeser ketingkat elit, dan berkutat disitu. Perdebatan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral ataukah gerakan politik menemukan tempat di sini. Mahasiswa sebagai pelopor akhirnya terjerumus pada gerakan elitis yang cukup puas dengan perubahan di tingkat elit. Itu mungkin yang diharapkan dari sebuah gerakan moral dan memang harus mundur ketika konsensus dicapai. Mereka seolah tak lagi merasa perlu menawarkan konsep baru. Berperan persis seorang intelektual tradisional yaitu figur-figur akademikus yang pernah disebut *Gramci*. Belum ada tanda intelektual kita memilih paradigma sebagai intelektual organik, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari berbagai kelas, apa buruh, petani ataupun nelayan.

Sejauh ini belum ada tanda gerakan mahasiswa mendekati gerakan politik. Seperti telah terungkap agaknya semua telah cukup puas sampai di sini. Ada memang sebagian elemen gerakan mahasiswa yang masih getol berusaha membangun sebuah gerakan politik. Membangkitkan tentang perlunya kesadaran politik ditingkat massa. Untuk membangun sebuah daya tawar yang alot, agar kenyataan buruk tak terulang: selalu memberikan cek kosong pada elit penguasa baru.

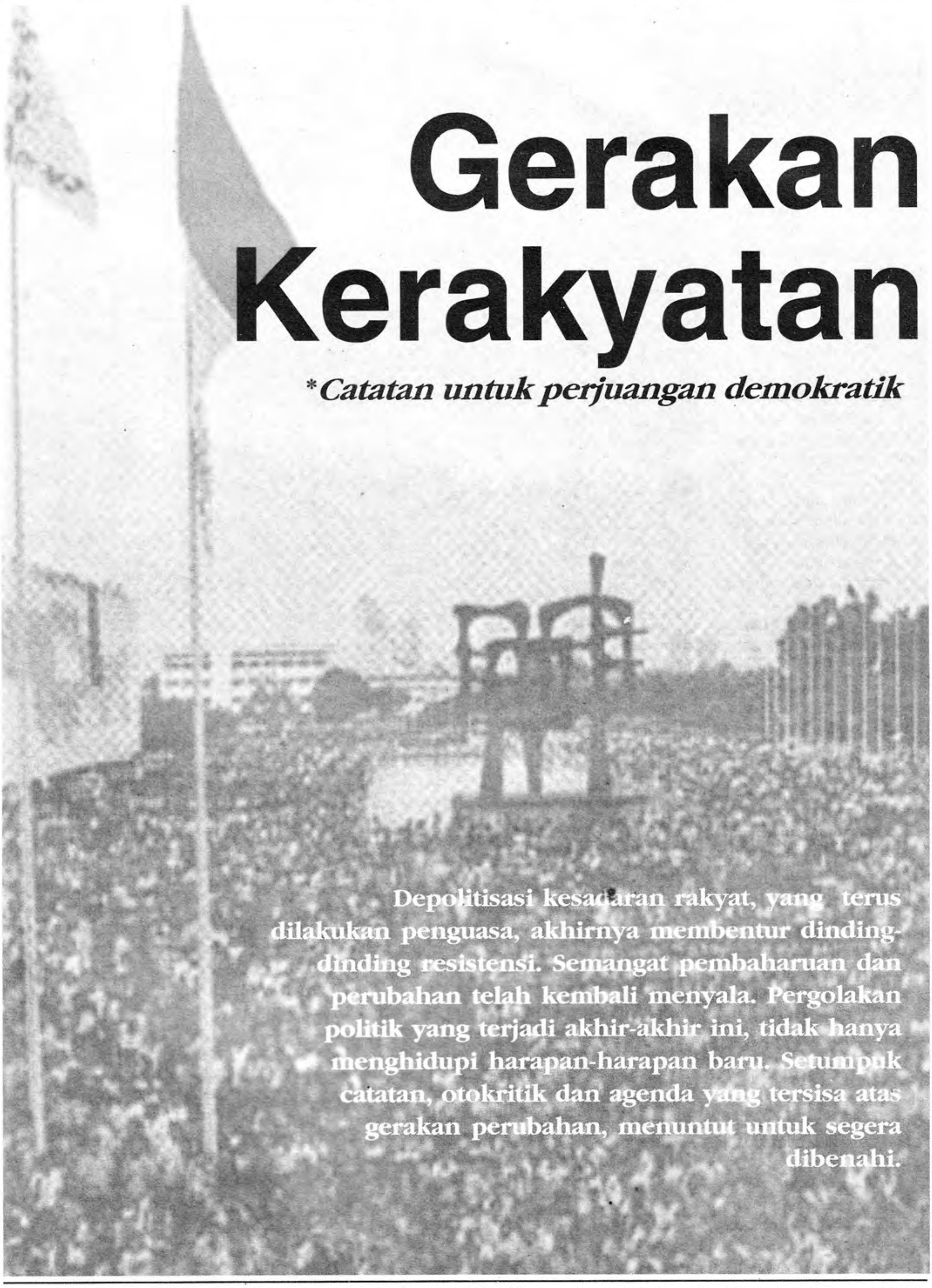
Sampai disini ungkapan saya datang, anda datang, mereka menikmati menemukan tempatnya. Tepat untuk kondisi Indonesia ini. Mahasiswa datang, elemen rakyat lain menyusul, lalu orang-orang yang muncul belakangan menikmati hasil kerja keras yang telah dibayar dengan darah dan nyawa.

Itu artinya kesadaran politik kita yang masih tipis perlu dibongkar, oleh elemen-elemen rakyat yang telah melek politik lebih dulu. Kaum intelektual; bisa juga mahasiswa. Sayang, intelektual kita masih takut untuk melakukan bunuh diri kelas, lebur dalam *grass root* masyarakat. Tan Malaka waktu itu pernah melakukan ini, ia pernah ikut melarat bersama petani bahkan pernah tinggal ditanjung Morawa dan hidup bersama buruh. Tapi hal ini rupanya tidak untuk mahasiswa, seperti alasan independensi ketika mereka bahkan menolak elemen rakyat yang mau bergabung di gedung DPR.❑

Hery Trianto
Pemimpin Redaksi



PENGKHIANATAN INTELEKTUAL. ANDY



Gerakan Kerakyatan

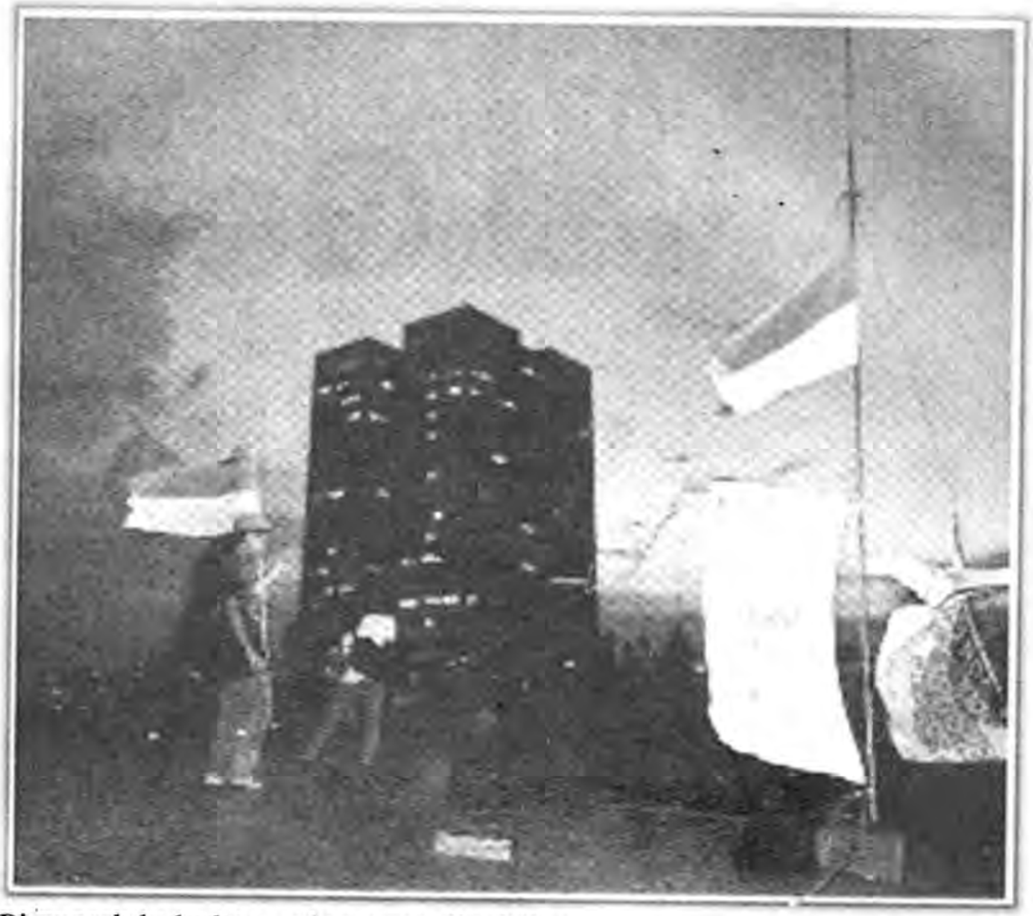
**Catatan untuk perjuangan demokratik*

Depolitisasi kesadaran rakyat, yang terus dilakukan penguasa, akhirnya membentur dinding-dinding resistensi. Semangat pembaharuan dan perubahan telah kembali menyala. Pergolakan politik yang terjadi akhir-akhir ini, tidak hanya menghidupi harapan-harapan baru. Setumpuk catatan, otokritik dan agenda yang tersisa atas gerakan perubahan, menuntut untuk segera dibenahi.



Jatuhnya Soeharto mesti diartikan awal dari perjalanan panjang perjuangan menuju perubahan. Seorang presiden dengan kekuasaan tak terbatasnya, sesungguhnya adalah perwujudan dari ketidakmampuan sebuah sistem bekerja. Dalam sebuah negara modern, kekuasaan yang absolut atas rakyat mesti diurai sampai ke tingkatan paling mendasar bangunan kekuasaan itu sendiri.

Perhitungan-perhitungan politik atas kondisi obyektif, sesungguhnya banyak memunculkan spekulasi yang tak kurang membingungkan. Dalam dataran ini, pergerakan massa, mahasiswa maupun elemen lain, mempunyai ruang yang paling besar dan menjadi kekuatan politik yang mewujud.



Di puncak kedaulatan rakyat yang digadaikan
Mahasiswa di kubah gedung DPR/MPR

Paruh pertama gerakan massa, sebelum jatuhnya Soeharto, dibangun oleh berbagai landasan pemikiran yang amat plural. Tidak mudah untuk merumuskan bentuk gerakan itu secara keseluruhan. Variabel landasan pemikiran adalah suatu alat ukur yang mutlak.

Ketika perubahan di tingkat elit terjadi, pergerakan mahasiswa menjadi anti-klimaks. Semangat perubahan yang sempat mewarnai tatanan sosial telah berubah wujud menjadi *euphoria* politik yang tak jelas arahnya.

Kondisi ini membuka ruang pertanyaan yang cukup luas atas sejauh mana harapan-harapan atas perubahan hendak diwujudkan.

Diskursus ini harus dipertajam ketika persoalan mendasar rejim Orde Baru telah dengan cerdiknya berganti kulit atas nama reformasi.

Logika gerakan

Gerakan massa yang dipelopori mahasiswa selama ini, berangkat dari kondisi ekonomi yang memburuk akhir tahun 1997 sampai sekarang. Krisis ekonomi telah dimaknai sebagai muara dari persoalan-persoalan politik. Dan gerakan mahasiswa kemudian menemukan agenda bersamanya.

"Agenda mendasar dari momentum itu adalah anti konsep Orde Baru,' ujar Cornelis Lay, staf pengajar Fisipol UGM. Ia mengungkapkan, musuh bersama yang ada ketika itu mampu menciptakan sebuah gerakan besar bersama. Menurutnya, fase awal gerakan ini telah mengantar sebuah percepatan politik yang luar biasa. Akibatnya pada fase kedua, pasca Suharto turun menjadi tak terduga. "Saat ini, fase gerakan tidak lagi anti-konsep tapi sudah harus menjadi bentuk gerakan konsep," paparnya.

Gerakan mahasiswa ini kemudian menguat, ketika legitimasi Orde Baru digugat oleh ketidakmampuan membenahi kondisi ekonomi. Akumulasi dari lalu-lintas sistem politik yang korup, menghidupkan semangat perlawanan yang sangat besar.

Api perlawanan gerakan, selain mampu menciptakan ruang perlawanan yang besar, juga menyisakan rongga bagi catatan radikalisasi massa. Perlawanan yang dilandasi momentum, yang dibangun oleh mundurnya kondisi ekonomi, menyisakan ketidakmampuannya dalam memperhitungkan konsep perubahan.

Dari awal gerakan ini dibangun telah tercipta paradoks-paradoks dan tidak terselesaikan. Beberapa istilah yang dikenal, seperti "Gerakan Moral", "Revolusi Damai", dan lain sebagainya, menghadapi benturan serius. Terutama ketika dalam tuntutannya, diisi oleh tuntutan politis, dan kontra terhadap sistem.

Bentuk gerakan yang anti sistem dalam ruang politik yang fundamental, tidak lagi sekedar bisa diterjemahkan oleh sebuah gerakan moral. Bahkan bisa jadi munculnya istilah ini, lebih karena ketidakmampuan elemen gerakan membangun konsep perubahan. Sementara, tekanan reformasi, yang bersifat elitis dan masih dalam konteks memperbaiki sistem dari dalam, sesungguhnya menyisakan tanda tanya besar. Dalam

ide-ide yang dibangun untuk perubahan, tidak satupun harapan perubahan bisa dihadirkan rezim yang berkuasa.

Tidak terselesaikannya paradoks-paradoks ini meninggalkan luka besar pada harapan untuk perubahan. Kegagapan elemen-elemen pro-perubahan tampak mencolok pasca jatuhnya Suharto. "Bukan saja gerakan mahasiswa *cooling down,* tapi sudah jatuh beneran," sindir Beathor Suryadi aktivis Pijar Jakarta. "Sampai sekarang belum ada yang berubah. Sistem masih sama, semua masih sama kok (gerakan-red) mundur?" tambahnya.



DOK. BALAIRUNG

Frans Magnis Suseno, SJ

Carut-marut bangunan fundamental gerakan ini bermuara pada sebuah *people power* yang cacat. Franz Magnis-Suseno –merujuk dari Filipina– beranggapan bahwa memang pada setiap gerakan people power, selalu ada unsur spontanitas yang kental. Ia menjadi manifestasi dari kegagalan sistem mengakomodasi kepentingan rakyat. Kepentingan yang dibangun dari persoalan-persoalan empiris, seperti tuntutan perut. "Sifat spontanitas itu memang melekat pada *people power,* wujud dari ketidakpuasan rakyat terhadap sistem," papar Magnis.

Sifat spontan ini, menurut Edward Aspinall, pengamat gerakan, memerlukan sebuah ruang organisasi yang rapi. "Supaya sifat spontan itu bisa terjaga dalam waktu yang lebih lama, dan tetap konsisten pada perubahan." lanjut dosen UNSW(The University of New South Wales) ini

People power sendiri, sebenarnya adalah sebuah term yang terbuka luas. Secara definitif, ia menjelaskan sebuah kekuatan massa yang besar dan berjuang untuk satu tujuan. berawal dari Filipina. Istilah ini sendiri membentur kenyataan pahit disana. Dalam buku *Revolusi Damai,* karya Greg Soetopo, seorang mahasiswi, Rizon Alfuente menuliskan kenyataan pahit Filipina pasca *Revolusi Edsa.* Setahun jatuhnya Marcos, seorang aktivis mahasiswa dan seorang aktivis buruh dibunuh. Juga tak bisa dihindari tumbuhnya "Marcos-Marcos" kecil yang tak kalah korup.

Bisa dikatakan, term *people power* mempunyai ruang interpertasi yang cukup luas. Harris Rusli, Ketua KPRP (Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan) Yogyakarta, mencoba merincinya dalam dengan beberapa syarat yang mesti dipenuhi.

Pertama, memiliki organisasi pelopor dalam skala nasional yang memiliki kekuatan pada basis massa, misal; buruh dan tani. *Kedua,* pengorganisasian kekuatan itu pada perlawanan yang sadar, bukan hanya gerakan mobilisasi. *Ketiga,* memiliki target politik yang jelas, meliputi perubahan secara radikal terhadap sistem yang berkuasa secara keseluruhan.

Ketiga hal yang dipersyaratkan diatas, merujuk pada sebuah gerakan massa yang memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat aktif pada proses perubahan. Dalam syarat-syarat ini ditemukan sebuah ruang bagi proses aliansi berbagai kekuatan rakyat. Ruang ini dianggap sebagai satu-satunya kemungkinan perubahan yang tidak bermuara pada perubahan elitis semata.

Perlawanan yang dilandasi momentum yang dibangun oleh mundurnya kondisi ekonomi, menyisakan ketidakmampuannya dalam memperhitungkan konsep perubahan.

People Power Indonesia

Setelah jatuhnya Soeharto, gerakan mahasiswa menyurut dalam *euphoria* kemenangan. Jumlah massa yang besar pada gerakan-gerakan massa menuntut Soeharto turun, tidak tersisa pada gerakan massa saat ini. Bahkan kalau mau lebih detail nyaris tak ada lagi kelompok mahasiswa yang konsisten meyerukan perubahan lewat aksi massanya.

Gerakan moral, menjadi alasan beberapa elemen mahasiswa untuk tetap setia pada jalur anti-konsep. Tanpa mencoba memunculkan konsep perubahan. Dendi Susianto, Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Badko Jateng, menyebutkan bahwa gerakan yang mereka bangun merupakan manifestasi mereka atas komitmen terhadap perjuangan nilai. "Dari dulu komitmen kami pada *values.* Misal kita kan mendukung demokratisasi," paparnya.

Sebaliknya, Mugiyanto, aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) menempatkan setiap gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik. "Masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah struktural, hanya bisa diatasi oleh gerakan politik," bantahnya. Menurut mahasiswa sastra UGM ini, kecuali masalah-masalah kultural, gerakan normatif tidak akan membawa banyak perubahan.

"Ada mitos gerakan '66 dimana gerakan mahasiswa dalam format gerakan moral," tukas Haris Rusli. Ia berpendapat, gerakan yang dibangun pada tahun 1966 lebih sebagai alat kontrol terhadap sistem. Hasil dari, lepas tangannya gerakan '66 dengan keterlibatan untuk proses perubahan, adalah hulu dari semua persoalan sistem Orde Baru.

"Kelemahan dari gerakan moral adalah meninggalkan blangko kosong pada blangko politik yang masih ahistoris," tandas Cornelis Lay. Tuntutan politik yang sudah diajukan, menjadi tereduksi pada perubahan elit. Ini menjelaskan tentang secara mentalitas agenda perubahan tidak dapat dipersatukan,

Ia menandaskan, sifat gerakan m[illegible] ini mesti [illegible] ditinggalkan. Harus muncul [illegible] politik untuk [illegible] perubahan secara [illegible]

gelombang aksi di DPR Pusat pada 19-20 Mei, memaksa setiap orang menunjukkan kartu identitas mahasiswa. Kartu tersebut digunakan, sebagai syarat untuk bergabung dengan massa di dalam gedung. Massa rakyat, kaum miskin kota, buruh dan pendukung Megawati yang berjumlah ribuan, memenuhi seputaran gedung tanpa terakomodasi kepentingan-kepentingannya. Mahasiswa sebagai pelopor akhirnya terjerumus pada gerakan elitis yang cukup puas dengan perubahan di tingkat elit.

"Gerakan kami masih bertahan pada gerakan mahasiswa karena independensi mahasiswa yang ingin kami pertahankan." ujar Arnove Dicky dari Forum Kota Jakarta.



Kerumunan masyarakat Yogyakarta di alun-alun utara, 20 Mei 1998
People Power ataukah sebentuk kesadaran kosong ?

Gerakan mahasiswa sendiri memunculkan pemetaan yang tegas pada bentuk-bentuk gerakan yang ada. Mugiyanto, memetakannya dalam dua bentuk gerakan, yaitu gerakan mahasiswa di Yogya, Solo, dan Lampung, yang berbeda dengan gerakan mahasiswa di Jakarta. Perbedaan paling mendasar adalah kesadaran mahasiswa di tiga kota tersebut, untuk bergabung dengan massa rakyat. Sesuatu yang justru dihindari mahasiswa Jakarta."Ini berarti kekuatan mahasiswa telah menyatu pada kekuatan rakyat. Proses tawar-menawar mahasiswa dengan kepentingan rakyat cukup tinggi dan menakutkan bagi rezim," ujarnya.

Pemetaan ini mungkin mengalami proses generalisasi. Artinya, tidaklah bisa diartikan bahwa, setiap elemen yang ada di Yogya, Solo atau Lampung didasarkan pada kesadaran dimana elemen mahasiswa mesti bergabung dengan elemen kerakyatan.

Namun pemetaan ini ditegaskan oleh kenyataan takutnya mahasiswa Jakarta untuk beraliansi dengan massa rakyat. Contoh, ketika terjadi

Kelemahan dari gerakan moral adalah meninggalkan blangko kosong pada blangko politik yang masih ahistoris

Haris Rusli membantahnya, karena anggapan ini justru membuka ruang bagi diambilalihnya gerakan perubahan ini, oleh pihak-pihak yang membawa muatan berlawanan dengan agenda perubahan.

Pasca jatuhnya Soeharto, gerakan massa dibungkam dengan semacam ilusi tentang demokrasi. Ada distorsi besar antara tuntutan reformasi yang sejak awal diperjuangkan dan diarahkan sampai pada isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semata. Gerakan-gerakan yang masih tersisa, sibuk mencari musuh baru dalam simbol perlawanan. Mereka kewalahan mengerucutkan persoalan pada permasalahan sistem yang lebih besar. "Seolah kalau carik diganti, reformasi sudah berhasil." tukas Mugiyanto.

Faktor kepeloporan juga sedang berada di titik genting. Sampai sejauh ini bisa dikatakan kegagalan kepeloporan menjadi penyebab mengendurnya radikalisasi massa. Lebih jauh, Mugiyanto, mempertanyakan kemampuan tokoh-tokoh dengan basis massa kuat dalam memperjuangkan perubahan. Tokoh-tokoh yang ada, seperti Gus Dur, Amien Rais, atau Megawati sampai sekarang masih gagal dalam merespon kondisi obyektif. Bahkan sikap akomodatif mereka terhadap perubahan elit menyurutkan militansi massa mereka.

Kegagalan gerakan mahasiswa terasa mengental dalam upaya mempertahankan konsistensi untuk memperjuangkan demokratisasi.

People Power di Indonesia, akhirnya tak bisa menghindar dari kegagapan mahasiwa memaknai gerak perubahan yang sarat dengan konsekuensi logis. Kesadaran politik mahasiswa di gugat. Kesadaran politik mestinya menjadi wacana utama, dalam gerakan massa.

"Sampai sejauh ini, 98% dari gerakan mahasiswa berkutat dalam gerakan-gerakan didalam kampus. Ini borjuis kecil," papar Haris Rusli. Berangkat dari kondisi ini ia bahkan menjelaskan bahwa belum ada *people power* di Indonesia. Ia mencatat, belum dipenuhinya beberapa syarat essensial, seperti bersatunya gerakan

dalam gerakan kerakyatan, membuat harapan atas people power yang ideal tak akan terwujud.

Omong kosong *people power* ini, lucunya menjadi alasan anti-klimaks gerakan mahasiswa dalam menuntut perubahan.

Pendidikan Politik yang Luput Diprioritaskan

Menyusutnya gerakan mahasiswa saat ini, membuka kemungkianan baru bagi gerakan pro-demokrasi secara keseluruhan. Celah yang paling terbuka disini adalah belum terukurnya kesadaran politik mahasiswa dan massa rakyat secara keseluruhan.

Cornelis Lay menggambarkan kondisi di daerah-daerah pinggiran Indonesia. Reformasi disana, telah dirterjemahkan secara sangat bebas, dan menjadi alat legalisasi bagi perjuangan-perjuangan individualistik. Bahkan untuk beberapa tempat, arus informasi atas agenda-agenda perubahan tidak pernah sampai. "Ada beberapa tempat dimana orang-orangnya, masih menyayangkan jatuhnya Soeharto," tukasnya.

Transformasi ide-ide perubahan memang tersendat-sendat sampai ke tangan massa rakyat. Ia juga harus berkejar-kejaran dengan kemarahan massa, yang lebih disebabkan oleh persoalan-persoalan kebutuhan normatif.

Alasan-alasan atas kondisi ekonomi bisa jadi adalah satu-satunya pemicu pergerakan masyarakat, yang kemudian mencari legitimasi politik untuk menjelaskan kemarahannya. Tidak ada yang salah dengan kenyataan ini, apalagi ketika kontradiksi yang tajam antara rakyat dan penguasa. "Isu-isu politik menjadi lebih mudah, tapi tetap butuh penyikapan," kata Haris Rusli menambahkan.



DOK. BALAIRUNG

Mugianto

Arnove Dicky menjelaskan konsep Forum Kota yang menaungi komunitas mahasiswa se Jabotabek. Ia menguraikan agenda mengumpulkan pemimpin massa lewat Komite Rakyat Indonesia. Kepemimpinan tokoh-tokoh berbasis massa ini yang kemudian menjadi ruang bagi penyadaran politik di tingkat massa. Ia percaya bahwa hanya dengan kepemimpinan massa bisa diantarkan pada sebuah kesadaran politik demokratik. "Mahasiswa tidak mungkin jadi pemimpin. Jadi kita mencoba menyatukan pemimpin-pemimpin rakyat yang ada," paparnya.

People Power di Indonesia, akhirnya tak bisa menghindar dari kegagapan mahasiswa memaknai gerak perubahan yang sarat dengan konsekuensi logis. Kesadaran politik mahasiswa di gugat. Kesadaran politik mestinya menjadi wacana utama, dalam gerakan massa.

Ketidakberanian mahasiswa mengambil sikap sebagai pemimpin massa, tidaklah mengherankan, mengingat tingginya semangat primordial mahasiswa. Sepanjang gerakan mahasiswa berlangsung, semangat nama kampus, atau simbol-simbol mahasiswa lainnya, mendominasi warna-warna pergerakan massa. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, terkurung dalam wacana perubahan sosial itu sendiri. Artinya, harapan untuk melakukan perubahan sosial tumbuh diantara ego-status yang menafikkan ide-ide yang membumi.



DOK. BALAIRUNG

Dr.Corneliy Lay

Haris Rusli beberapa kali menyinggung kondisi ini sebagai sebuah cacat gerakan mahasiswa. "Mahasiswa yang lebih sering bergerak di dalam kampus, membuat proses transformasi ide atas perubahan ini menjadi tersendat-sendat," ungkapnya.

Disini, mahasiswa sendiri tidak bisa dikatakan telah memaknai agenda-agenda perubahan secara inheren. Kemungkinan, bahwa sesungguhnya mahasiswa belum berada dalam proses transformasi ide perubahan. Spontanitas, momentum atau apapun namanya, yang dianggap sebagai senjata utama proses perubahan, kini telah memukul balik.

Beberapa catatan terakhir

Gerakan mahasiswa sampai saat ini, menyisakan agenda besar yang tetap mesti diperjuangkan. Ketika agenda perubahan menuntut penyelesaian, sesungguhnya porsi mahasiswa tetap memainkan peranan yang besar.

Hal yang paling esensial telah dicatatkan di atas, yaitu agenda keluar dari kampus, untuk bergabung dengan massa rakyat, sebagai langkah awal menuju proses transformasi ide-ide perubahan. Tidak cukup perubahan dibangun dengan sekedar mobilisasi massa yang marah. Harus digiatkan kerja-kerja pendidikan politik dalam upaya melakukan pengorganisasian. "Tanpa itu, ya, sifat gerakan menjadi anarkis," tukas Haris Rusli lagi.

Gerakan mahasiswa tetap dibutuhkan, tapi bukan pada mahasiswa sebagai entitas kelas "borjuis kecil". Entitas mahasiswa, sampai saat ini adalah entitas yang telah diuntungkan oleh sekian banyak keberpihakan sistem kepadanya. Karenanya mahasiswa wajib membayar hutang-hutangnya pada rakyat.❐

M.Ugoran Prasad

Aris Mustafa, Dedi Sushandoyo, Monica Eviandaru.

Paradoks Reformasi

*Jalan masuk menuju Revolusi

Ilusi demokrasi, agenda-agenda politik elit, dan harapan atas perbaikan ekonomi, menyemangati diskursus bernegara kita. Sampai di titik ini, suatu konsep perubahan seharusnya telah disiasati. Berbagai sudut pandang, yang tidak terlepas dari berbagai kepentingan politik, untuk menyikapi persoalan-persoalan pokok dalam kondisi obyektif bangsa, justru telah membuat bias atas sebuah perumusan sasaran bersama sebagai* entry point *menuju Indonesia Baru.



Perubahan konstelasi politik, sampai saat ini, masih menyisakan kegagapan tersendiri. Penyiasatan untuk perubahan telah membawa perdebatan panjang di kalangan elit. Tidak terlihat sebuah tawaran perubahan yang menyentuh pada esensi kehidupan bernegara. Semua catatan yang sempat bermunculan dan menjadi diskursus publik, seperti pada era-Suharto, akan segera timbul-tenggelam, dan termakan isu baru.

Masih tercatat pada benak kita, berbagai isu politik yang datang silih berganti, seperti isu nasionalisasi harta Suharto, pemecatan anggota MPR, restruksturisasi Golkar, krisis pangan dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut telah tersusun menjadi sebuah agenda perubahan yang sulit terbaca ujung-pangkalnya.

Media massa, seperti juga gerakan mahasiswa, telah mendapat angin segar keterbukaan. Namun, mereka masih terkungkung hegemoni Orde Baru dan lalai pada fungsi kontrol sosial. Gerakan mahasiswa terjebak dalam sifat reaksioner pada setiap perubahan politik. Pada fase dimana harapan-harapan telah dikedepankan, kondisi ini menjadi paradoks dari keterbukaan.

Semangat demokrasi dan pluralitas wacana, pada tempat tertentu memang telah mengambil posisi dalam konteks ini. Pada realitas sosial, berbagai bentuk wacana politik negara yang memberi arti penting bagi proses transformasi ide telah disajikan. Pada sisi ini, pluralitas wacana, diharapkan membangun diskursus politik yang lebih bebas dan mampu menciptakan ruang-ruang aspirasi bagi rakyat. Sisi akomodatif elit politik saat ini pada tempat tertentupun telah bisa dimanfaatkan.



Massa yang berkumpul di gedung DPR/MPR
Akankah isi kepala mereka sama ?

Namun perlu diingat, cara pandang politik yang masih dipengaruhi kebudayaan Orde Baru, membuat perubahan sulit diwujudkan. Apalagi, karena sifat elitisnya, rakyat lagi-lagi tidak diikutsertakan dalam proses perubahan saat ini.

Membicarakan pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, justru membawa kita pada sifat ilutif dari setiap perubahan. Semua bentuk keterbukaan yang ada sekarang tak lebih dari upaya pencarian legitimasi dan penciptaan ruang konsolidasi di tingkat elit. Sementara pada elemen-elemen pro perubahan belum pernah bisa dirumuskan sebuah penyikapan bersama atas persoalan mendasar bagi kondisi bangsa. Tanpa ada penyikapan bersama, bisa dibayangkan apa yang terjadi pada dataran massa. Kerusuhan yang terjadi sekarang menjadi bukti

konkret kepanikan massa menghadapi perubahan.

Di tingkat lain, era perubahan ini, justru menyisakan persoalan-persoalan yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Namun setidaknya, kita bisa merumuskan skala prioritas, untuk lebih memperjelas posisi persoalan tertentu dalam tatanan sosial kita



Prof. Miriam Budiarjo

Agenda ekonomi versus agenda politik

Dari sudut manapun, kebutuhan ekonomi terutama penyediaan bahan pokok tak bisa dipungkiri menjadi kepentingan rakyat. Kebutuhan ini bahkan bisa memicu timbulnya amuk massa. Prof. Miriam Budiarjo, menegaskan arti penting dari kebutuhan ekonomi ini. "Jelas, agenda utama kita adalah perbaikan ekonomi, terutama kebutuhan pokok masyarakat." paparnya. Namun perlu diingat, kebijakan ekonomi untuk bahan pokok terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di tingkat makro. Sampai sejauh ini, kebijakan fiskal dan moneter yang memungkinkan untuk perbaikan ekonomi, sudah dilakukan. Tony Prasetyantono M.Sc., ketika ditemui menganggap agenda-agenda ekonomi yang dijalankan dan penyelesaian agenda politik harus dijalankan dengan simultan. "Setiap perbaikan ekonomi tanpa adanya penyelesaian politik hanya akan sia-sia." katanya lebih lanjut. Ia menambahkan, bahwa persoalan ini, termasuk pada tingkat penyelesaian persoalan kerusuhan. "Kalau kerusuhan terus terjadi, investor tidak akan masuk, dan ini berkaitan dengan persoalan politik", tegas staf pengajar Ekonomi UGM ini.

Hilmar Faried dari Jaringan Kerja Budaya, beranggapan bahwa pembicaraan ekonomi adalah manifestasi dari persoalan-persoalan politik. "Justru pemisahan yang dilakukan adalah menyesatkan," katanya. Tak dapat dipungkiri bahwa persoalan ekonomi saat ini adalah persoalan politik orde baru yang telah mengakar dalam setiap segi tatanan sosial bangsa. "Orang yang bicara politik dulu atau sebaliknya ekonomi lebih dulu sesungguhnya menyesatkan. Kita jelas tidak bisa sekedar bicara tentang persoalan-persoalan mekanisme seperti Sidang Istimewa, begitu juga buat orang yang cuma mau bicara sembako."papar Hilmar.

Sementara itu, pemerintahan Habibie masih berkutat pada persoalan legitimasi. Sri Bintang Pamungkas, Ketua PUDI, mengartikan hal ini justru menunjukkan sifat pemerintahan Habibie yang masih berlumuran dosa Orde Baru. "Karena tidak ada yang mau percaya, artinya temperatur ekonomi akan tetap tinggi." ungkapnya. Ia tetap menganggap bahwa persoalan perut tetap menjadi persoalan penting. "Namun dalam masa transisi seperti ini, agenda politik tetap harus jalan," lanjut Bintang.

"Tanah kita luas. Kalau kita tidak mau miskin, sekarang kita turun ke sawah, kita cangkuli, kita turun ke sungai kita tangkap ikan, kita dapat setiap hari. Rakyat itu bisa begitu, tapi pemerintahnya saja mentalnya peminta-minta."

Fahri Hamzah, Ketua KAMMI (Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Pusat, bahkan menganggap bahwa persoalan-persoalan ekonomi menyangkut dengan persoalan kultural yang mesti dibenahi. Ini kemudian berkaitan dengan cara penyelesaian ekonomi kita yang amat bergantung dengan dunia internasional tanpa berani menunjukkan keberanian. "Kita itu harus tidak siap miskin. Mentalnya harus diubah menjadi mental penguasa. Tanah kita luas. Kalau kita tidak mau miskin, sekarang kita turun ke sawah, kita cangkuli, kita turun ke sungai kita tangkap ikan, kita dapat setiap hari. Rakyat itu bisa begitu, tapi pemerintahnya saja mentalnya peminta-minta, "jelas Fahri.

Independensi negara khususnya bidang ekonomi, tampaknya menjadi pilihan yang selama ini jauh dari cara pandang Orde Baru terhadap penyikapan persoalan ekonomi. Mungkin ide ini sangat berbau Soekarno, yang berkata, "*Go To Hell with Your Aid!*" pada dunia internasional. Sampai sejauh ini dunia melihat perkembangan negara benua ketiga, selalu berkaitan dengan bagaimana negara-negara besar mengatur perputaran modal pada negara berkembang. Seperti "bak sampah", untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Catatan ini, jelas terlihat dengan adanya perputaran uang di Freeport, Newmount, atau dunia industri secara keseluruhan. Negara-negara maju, tidak menyisakan banyak hal bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan pada awalnya, sasaran investasi asing ke Indonesia tak lebih karena tenaga kerja murah dan lahan yang bisa dieksploitasi seenaknya. Bukan dalam artian menyejahterakan rakyat Indonesia, atau tujuan mulia yang lain.

Bisa ditelusuri pula, bahwa krisis ekonomi sekarang, bukan lagi krisis kawasan regional. "Ia telah menjadi catatan bagi krisis dunia. Dan ini tidak bisa lagi tambal sulam semata," ujar Stevanus Hendry, aktivis Kepal (Komite Persiapan Legalisasi) PRD. Ia menandaskan bahwa kebijakan ekonomi dengan meminta dukungan dana internasional memang telah membawa pola tersendiri. "Dari 90-an

negara yang menerima donor IMF 40 sampai 50 negara tidak berada dalam kondisi yang lebih dari masa sebelum mendapat bantuan. Sisanya bahkan jauh lebih miskin." lanjutnya. Lebih jauh ia mengingatkan, jika beban hutang 40 milyar dollar, jadi diberikan IMF, maka bukanlah bantuan gratis atau yang bisa dengan mudah diputihkan. Konsekuensi paling besar, bukan pada pembayaran hutang. Melainkan dengan hutang tersebut, IMF akan dapat memaksakan programnya. "Jangan menunggu mereka menekan rakyat dalam rangka menyelamatkan kepentingan kapitalis borjuis di bank-bank besar Indonesia," paparnya.

Dengan demikian bantuan IMF harus dimaknai secara lebih hati-hati. Sebenarnya arah yang lebih ideal bagi persoalan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Artinya, merubah tidak hanya program ekonomi tetapi juga berarti merubah sikap politik bangsa secara keseluruhan.

Persoalan mekanisme kontrol

Asumsi diatas menunjukkan, suatu penyikapan politik fundamental yang paling kita butuhkan saat ini. Sri Bintang mengemukakan, bahwa ada beberapa fase yang bisa dibangun untuk membagi masa perubahan pasca Orde Baru, yaitu; rentang waktu transisi dan jangka menengah-panjang. Dalam rentang waktu transisi ditandai dengan penyelesaian UU pemilu. Rentang waktu menengah-panjang tidak hanya dengan diselesaikannya pemilu, tapi juga kemungkinan Pemilu dengan UU-nya. Sehingga pemilu mampu memberi ruang baru bagi perubahan.

Faktor yang **paling penting** dalam sebuah organisasi pro-perubahan adalah pada tingkat kemampuannya mengorganisasi massa, dan untuk kepentingan massa. Pada tingkatan ini, bisa dikatakan semua partai yang berkembang **kehilangan basis massanya.**

Sedangkan Prof. Miriam Budiarjo optimis bahwa peluang ruang otoritarian Orde Baru dan Orde Lama akan tertutup. "Ini berkaitan dengan akan tumbuhnya kontrol dari *civil society*," kata beliau. Walau kontrol ini bisa pula diartikan sebagai sebuah paradoks baru. Contohnya, perubahan di Korea pada tahun 1987, yang justru memperlawankan kelas menengah *civil society* dengan kelas buruh disana. Kelas menengah Korea akhirnya terjerumus untuk mempertahankan *status quo*. "Untuk Indonesia, yang terjadi sekarang kan lebih karena menyangkut kepentingan kelas menengah juga." bantah Haris Rusli dari KPRP (Komite Perjuangan rakyat untuk Perubahan) Yogya.



FATCHUR/BUL

Haris Rusli Moti

Pada tingkat legalitas Undang-Undang, muncul harapan untuk mendekonstruksi total ruang yang pernah dimanfaatkan Orde Baru untuk merentangkan jaring kekuasaannya. Artinya, segala bentuk alat legal yang rekayasa *status quo* harus dihancurkan.

Pada perkembangan lebih lanjut muncul pandangan-pandangan yang memoderasi tuntutan pada negara. Cornelis Lay, staf pengajar Fisipol UGM, berpendapat, bahwa ada persoalan yang rumit ketika, misalnya, tuntutannya adalah untuk mengganti atau merubah UUD 1945. "Persoalan itu sangat peka, sementara kita punya mekanisme yang lain, seperti ketetapan MPR misalnya," tambahnya.

"Perlu adanya institusi-institusi struktur legal yang memantapkan reformasi," ujar **Prof. Franz Magnis-Suseno**. Guru besar STF Driyarkara ini berpendapat, institusi struktur legal, termasuk juga melakukan pembatasan jabatan presiden, pencabutan paket 5 UU politik, dan mengembalikan kebebasan demokratis ke tangan rakyat.

Agenda-agenda politik ini, mempunyai kecenderungan untuk membangun kembali sebuah fondasi kekuatan rakyat lewat mekanisme kontrol kekuasaan. Sampai detik ini belum bisa dilihat sejauh mana sistem yang ada berniat untuk melakukannya. Adanya *good will* dari pemerintah belum terlihat. "Sikap moderat pemerintah, bukan karena sifat inheren pemerintah untuk melakukan perubahan dari dalam tetapi lebih karena tekanan," papar Hilmar Faried.

Kemungkinan maraknya partai-partai politik harus segera disikapi pula. Pada sisi ini, belum ada kejelasan ruang yang diberikan untuk setiap partai yang ada bermain dalam peta politik. "Sampai sekarang belum jelas, apakah sistem multi partai telah disepakati atau apakah asas tunggal akan dicabut, itu belum jelas," ungkap Mugiyanto. Ia menambahkan, walau demikian ruang demokratik yang ada sekarang telah dimanfaatkan dengan cukup baik. "Adanya partai-partai yang sudah keluar dari asas tunggal, seperti berlandaskan Islam atau Marhaen, cukup bagus. Ini cukup mengakomodir aspirasi dari masyarakat," tambahnya.

"Persoalan kemunculan partai, yaitu karena partai tidak selalu muncul berbasis massa. Bisa saja cuma pasang nama, atau lainnya," ungkap Hilmar Faried menambahkan. Ia berpendapat justru faktor yang paling penting dalam sebuah organisasi pro-perubahan adalah pada tingkat kemampuannya mengorganisasi massa, dan untuk kepentingan massa. Pada tingkatan ini, bisa dikatakan semua partai yang berkembang kehilangan basis massanya. Kalaupun punya basis massa, seperti Golkar, tak lebih pada pemanfaatan massa, untuk

kepentingan kekuasaan status quo. "Persoalannya, seperti apakah sebenarnya mekanisme politik Orde Baru, dan apakah sudah bisa dihancurkan secara keseluruhan?" tambahnya mengingatkan bahwa sebenarnya tak ada yang berubah.

Persoalan perubahan politik sendiri akan selalu berhadapan dengan sebuah dinding tebal, yaitu kepentingan ABRI. "Ini mungkin berkaitan dengan kepentingan representasi ABRI ditingkat DPR pusat dengan alasan mengamankan Pancasila dan sebagainya. Namun persoalan ditingkat DPRD kan, tidak lagi menjadi urusan mereka."kata Cornelis Lay.

Memandang ABRI, Franz Magnis masih melihat ada sisi optimis dengan beranggapan bahwa ABRI akan mengendurkan syaraf kepentingan kekuasaanya. Sebab ABRI mempunyai dosa-dosa sejarah yang turut membawa kondisi bangsa ini ketepi jurang kehancuran. Artinya, ia tidak melihat adanya kemungkinan ABRI akan berusaha mengambil alih kekuasaan.

Pendapat ini kontradiktif dengan anggapan bahwa ada kemungkinan militer mengambil alih kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dengan terus dipertahankannya fungsi sospol-nya, yang telah di interpertasikan secara bebas. Seperti yang dicatat oleh Stevanus Hendry."Kita jangan mengulang seperti yang terjadi di Chili." Pada kasus Chili setelah Pinochet mundur, presiden memang dipegang orang sipil namun militer tetap berkuasa, dibuktikan dengan orang-orangnya yang tetap didalam struktur. Setelah pemilu dimenangkan pemerintah sipil dan rakyat disana sudah mengira ada ruang demokratis, gerakan-gerakan disana justru dihabiskan. Sebagai catatan pula kemampuan ABRI mengkonsolidasikan kekuatan segenap organisasinya dibawah kekuatan tongkat komando, amat didukung oleh luasnya kontrol bagi militer selama ini.

ABRI akan mengendurkan syaraf kepentingan kekuasaannya. Sebab ABRI mempunyai dosa-dosa sejarah yang turut membawa kondisi bangsa ini ke tepi jurang kehancuran.

Pad akhirnya, kepentingan mekanisme kontrol kekuasaan tampak akan selalu berhadapan dengan rumitnya bangunan struktural tingkatan elit. Kepentingan-kepentingan elit yang bermain meniadakan celah dan kesempatan bagi rakyat untuk menempatkan hak-hak politiknya dalam kehidupan berbangsa.

Semangat Reformasi dan Bangunan Utopia

Sampai sejauh ini apa yang bisa kita lakukan adalah menjauhkan diri dari realitas kehidupan berbangsa yang seperti telah dicatatkan diatas. Harapan perubahan dengan melakukan kerja tambal sulam, tidak hanya memundurkan agenda perubahan. Tapi juga menjerumuskan masyarakat dalam mimpi alam demokrasi dengan sejuta topeng. Orde reformasi, kabinet reformasi, MPR reformasi atau apapun namanya.

Ketika harapan untuk melakukan pembenahan secara total dihidupkan, tetap saja muncul ketidakberanian bersikap dalam memilih sebuah jalur perubahan yang tegas. Bangsa ini, tak lebih sedang terombang-ambing dalam kegamangan bersikap.

Reformasi, memang pasti akan selalu membangun paradoks seperti ini. Ketika sebuah bangunan sistem tak lagi bisa dibenahi, maka reformasi hanya akan berdiri menggapai-gapai ditengah kekerasan kepentingan politik. Paling menyedihkan dari reformasi ini, adalah harapan akan munculnya *good will* pemerintah yang miskin legitimasi.

Pada posisi ini, kita hanya bisa cemas dan was-was akan kemungkinan munculnya kekuatan militer yang akan memberangus setiap benih kekuatan rakyat. Atau berurusan dengan kemunculan segala bentuk partai politik yang tidak jelas berdirinya. Apakah pada basis massa, dan untuk massa, atau justru sebaliknya, memanfaatkan kekuatan massa, demi kepentingan segelintir orang?

Sebagai sebuah bangsa, kita harus bersikap realistis akan bahaya kelaparan yang akan segera datang. Sama seperti keharusan menghadapi resiko pertumpahan darah, yang mewarnai catatan sejarah bangsa selama ini. Untuk sampai pada kesadaran itu, kita mesti keluar dari istilah reformasi. Jika kita menginginkan sebuah perubahan mendasar dalam seluruh pola kehidupan berbangsa. Tidak lagi bermanis-manis dengan utopia perubahan reformasi. Dalam arti ini kedaulatan rakyat tidak hanya diletakkan semata dalam dunia mimpi. Saatnya, sebuah tanda untuk sebuah revolusi kerakyatan; mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.❐

M.Ugoran Prasad
Aris Mustafa, Dedy Sushandoyo, Bustom

foto:Time



MENGENANG KEMATIAN REKAN-REKAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA*) YANG GUGUR SEBAGAI PAHLAWAN REFORMASI PADA TRAGEDI 12 MEI 1998

semoga gugurnya mereka mengakhiri sejarah kelam kekerasan bangsa ini

Selamat jalan bunga perjuangan!

*) dan mereka yang meninggal di tempat lain serta yang tak pernah diketahui lagi keberadaannya

Majalah *Balairung* UGM

Edward Aspinall:

PERJUANGAN DEMOKRATIK BUTUH MASSA TERORGANISIR



Saat ini yang diperlukan adalah adanya aliansi rakyat dengan gerakan mahasiswa. Nah, kondisi apa yang mensyaratkan terbentuknya aliansi rakyat tersebut?

Kesalahan paling fatal dari gerakan pro demokrasi adalah lemahnya organisasi. Peluang ini yang kemudian diperankan oleh gerakan mahasiswa. Maka jelas peranan mahasiswa disini besar. Karena organisasi di tingkat masyarakat seperti ormas-ormas yang ada sekarang lemah. Jika reformasi untuk menciptakan demokratisasi harus membangun organisasi di massa rakyat.

Jika yang harus dikerjakan adalah aliansi kerakyatan,bukankah perpecahan di gerakan mahasiswa akan membangkitkan semangat demokrasi. Dalam artian ada pluralitas wacana yang terbentuk di kalangan mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana melihat perpecahan tersebut sebagai suatu kemajuan atau kemunduran cara pikir tentang demokrasi?

Bukan dilihat sebagai kemunduran atau kemajuan. Melainkan sesuatu yang sangat biasa dalam masyarakat. Karena mahasiswapun berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia kita



FATCHUR/ BUL

biasa melakukan penyeragaman. Sehingga apa yang kemudian terjadi pada masyarakat menghadapi heterogenitas wacana di tingkat mahasiswa yang mau nggak mau mengimbas di tingkatan massa?atau apakah bisa dikatakan demonstrasi-demonstrasi merupakan konsekuensi logis dari pluralitas wacana yang dibangun oleh mahasiswa?

Bisa dikatakan demikian. Bisa dikatakan merupakan konsekuensi logis dari masyarakat yang selama ini menghadapi penyeragaman. Sedangkan penyeragaman akibat dari *policy* pemerintah yang diinstitusionalkan. Maka bisa dikatakan hegemoni negara otoriter dilemahkan dengan heterogenitas wacana. Heterogenitas ini merupakan syarat dalam cara berpikir demokratis.

Apakah mahasiswa dapat memiliki kesadaran sama dalam rangka aliansi rakyat.

Saya rasa kebersamaan itu bisa terbentuk jika ada musuh bersama. Tapi kalo sekarang situasi nya serba tidak jelas, lebih sulit. Namun bila di kemudian hari ada musuh bersama dari kekuatan-kekuatan lama yang bersatu lagi akan muncul lagi kebersamaan itu.

Bisa nggak alasan jatuhnya Soeharto sebagai satu-satunya alasan mengapa mahasiswa bergerak?

ya, itu sebagai alasan nomer satu, tapi ada ada alasan lain.

Tapi kemudian setelah Soeharto turun, bukankah yang terjadi anti klimak gerakan mahasiswa. Artinya Jatuhnya Soeharto telah mengebiri mahasiswa. Bagaimana menurutmu?

Saya kira mengapa gerakan mahasiswa kemudian berhenti karena banyak faktor. Memang bagi mahasiswa yang telah terjun lama ke politik dan mempunyai ideologi tertentu, maka gerakan mahasiswa sekarang bisa dikatakan melemah. Tapi untuk mahasiswa yang baru beberapa bulan terakhir terjun dalam politik, perlu memetakan dulu langkah mereka dan peran mereka. Apalagi kelompok-kelompok mahasiswa yang ada harus menentukan langkah untuk gerakan rakyat sekarang dan itu yang sedang dilakukan.

Apakah peranan terbesar gerakan mahasiswa sebagai suatu tekanan struktural terhadap negara sebelum kejatuhan Soeharto?

Saya kira mahasiswa berperan sebagai pendobrak kebekuan dan belenggu politik selama ini. Artinya, bahwa mahasiswa dengan perjuangan yang cukup gigih berhasil. Memang terjadi krisis politik di Indonesia dan mahasiswa bisa memicu suatu gerakan massa di beberapa kota yang lebih besar. Jadi peranan mahasiswa sebagai pelopor. Sedangkan fondasi gerakan mahasiswa itu sendiri ada tapi sekarang sedang di uji.

Asumsi yang kami bangun selama ini adalah fondasi gerakan mahasiswa hanyalah gerakan yang spontan yang bersifat normatif. Sehingga melahirkan pertanyaan apakah people power sebagai gerakan kerakyatan pernah ada di Indonesia?

Sebetulnya proses kejatuhan Soeharto agak berbeda dengan negara-negara Amerika Latin. Jika di negara lain disebabkan oleh pecahnya elit kekuasaan. Dimana ada satu kelompok yang *soft lines* dan satu kelompok lain *hard lines.* Dimana yang *soft lines* melakukan pendekatan pada kelompok oposisi moderat dan akhirnya dihasilkan demokratisasi moderat. Maka kalau di Indonesia lebih merupakan kebangkitan masyarakat sipil yang memicu proses perubahan. Faktor keterpecahan di kalangan elit hampir tidak berperan. Kalau pada saat-saat kristis terjadi keterpecahan elit, hanya sebagai reaksi atas kebangkitan arus bawah. Sehingga bisa dikatakan gerakan mahasiswa sangat besar peranannya untuk kejatuhan Soeharto.

Ada anggapan bahwa apa yang dilakukan mahasiswa tidak lebih dari avonturisme politik karena kebutuhan-kebutuhan eksistensialisme . Sehingga hanya bersifat fun-fun politik. Kemudian bagaimana anggapan ini berhadap-hadapan dengan gerakan mahasiswa yang membangkitkan people power?

Memang gerakan mahasiswa bersifat spontan. Kalau ada unsur *fun* wajar saja. Tetapi jika itu kemudian digunakan untuk merendahkan gerakan mahasiswa karena kalau hanya bersifat *fun,* saya rasa tidak bisa. Karena jika hanya berdasar fun maka gerakan mahasiswa tidak akan muncul seperti saat ini.

Apakah bisa dikatakan fun ini karena akumulasi krisis dan kebijakan elit?

Ya, sebenarnya khan orang turun ke lapangan politik dengan berbagai macam alasan. Sebagian besar mahasiswa yang terlibat gerakan mahasiswa masih baru sehingga bisa dikatakan terjadi karena akumulasi krisis. Tapi di balik yang terjadi di permukaan, ada penguatan - penguatan


FATCHUR/ BUL

kekuatan sendiri.

Bagaimana perbedaan pemaknaan antara people power di Filipina sebagai revolusi Edsa sedangkan di Indonesia dimaknai dengan reformasi? Apa kemungkinannya kedepan ?

Saya kira kalau istilah reformasi diapakai untuk menghindari pukulan berat dari kelompok militer. Tapi kalau di Filipina revolusi itu, sebenarnya juga hanya pergantian elit. Karena sesudah Cory Aquino naik yang terjadi adalah proses reformasi. Tapi kalau revolusi diartikan sebagai perubahan yang cepat dan dahsyat. Jadi saya kira lebih dikarenakan kekuatan oposisi Indonesia lebih lemah daripada di Filipina dalam mengambil alih kekuasaan rejim lama. Sedangkan Cory Aquino punya sumber kekuatan sendiri. Nah kalau sesudah itu terjadi semacam ketidakjelasan karena Indonesia saat ini masih dalam keadaan *euphoria*. Dimana semua kelompok elit menjadi yang paling pro reformasi. Tapi kalau dikemudian hari krisis ekonomi makin gawat begini, kekuatan-kekuatan elit ini akan semakin berani. Apalagi kalo dwifungsi ABRI direformasi. Karena selama kekuatan bersenjata punya peluang untuk masuk politik. Selalu ada ancaman yang membayangi proses reformasi politik. Juga fenomena yang akan muncul dikemudian hari adalah kelas menengah, yang sering terjadi di dalam demokrasi. Terjadi *euphoria* politik sehingga muncul kelas-kelas bawah seperti kaum miskin, buruh kota, gejolak desa kemudian sebagian besar dari kalangan menengah yang

...karena selama kekuatan bersenjata punya peluang untuk masuk politik. Selalu ada ancaman yang membayangi proses reformasi politik...

sebelumnya melawan rejim otoriter menjadi takut. Kok bisa jadinya begini? Adanya tekanan dari bawah menyebabkan mereka terancam. Sebagian kekuatan-kekuatan politik yang mewakili kelas menengah malah mundur Artinya beraliansi dengan sisa kekuatan lama.

Contohnya kasus Korea 1987. terjadi gerakan mahasiswa yang cukup besar dan kelas menengah ikut. Tapi kemudian terjadi pemogokan buruh yang besar juga. Waktu itu kelas menengah menarik kembali dukungan dan malah yang menang partai mewakili rejim lama.Untuk Indonesia, saya bisa bayangkan sebagian dari partai-partai politik yang selama ini digolongkan bagian dari masyarakat sipil seperti Muhammadyah akan beraliansi dengan Golkar.

Kalau people power di Filipina menghasilkan kondisi seperti saat itu. Dan kondisi people power di Indonesia menghasilkan kondisi ini. Bisakah kita menggugat sifat spontan dari people power Indonesia?

Ya, kalau menggugat tidak ada gunanya juga. Tapi perlu langkah-langkah konkret supaya spontanitas bisa dipertahankan dalam bentuk permanen yaitu dalam bentuk lembaga. Itu yang diperjuangkan mahasiswa sehingga tidak menjadi gerakan spontan. Namanya juga spontan, perlu program. Dan perjuangan demokratik membutuhkan massa terorganisir untuk menciptakan yang kondisi yang matang.❐

Melanie
Ugoran Prasad

IPWI

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER MANAJEMEN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI

Akreditasi:

S.K. Mendikbud No. 79/D/0/1993

Manajemen Pemasaran
Manajemen Keuangan
Manajemen SDM

Kuliah diselenggarakan dengan **Sistem Satuan Kredit Trimester (SKT).** Metode belajar mengajar adalah **Intensif dan Partisipatif,** dengan memanfaatkan berbagai teknik seperti: diskusi kelompok, pembahasan kasus, tugas kelompok, dan tugas individu. Selama masa pendidikan, mahasiswa dibina dan dilatih oleh tenaga pengajar profesional, bergelar profesor, doktor, dan master, dari kalangan akademisi maupun praktisi, serta staf profesional yang sangat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.

Persyaratan:

@ Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 yang dilegalisir sebanyak 2 lembar (PTS oleh Kopertis)
@ Mengisi formulir pendaftaran dan daftar isian .
@ Pasfoto ukuran:
2 x 3 sebanyak 6 lembar
3 x 4 sebanyak 6 lembar
4 x 6 sebanyak 6 lembar
@ Fotokopi KTP sebanyak 2 lembar
@ Biaya pendaftaran sebesar
Rp 100.000,00
@ Biaya matrikulasi sebesar
Rp 100.000,00
@ Lulus seleksi tertulis/ matrikulasi.



Waktu kuliah

Pagi	09.00-18.00
Malam	18.30-21.30
Intensif Sabtu Minggu	09.00-18.00

Info selengkapnya hubungi: Adhi Graha Lt. 14 Jl. Gatot Subroto kav. 56 Jakarta
Telp. 5265266 (Hunting) Fax. 5265270, e-mail: btc@. indo. net. id

Fifi, Jr BAL advertising

Menuju Indonesia Baru :

Koalisi Demokratik Kerakyatan



Angin reformasi masih terus disuarakan oleh setiap elemen pro perubahan di negeri ini. Turunnya Soeharto dari puncak kekuasaan adalah syarat bukan tujuan. Meminjam istilah Wimar Witoelar; "Saat ini kita hanya ganti sopir dalam sebuah bus yang sama". Habibie bisa dikatakan sama dengan Soeharto hanya mukanya saja yang berbeda. Sekedar mengingatkan, Habibie jauh sebelum ini pernah bilang "Soeharto adalah profesor saya". Artinya, perubahan sistem tampaknya masih jauh untuk dicapai dalam waktu dekat selama tidak ada pemikiran baru yang lebih cerdas dan segar dari para penentu kebijakan, apalagi dalam kepemimpinan seorang Habibie.

Fakta yang ada memperlihatkan, kalangan pro perubahan masih berjalan sendiri-sendiri dan saling mendahului. Saat Amien Rais mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MAR) ternyata tidak direspon oleh kelompok pro demokrasi lainnya. Sama seperti ketika giliran Gus Dur menawari Amien dengan koalisinya, ternyata balik tidak direspon oleh Amien. Begitulah, orang-orang berbasis massa yang diharapkan menjadi lokomotif perubahan di negeri ini, ternyata masih berada dalam lingkaran perbedaan. Kondisi ini makin diperburuk dengan munculnya bunglon-bunglon politik, orang-orang yang dulu menjadi kaki tangan Orde Baru tiba-tiba menjadi pahlawan perubahan.

Sementara itu, kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman kepentingan, garis politik, kultur dan sebagainya. Kesamaan langkah para elemen perubahan harus terjadi bila kita tak menginginkan makin terpuruk dalam kondisi yang mengerikan. Untuk memfokuskan agenda perjuangan bersama ternyata sangat sulit. Jika kita kaji kembali sejarah pada rezim Orde Lama, Soekarno pernah membuat NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). NASAKOM dianggap tepat sebagai penyatuan kepentingan - kepentingan besar untuk melakukan perjuangan bersama melawan imperialisme. Meskipun, gagal karena dilanggar oleh Soekarno sendiri. Tapi setidaknya langkah tersebut bukanlah langkah yang buruk.

Nampaknya dalam kondisi sosial politik yang *morat-marit* saat ini sangat diperlukan satu platfrom perjuangan bersama yang mewakili semua kepentingan bersama dalam satu wadah yang kokoh yaitu koalisi demokratik. Koalisi ini penting sebagai tahapan pembentukan pemerintahan transisi yang berwatak kerakyatan (di dalamnya terdiri dari wakil -wakil rakyat). Disamping itu, juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi politik yang mendesak. Dengan adanya koalisi demokratik diharapkan semua kepentingan terakomodir dan seluruh elemen rakyat turut serta didalamnya (misalnya dengan pembentukan dewan rakyat dari tingkatan lokal sampai nasional).

Tidak mudah memang membentuk sebuah koalisi yang solid, karena memerlukan parameter-parameter yang cukup banyak bagi tokoh yang duduk di dalamnya. Padahal, persoalan persoalan teknis dan bagaimana membawa perbedaan itu pada satu meja dialog menjadi agenda yang perlu segera diselesaikan.

Temu wicara *Balairung* kali ini mencoba untuk mengurai persoalan ini. Diskusi ini dipandu oleh Ajianto, mengundang Drs. Suharko staf IRE (*Institute Reseach Empowerment*) serta dosen jurusan Sosiologi, Fisipol, UGM, Faisol Reza, aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik), Mulyadi, ketua PUDI (Partai Uni Demokratik Indonesia) CabangYogyakarta. Hasil diskusi dituliskan kembali oleh Farah Adibah.

Merintis strategi

Hancurnya perekonomian Indonesia seiring dengan mundurnya Soeharto, mesin utama dari sebuah sistem yang menindas telah berdampak perekonomian ke arah baru, ekonomi dianggap bagian yang terpisah dari dunia politik. Penerapan kebijakan reformasi tidak semata-mata masalah teknis ekonomi dan menjadi wilayah ekonom ataupun teknokrat saja. Tetapi juga melibatkan proses tawar menawar kompromi dan konflik antara aktor politik dan berbagai kelompok kepentingan lain.

Kasus Orde Lama membuktikan tidak adanya perimbangan antara sektor politik dan sektor ekonomi membawa kegagalan bagi Orde Lama. Stephen Haggard dan Robert Kaufman -menggaris bawahi, pentingnya analisa perbandingan

antara penerapan kebijakan reformasi ekonomi dan proses reformasi di negara berkembang. Dengan menekankan masih pentingnya kekuasaan eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat untuk menjadi mediator pertentangan, perbedaan dan kompromi diantara aktor politik ketika reformasi ekonomi diterapkan. Kemungkinannya peristiwa ini akan berulang karena adanya ketidak percayaan pada rezim Habibie sebagai rezim yang memerintahan secara tidak konstitusional.

Adakah ini petunjuk bahwa di tengah situasi kebingungan seperti ini, koalisi demokratik dianggap pilihan paling efektif; mengembalikan tanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat. Terbukti dalam banyak kasus, koalisi demokratik sebagai penyatuan kelompok-kelompok sipil mampu menjadi solusi bagi terwujudnya masyarakat yang lebih demokratis.

"Sebuah contoh kasus yang baik, ketika NRC berhasil meruntuhkan politik Apartheid di Afsel. Dimana kelompok-kelompok yang bertikai saat itu mampu berkoalisi walaupun sementara berhasil menghapus politik apartheid ini." ungkap Reza aktivis PRD yang sempat menjadi korban penculikan Kopassus itu. Yang hampir mirip kasusnya dengan Indonesia adalah kasus Chili yang pernah di bawah pemerintahan militer puluhan tahun. Ternyata mampu bangkit kembali untuk membentuk pemerintahan demokratis lepas dari campur tangan militer.

Hanya saja yang menjadi catatan negara-negara seperti Brazil, Venezuela dan Chili, sebelumnya telah mengalami masa pemerintahan demokrasi. Sedangkan kita belum pernah mengalami masa itu. Mungkin pada masa kejayaan kerajaan dahulu. Jangankan demokratisasi, kenyataan dalam masyarakat militerisasilah yang telah terjadi. Beban berat untuk membawa masyarakat kita sebagai *grass root* ke alam demokrasi setelah puluhan tahun dibawah rezim militer.



ISTIMEWA

Faisol Reza

"Diperlukannya keterlibatan akademisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini " papar Mulyadi. Gerakan mahasiswa masih dibutuhkan dalam koaliasi ini. Dimana gerakan mahasiswa bukan hanya gerakan moral tetapi juga dengan patron ideologi ataupun patron politik.

Bagi Reza, kondisi politik yang berkembang akhir-akhir ini sangat mendukung bagi perkembangan organisasi kerakyatan yang bisa mengagendakan perjuangan politik dengan membentuk koalisi-demokratik. Pertama, dari koalisi demokratik seperti Gus Dur mendukung Megawati di pemilu mendatang. Adanya dukungan semacam ini mengandung makna pengakuan legalitas pemerintahan transisi Habibie. Kedua, dalam konsep koalisi demokratik bisa dimunculkan semacam pemerintahan dewan kedaulatan rakyat yang memegang otoritas terhadap negara. Misalnya, pertama dengan mengagendakan pemilu yang jurdil (jujur dan adil). Kedua, mampu berasumsi bahwa satu pola, satu sikap politik menolak Habibie. Permasalahannya apakah kondisi seperti ini sudah terbentuk di Indonesia. Reza mencontohkan bagaimana pembentukan koalisi demokrasi ini nantinya bisa terjadi, ketika rakyat lebih memilih mengadukan kasusnya ke LBH daripada mengadukan ke institusi resmi pemerintahan. Realitas seperti ini menegasikan pemerintahan Habibie. Ini menunjukkan pemerintahan Habibie sebagai pemerintahan yang tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat."Satu hal yang sering dilupakan orang kalau kita bicara koalisi demokratik adalah organis yang berkembang secara serampangan di kalangan rakyat," lanjutnya. Adanya berbagai macam komite tetapi tidak pernah satu pola, satu usaha sehingga tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat.



ISTIMEWA

Drs. Suharko

"Namun, pembentukan koalisi demokratik tidak ada maknanya meskipun menolak Habibie tanpa disertai dukungan rakyat ataupun dukungan komite lain," kata Reza. Ditambahkan bahwa koalisi akan sangat bermakna ketika dikelola dan dijalankan oleh organisasi rakyat sendiri.

"Karena itu koalisi demokratik sudah seharusnya datang dari rakyat seperti koalisi yang muncul di Yogyakarta. Koalisi antara rakyat, mahasiswa, buruh, pengamen mahasiswa dan organisasi lain," ujarnya. Artinya mengandaikan koalisi yang bersifat massif dan populer. Selanjutnya, berkaitan dengan koalisi demokratik, Reza cenderung menekankan model koalisi yang eksistensinya menegasikan (tidak mengakui) posisi Habibie sebagai pemerintahan yang sah.

Mungkinkan koalisi Demokratik terbentuk dari kalangan rakyat sebagaimana dibayangkan Reza ? Suharko, menilai kondisi politik saat ini lebih memunculkan kembali primordialisme. Mungkinkah faksi - faksi ataupun partai-partai yang ada setelah ini mampu saling toleran dalam memperebutkan kursi di Pemilu? Apakah masyarakat di tingkat *grass root* mampu berperan kembali setelah hilang perannya dari gerakan reformasi? Situasi ini mengilustrasikan kondisi masyarakat sipil kita yang masih rentan dan terkotak-kotak.

Di sisi lain Drs. Suharko menilai, posisi pemerintahan Habibie dianggap tidak mampu membuat sebuah *grand desain* bagaimana ekonomi dan politik yang harus direformasi. Juga

sampai sejauh ini tidak ada kepastian dari pemerintah, kapan pemilu akan diselenggarakan, semua penyelesaian persoalan terpaku pada kebijakan IMF.

Grand desain gerakan demokrasi

Ada tidaknya kesabaran sebagai kondisi obyektif untuk menyelesaikan persoalan ini, menjadi sebuah pertanyaan besar akibat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah transisi. Juga, bagaimana kaum muda sampai terjebak dalam dikotomi gerakan politik dan gerakan moral. Apakah gerakan anarki yang terjadi merupakan tanda kebodohan atau hanya sebagai strategi elit?

Menjawab pertanyaan ini, Suharko mengungkapkan "Sebenarnya sejauh mana keabsahan pemerintah Habibie dan siapa yang mampu menjalankan grand desain ini?"

Adanya kekuatan pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia telah diakui dunia internasioanal. Bisa dibuktikan dengan kunjungan delegasi IMF ini ke tokoh-tokoh oposisi semacam Gus Dur dan Mega.

Aris, seorang peserta diskusi mengungkapkan dengan melihat pembentukan koalisi demokratik merupakan sebuah persetujuan revolusi dalam konteks transisi untuk membentuk koalisi demokratik itu sendiri dengan strategi tertentu

Menjawab permasalahan ini Suharko berpendapat "Kalau ingin berkoalisi maka harus mempunyai *Grand desain* untuk mempertemukannya. Nantinya praktek ini bukan hanya satu koalisi tetapi ada banyak koalisi yang terbentuk.

Sementara Mulyadi lebih mengarahkan jawaban pada permasalahan KKN dan menganggap persoalan yang ada saat ini merupakan akibat yang ditimbulkan modernisasi.



ISTIMEWA

Mulyadi

Perdebatan ini sampai pada puncaknya ketika dipertanyakan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Sayang ketiga pembicara agkanya belum sampai ketataran yang sangat teknis itu.

Masih banyak persoalan yang belum terjawab dari serangkaian perdebatan ini, pertama mengacu pada argumen Reza bahwa koalisi datangnya dari masyarakat padahal realitas menunjukkan bahwa permainan pollitik hanya sampai tingkatan elit saja. Masyarakat seringkali hanya mendapatkan porsi sebatas rumor. Apa memang masih perlu koalisi pada tataran massa kalau berpegang bahwa koalisi lebih ketat apakah ini bukan hanya sebuah aliansi yang memang dituntut untuk menuju sebuah perubahan.

Kedua ada kesangsian apakah kondisi negeri ini bisa lolos dari kondisi Ini dalam waktu singkat, sedangkan melihat keadaan yang masih jauh dari suasana demokratis. Pengalaman demokratis yang tidak kita miliki menimbulkan problem tersendiri.

Koalisi Demokratik pada akhirnya memang tidak mudah ketika harus diterapkan ditingkat massa. Sejauh ini elemen-elemen pro perubahan masih terkesan berjalan sendiri, belum ada kesatuan langkah. Sementara itu dengan pelan namun pasti, sisa-sisa kekuatan Soeharto tengah berkonsolidasi merapatkan barisan

Suharto boleh mundur, tetapi sistem kapitalis militeristik belum runtuh. Nampaknya koalisi demokratik kerakyatan agenda awal yang dapat ditempuh demi terwujudnya pemerintahan sipil yang demokratik.❒

Farah Adibah



FATCHUR/ BUL

Fendry Ponomban
Kepala Divisi
Pendidikan dan Propaganda
KPRP Yogyakarta

Proses Menuju Perubahan Sejati

(Sebuah Refleksi Awal Gerakan Mahasiswa 1998)



Jauh sebelum drama reformasi yang dipicu oleh krisis moneter bergulir, wacana tentang format gerakan mahasiswa cukup mendominasi forum-forum diskusi mahasiswa. Secara konseptual, pergulatan pemikiran tersebut mengambil titik simpul perlunya sebuah *mainstream* gerakan yang beraliansi dengan rakyat. Pilihanpun jatuh pada sektor buruh yang memiliki tradisi panjang dalam sejarah perlawanan sejak awal tahun duapuluhan. Fakta sejarah pemogokan buruh yang tergabung dalam *VSTP* (*Vereeniging van Spoor-en Trawmwegpersoneel*) dibawah pimpinan totoh-tokoh gerakan radikal seperti Sneevliet, Semaun, dan Darsono menguatkan pilihan atas sektor ini. Apalagi Strategi pembangunan Orde Baru yang kapitalistik berhasil meningkatkan jumlah buruh yang tersebar di berbagai pusat sirkulasi ekonomi politik rezim, plus segala persoalan yang melingkupinya; upah rendah, jaminan sosial yang minim serta penyelewengan hah-hak buruh.

Selain itu, terdapat pilihan sektor masyarakat lain yang juga memiliki potensi untuk membangun perlawanan yang massif yakni kaum miskin kota. Lapisan yang detik demi detik berlomba untuk mendapatkan makan ini menjanjikan perlawanan yang militan dan radikal. Sama halnya dengan buruh, kaum miskin kota telah menjadi fenomena . Menyusul pesatnya industrialisasi dan urbanisasi.

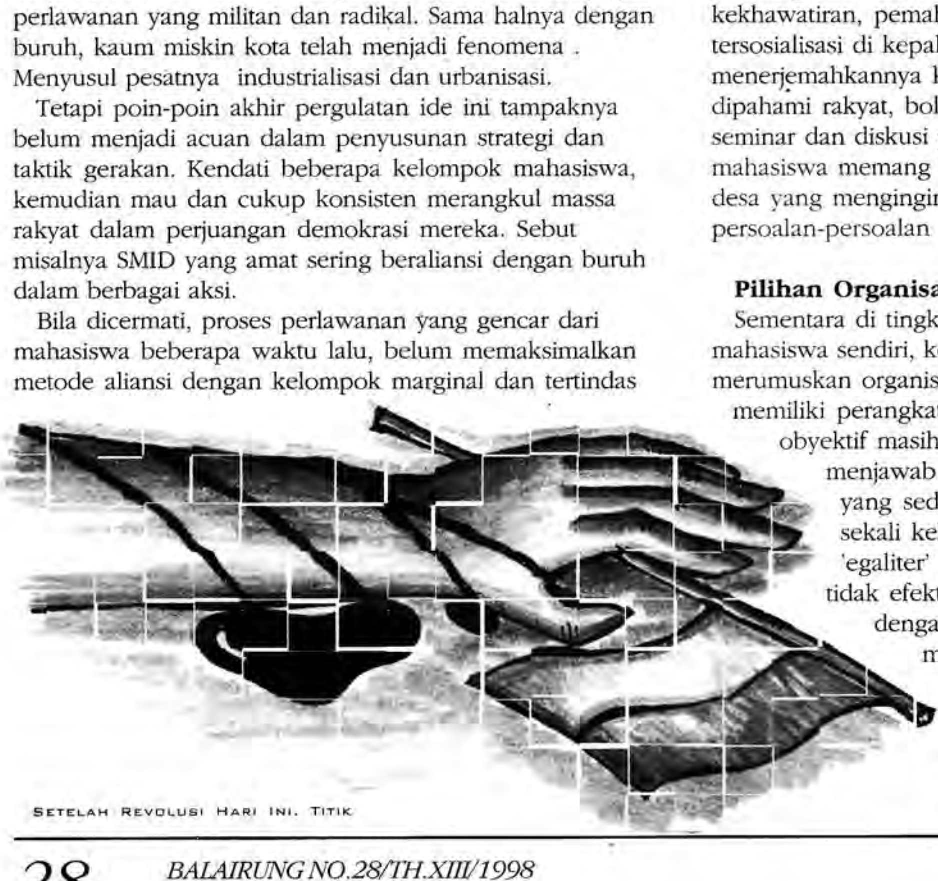
Tetapi poin-poin akhir pergulatan ide ini tampaknya belum menjadi acuan dalam penyusunan strategi dan taktik gerakan. Kendati beberapa kelompok mahasiswa, kemudian mau dan cukup konsisten merangkul massa rakyat dalam perjuangan demokrasi mereka. Sebut misalnya SMID yang amat sering beraliansi dengan buruh dalam berbagai aksi.

Bila dicermati, proses perlawanan yang gencar dari mahasiswa beberapa waktu lalu, belum memaksimalkan metode aliansi dengan kelompok marginal dan tertindas ini. Meskipun beberapa kelompok di Lampung, Yogya, dan Solo sempat memunculkan figur-figur rakyat dalam aksi-aksinya. Sementara kelompok aksi lain nampaknya masih cenderung bertahan dengan acuan mahasiswa sebagai *moral force*. Kendati format ini sesungguhnya telah kehilangan relevansinya dan terbukti dalam berbagai perlawanan mahasiswa generasi sebelumya, tidak membawa perubahan sosial. Posisi 'resi' menurut istilah Arif Budiman ini sudah harus ditingalkan. Pertimbangannya cukup jelas; isu-isu moral (moralitas pejabat) adalah konsekuensi logis dari sistem yang kondusif. Fungsi kontrol legislatif yang macet--5 UU Politik dan merajalelanya represi atas upaya-upaya partisipasi politik rakyat--Dwi fungsi ABRI, adalah sekian agenda prioritas isu yang harus dipersoalkan. Inilah akar dari mengguritanya praktek-praktek yang menyimpang. Jadi variabel ketimpangan strukturlah yang menjadi titik bidik gerakan mahasiswa. Di sini termasuk faktor peran kapitalisme yang memproduksi aneka persoalan.

Menjadi persoalan, karena pasca lengsernya Soeharto rakyat kemudian marak menuntut lurah serta carik desa untuk turun jabatan. Aparatur negara di tingkatan ini memang berada lebih dekat dari kontrol rakyat. Terbersit kekhawatiran, pemahaman persoalan struktural belum tersosialisasi di kepala banyak orang. Upaya menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami rakyat, boleh jadi tidak seintens penyelenggaraan seminar dan diskusi panel politik di kampus. Posko-posko mahasiswa memang kebanjiran surat dari berbagai pelosok desa yang menginginkan advokasi mahasiswa untuk persoalan-persoalan mereka.

Pilihan Organisasi

Sementara di tingkat internal organisasi gerakan mahasiswa sendiri, konsolidasi belum final. Proses merumuskan organisasi yang ramping, efisien, dan memiliki perangkat yang sesuai dengan kebutuhan obyektif masih menjadi agenda penting. Pilihan yang menjawab kebutuhan ini adalah bentuk komite yang sederhana namun efektif. Tetapi banyak sekali kelompok aksi mahasiswa yang begitu 'egaliter' bertahan dengan kepemimpinan yang tidak efektif seperti presidium. Sama halnya dengan pilihan forkom, yang cenderung membahas persoalan tanpa jaminan adanya keputusan politik . Seorang jurnalis sempat mengeluh karena kebingungan mencari informasi dari sekian banyak orang yang semuanya mengaku pemimpin kelompok itu.



SETELAH REVOLUSI HARI INI. TITIK

Celakanya, pokok persoalan yang diinginkan wartawan itu disampaikan secara berbeda.

Tidak padunya isu tuntutan sempat ikut mewarnai. Isu moral seperti korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi cukup dahsyat selain teriakan turunkan Soeharto. Ini harus diakui sulit dihindarkan oleh kelompok yang memiliki *frame* gerakan moral dan harus konsisten mengangkat isu moral. Diferensiasi isu akhirnya terjadi dengan kelompok yang biasa menohok akar struktural sebagai biang munculnya KKN. KKN menjadi idiom yang sangat akrab di telinga rakyat. Celakanya, bila ini dianggap kunci dari segala persoalan.

Kembali ke rumusan format organisasi, sepertinya ada ketidakmasimalan menerjemahkan sebuah organisasi perlawanan. Struktur yang efisien, rapi dan jelas merupakan prasyarat bagi kerja-kerja organisasi mewujudkan program-program politiknya menuju masyarakat berkeadilan dan demokratis. Merespon sebuah percepatan politik dan membuat keputusan-keputusan taktis politik tentu bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang telah dipercaya. Bersama dengan komunitas dalam kelompoknya, ia harus melewati koridor internalisasi serta dialektika proses merumuskan strategi-taktik dan tujuan organisasi perlawanan yang ia pimpin.

Kerja konsolidasi ditingkatkan organisasi ini masih perlu segera dilengkapi dengan pembentukan organisasi jaringan nasional. Maksudnya sebuah organisasi progresif revolusioner dengan garis massa tentunya. Dampak tidak adanya organ nasional amat terasa saat ini, corong gerakan yang menyuarakan arah dan target gerakan tidak ditemukan di atas panggung politik nasional. Secara obyektif ditingkatan nasional saat ini tidak terbentuk organ nasional yang solid. Kecuali KAMMI (Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Kelompok ini cukup solid, meski ruang-ruang bagi masuknya publik yang lebih luas belum terbuka lebar.

Upaya pembentukan organ nasional kadangkala terhambat oleh kekhawatiran terjadinya polarisasi. Hal tersebut muncul dengan beragamnya ideologi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Padahal polarisasi sesungguhnya sangat alamiah untuk terjadi dan berguna untuk menyisir kelompok mana yang memiliki karakter untuk benar-benar memperjuangkan demokrasi secara serius. Pada gilirannya polarisasi akan menghasilkan kelompok baru yang lebih maju dan siap berdiri di garis kepeloporan.

Kevakuman organ nasional kemudian menebalkan posisi mahasiswa pada garis moderat, yang dalam sejarah tidak pernah berhasil memimpin menuju kemenangan. Mereka seakan bertoleransi dengan politik kooperatif, memberi waktu kepada Habibie untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Toleransi ini begitu besar, sehingga mahasiswa tidak sempat berkomentar ketika jaksa agung tiba-tiba diganti. Proses pengadilan Soeharto yang dikumandangkanpun tiba-tiba hilang dari kontrol publik. Soeharto masih bagai seorang prabu yang tak tersentuh hukum.

Jadi, posisi mahasiswa sebagai penonton dalam pentas politik nasional sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari tidak adanya organisasi berjaringan nasional yang solid. Kesempatan membangun kekuatan tawar sekaligus tekanan dengan kekuasaan akhirnya terbang begitu saja.

Agenda-agenda mendesak

Mengkritisi perjalanan gerakan mahasiswa baru-baru ini akhirnya akan membicarakan sebuah agenda kerja yang tertinggal, yakni pengorganisiran rakyat. Memang banyak persoalan yang menyertainya. Diantaranya kecakapan dan pemahaman politik mahasiswa yang harus terus-menerus ditambah energinya. Polanya tidak harus mengkarantinakan organiser dalam beberapa hari untuk sebuah pembekalan melalui kursus politik, meskipun itu perlu. Masuk dan langsung berinteraksi dengan segala problem rakyat adalah solusi dimana dialektika pemahaman dan pembentukan karakter dan kecakapan politik mahasiswa terbentuk lewat persentuhan itu. Program pendidikan konseptual materi ekonomi politik dan keterlibatan dalam aksi massa bersama menjadi agenda yang harus diselesaikan dalam proses pembentukan basis massa. Inilah pendidikan politik yang sebenarnya. Terlibat dalam realitas politik masyarakat dan tidak sekedar rangsangan kognitif belaka. Dari situ problem yang dihadapi rakyat ditangkap, disosialisasikan dan dicari jalan keluarnya. Ini sekaligus menguji bagaimana massa mampu menangkap isu yang dilontarkan sementara mereka sendiri mengalami penyadaran atas persoalan yang dihadapi.

Fenomena bangkitnya keberanian rakyat dalam protes-protes lingkup kecil belakangan ini menjadi menarik untuk disikapi. Begitu pula dengan surat-surat permintaan advokasi di posko-posko mahasiswa. Momen ini sesungguhnya dapat digunakan secara efektif untuk merebut kepemimpinan politik. Hanya saja yang harus diperhatikan perlunya menarik posisi untuk tidak menjadi *hero* yang begitu saja datang menyelesaikan masalah rakyat. Melalui ruang gerak yang relatif terbuka saat ini tentu memudahkan sebuah kerja pengorganisiran sampai terbentuknya organ perlawanan yang berbasis massa. Membangun organisasi massa yang independen di setiap basis pengorganisiran memiliki arti penting untuk wadah pembahasan persoalan sekaligus merencanakan keputusan-keputusan penting yang diambil oleh rakyat sendiri.

Belum banyak yang menyadari bahwa sebuah organisasi rakyat yang independen betapapun sederhananya ia, memiliki banyak sekali kegunaan. Interaksi dan terbangunnya solidaritas kolektif antara anggota sesungguhnya dapat tiba-tiba menjadi kekuatan penting. Wadah yang bebas dari kontaminasi koorporatisme negara ini dapat menjadi tumpuan identitas sosial, kultural, dan kelak politik bagi pengikutnya. Inilah kekuatan riil yang berpotensi melakukan sebuah aliansi gerakan politik yang padu terhadap target dan tujuan gerakan mahasiswa. Sebuah gerakan yang bercita-cita akan sebuah perubahan sosial sejati, tidak sekedar pergantian elit kekuasaan.

Upaya keras menjebol pagar-pagar isolasi bangunan rejim Soeharto agar mahasiswa tetap di kampus, nampaknya menjadi agenda mendesak gerakan mahasiswa pasca Soeharto. Arena pertandingan belum usai. Tetapi tidak demikian halnya dengan mahasiswa Indonesia. Rejim Soeharto yang berkamuflase di tubuh Habibie, masih nampak kekuatannya.❒



Drs. Cornelis Lay, M.A.
Pakar Politik, Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Otonomi Daerah, Transisi ke Federalisme



Masa depan keutuhan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk menemukan sebuah bentuk pengaturan politik baru. Bentuk yang mampu mengakomodasi kemajemukan yang sangat ekstrim. Corak kemajemukan yang ditandai dengan oleh bertumpang tindihnya parameter pembeda menyebabkan secara alamiah lebih memiliki daya sentripetal ketimbang sentrifugal.

Sekalipun proses rekayasa sosial politik lewat *nation building* dan *character building* cukup mampu membangun sentimen-sentimen kebangsaan pada tingkat psikologi aneka kemajemukan yang ada, daya disintregrasi yang melekat dalam proses globalisasi, berikut perkembangan kontemporer politik yang ditandai oleh semakin mendalamnya krisis identitas sebagai bangsa, disintegrsi elit politik sebagai simbol integrasi bangsa, dan semakin mengentalnya identitas kelompok yang memojokkan solidaritas bangsa merupakan energi-energi sosial politik negatif yang dituangkan ke dalam mimpi kita untuk menyaksikan Indonesia masa depan yang tetap utuh, tidak tercerai berai. Ini semuanya menempatkan masa depan Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik berada dalam tanda tanya besar.

Keterbatasan sentralisasi

Kerangka pengaturan politik yang meletakkan pusat sebagai titik gravitasi politik yang mengenggam kekuasaan sangat besar guna menjamin kesetiaan politik dari beragamnya unit-unit politik lokal yang dipraktekkan orba mengandung didalamnya keterbatasan-keterbatasan yang inherent. Syarat-syarat minimal yang diperlukan guna tetap efektifnya daya kerja pengaturan politik yang sentralistis, kini -yang dapat dipastikan untuk jangka waktu yang cukup panjang ke depan-- akan sangat sulit dipenuhi banga ini.

Kita sama menyaksikan kemerosotan secara luar biasa basis material mengiringi kebangkrutan ekonomi bangsa, telah menyebabkan kemampuan pusat untuk "membeli loyalitas politik" unit-unit politik lokal musnah. Padahal pembelian loyalitas lewat isentif materi secara royal merupakan instrumen politik pokok yang diandalkan selama orba. Demikian pula, tekanan bertubi-tubi terhadap berbagai instrumen kekerasan negara, telah berakibat pada terjadinya kemerosotan drastis terhadap "daya hukum" pusat yang selama ini merupakan isentif terpenting lainnya dalam menjamin loyalitas politik lokal terhadap Jakarta. Terakhir, hilangnya figur kepemimpinan politk di tingkat nasional sebagai daya persuasi politik yang tinggi sebagai syarat untuk merangkum semua kemajemukan ke dalam kesetiaan tunggal pada Jakarta, menempatkan bangsa ini pada posisi yang semakin sulit.

Pengaturan politik bercorak sentralistis, dengannya, kini berada pada titik kebangkrutan. Bangkitnya sentimen etno-nasionalisme menerakan jejak yang semakin kasat mata di cukup banyak daerah Indonesia merupakan bukti-bukti awal dari kebangkrutan model pengaturan politk sentralisitis. Sayangnya, *sense* tentang krisis tidak cukup terekam disepak terjang para pelaku ataupun kebijaksanaan yang dihasilkan rejim politik. Padahal kita sama menyaksikan, hiruk pikuk reformasi yang melanda republik ini telah memberikan alasan yang sangat kuat bagi sentimen etno-nasionalisme yang selama ini terbenam di bawah penindasan pengaturan politik sentralistis yang keras untuk muncul secara telanjang dipermukaan.

Otonomi Sebagai Transisi ke Federalisme

Perkembangan yang ada mengisyaratkan, penyebaran kekuasaan secara geografis merupakan pilihan politik paling logis bila bangsa ini ingin tetap mempertahankan keutuhannya. Dalam konteks ini, pemberian otonomi maksimal pada unit-unit politik tingkat lokal adalah keharusan yang tak terelakkan. Saat sekarang, seperti halnya dengan reformasi, otonomi daerah bukan lagi yang bersifat *either...or*. Ia merupakan kemungkinan tunggal yang tersedia. Persoalannya adalah apakah otonomi maksimal akan merupakan bentuk dan fase selesai dari pengaturan politik baru guna menjamin keutuhan bangsa ini, atau justru merupakan bentuk dan fase transisi ke arah federalisme sebagai bentuk dan fase pengaturan politik yang bersifat final.

Jika kita berkaca di kecenderungan global, maka bisa dipastikan pilihan kedua, yakni federalisme sebagai bentuk pengaturan politik yang bersifat transisi, adalah pilihan yang paling logis. Pengalaman pemberontakan daerah tahun 1950-an dan 1960-an memang cukup menjadi fondasi untuk mencemaskan disintegrasi bangsa sebagai kemungkinan politik buruk jika otonomi maksimal apalagi federalisme di berlakukan. Akan tetapi terus menerus mengigau tentang ancaman disintegrasi bangsa sambil tetap mengenggam sentralisme sebagi ajian politik pusat, menurut hemat saya justru merupakan investasi yang akan semakin mengukuhkan alasan bagi unit-unit politik lokal

untuk mengatakan *enough is enough* pada Jakarta.

Demikian pula, penggunaan ketimpangan antar daerah yang akan semakin ekstrem karena ketimpangan distribusi sumber daya alam sebagai alasan untuk terus menghindari pemencaran kekuasaan secara geografis, akan semakin merangsang hasrat-hasrat politik lokal yang bersifat sentripetal untuk mengedepan.

Tak kalah pentingnya adalah menggunakan federalisme singkat produk rekayasa kekuatan kolonial Belanda di masa lalu sebagai alasan politik untuk menolak federalisme di masa Indonesia nanti, menurut hemat saya akan merugikan kepentingan lebih mendasar dari bangsa yang besar untuk bisa tetap tegaknya sebagai sebuah kesatuan politik yang utuh. Sama tidak menguntungkannya menyodorkan format pengaturan politik berdasarkan UUD 1945 yang tidak mengenal federalisme sebagai alasan pengabaian kemungkinan bagi pembentukan negara federal di masa depan.

Yang kita perlukan saat sekarang adalah bagaimana menciptakan wacana yang membawa berbagai bagian dari bangsa ini untuk melihat federalisme sebagai bentuk pengaturan politik yang mungkin dan wajar, bahkan dibutuhkan bagi Indonesia di 25 atau 50 tahun ke depan. Sama pentingnya dengan penciptaan wacana adalah memberikan pengalaman bagi unit-unit politik lokal untuk mengenggam dan pengelola politik secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk yang terkahir ini, pemberian otonomi maksimal secara bertahap merupakan langkah politik yang diperlukan.



NIGHTMARE: INDONESIA 53. TITIK

... penyebaran kekuasaan secara geografis merupakan pilihan politik paling logis bila bangsa ini ingin tetap mempertahankan keutuhannya...

Menuju Otonomi Maksimal

Persoalannya kini, bagaimanakah maksimalisasi otonomi secara gradual dilakukan? Untuk mewujudkan hal ini, maka *sharing* kekuasaan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah awal yang diperlukan. Hal ini mengharuskan adanya pengaturan politik yang memastikan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi secara nyata bisa diwujudkan. Langkah penting untuk mewujudkannya adalah dengan memisahkan fungsi kepala daerah dan kepala wilayah, membenahi proses rekrutmen pejabat-pejabat politk lokal yang meletakkan "daerah" sebagai pusat legitimasi prinsipil, memberikan bukan saja jumlah urusan yang semakin banyak pada daerah-daerah, tetapi sekaligus kewenangan yang jauh lebih besar, menghapus semua instansi vertikal di tingkat lokal yang memiliki pararelisme dengan dinas-dinas lokal, penghapusan bentuk penjatahan politk bagi militer baik di legislatif maupun eksekutif lokal, dan tak kalah pentingnya adalah *sharing* sumber-sumber pembiayaan secara adil.

Pengurangan derajat intervensi Jakarta, baik lewat instrumen kebijaksanaan (juklak ataupun juknis), instrumen politik melalui jalur komando partai dan militer, instrumen keuangan lewat monopoli sumber sumber keuangan penting daerah dan mekanisme subsidi pusat (termasuk Inpres), adalah hal-hal lain yang diperlukan.

Langkah-langkah di atas harus diikuti oeh pembenahan yang sangat serius terhadap struktur internal politik lokal. Struktur politik lokal yang bercorak monolitik yang diwariskan oleh Orba sebagai bagian dari strategi untuk mengawal kesetiaan politik pada Jakarta harus disudahi sesegeranya. Keberadaan lembaga "penguasa tunggal" serta Muspida sebagai lembaga yang bercorak kolutif dan manipulatif harus ditiadakan. Dewan lokal harus diberdayakan lewat pemfungsiannya sebagai saluran politik prinsipil pemunculan pejabat politik lokal dan muara pertanggungjawaban pejabat politik lokal, dan bukan sebaliknya seperti pengalaman selama Orba.

Penguatan dewan lokal juga dapat diwujudkan lewat pengaturan kembali format hubungan dewan dan kepala daerah yang memungkinkan dewan bisa melaksanakan berbagai haknya secara maksimal. Dengan cara seperti ini, dewan-dewan daerah memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk mewujudkan fungsi legislasi, budjeter, dan pengawasan yang melekat dalam dirinya. Termasuk dalam hal ini adalah pemisahan yang tegas antara lembaga, fungsi legislatif dan fungsi eksekutif yang selama ini "disatukan" lewat konsep "kemitraan" - Rumusan konstitusionalnya adalah "pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD".

Masih banyak lagi pembenahan yang bisa dilakukan untuk mencapai format otonomi daerah yang ideal, yakni sebuah situasi dimana daerah bisa menemukan mekanismenya sendiri. Sebuah situasi dimana persolan-persoalan menyangkut daerah yang bersangkutan secara politik dan administratif berada dalam kawasan kewenangan unit-unit politik lokal. Sebuah pengaturan politik minimal yang memastikan terakomodasinya kemajemukan yang kita punyai sebagai bangsa. Inilah fase antara menuju federalisme sebagai bentuk final dari bentuk pengaturan politik masa depan Indonesia.❐

Di Balik Pemindahan Kampus

Keberadaan kampus-kampus di pinggiran kota melahirkan beragam penafsiran. Ada anggapan itu merupakan rekayasa rezim Soeharto untuk meminggirkan mahasiswa dan kampus. Tak sedikit yang membantah. *Student-Phobia* menghinggapi Orde Baru.

Seorang aktivis pers mahasiswa UGM, setelah berkunjung beberapa hari di Universitas Udayana (UNUD) Bali dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta, benar-benar tidak heran dan tak habis pikir.

Pertama, tatkala ia singgah ke UNUD, kampus terpadunya terletak di atas sebuah bukit tandus dan terjal. Membuat dia harus menggelengkan kepala . "Bagaimana tidak, air saja sulit padahal siapapun tahu betapa pentingnya itu. Maka, jangankan demonstrasi, bisa *krasan* kuliah saja sudah *alhamdulillah*?" ucapnya dengan logat Blitar yang kental.

Kedua, ketika mampir ke UI, keheranannya semakin tidak bisa ditutupi. Universitas Indonesia yang pada era 70-an dan 80-an merupakan salah satu kampus pelopor gerakan mahasiswa, kini harus pindah ke daerah pinggiran selatan kota Jakarta, Depok. "Kok bisa begitu ya?, kalau *nggak* percaya datang saja sendiri ke UI Depok, bahkan saya juga menerima keluhan dari beberapa teman mahasiswa UI yang terpaksa menghijrahkan 'kantor' kegiatannya ke Salemba karena jauhnya Depok dari interaksi masyarakat," ujarnya.

Apalagi, di kemudian hari cerita tentang kampus-kampus yang harus pindah ataupun sengaja memindahkan diri ke pinggiran-pinggiran kota banyak didengar. Rasa heran dan curiga mahasiswa tersebut semakin bertambah. Menyusul pindahnya UI, UNPAD, ITS, UII, UNDIP dan UNSRI menambah daftar cerita 'misteri' pemindahan kampus-kampus ke daerah pinggiran kota.

"Mengapa harus kampus yang selalu dikorbankan dalam tata letak kota?" tanyanya.

Atau jangan-jangan pemindahan kampus ini merupakan rekayasa politik rezim Orde Baru dalam meminggirkan mahasiswa dan kampus ? Sebab, paling tidak

DOK. BALAIRUNG



Kampus UI Depok
Di pinggiran kota Jakarta

pemindahan kampus ke daerah pinggiran akan meminimalkan dan mempersulit mahasiswa untuk berada dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. "Saya khawatir sedikit demi sedikit, mahasiswa berubah menjadi sangat ekslusif sibuk di menara gadingnya?" lanjut aktivis pers mahasiswa itu.

Keheranan dan kecurigaan seperti mahasiswa di atas sangat wajar. Karena, jika kita menengok ke belakang, yaitu hiruk pikuk dan pasang surut kehidupan mahasiswa pada tiga dasawarsa terakhir (1966-1998). Bisa dikatakan bahwa pemerintah Orde Baru sangat represif terhadap segala bentuk aktivitas mahasiswa. Seperti terjangkiti *student-phobia,* rasa khawatir dan takut yang berlebihan terhadap mahasiswa.

Peristiwa Malari '74, aksi '78 menentang NKK/BKK, aksi '89, lalu gerakan mahasiswa '98. Ditambah, penculikan dan penangkapan aktivis mahasiswa, peristiwa 3 April di Boulevard UGM dan puncaknya penembakan mahasiwa Trisakti Jakarta, serta banyak peristiwa lain, merupakan bukti besarnya tingkat represifitas dan intervensi Orde Baru terhadap kampus. Seolah mahasiswa selalu menjadi lawan bagi rezim Orde Baru.

Maka, kalaupun akhirnya pemindahan kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia ke daerah pinggiran kota menimbulkan banyak penafsiran dan polemik, sah-sah saja. Sebab, dari dulu hubungan kampus-mahasiswa dan Orde Baru memang tidak pernah akur.

Kepindahan UI dari Salemba ke Depok pada tahun 1987 (setelah mengalami tarik ulur hampir 12 tahun) misalnya, tak pelak memunculkan banyak penafsiran dan pertanyaan. Sebab, bukan hanya karena letak Depok yang jauh, tetapi adanya kenyataan bahwa mahasiswa dan Orde Baru selalu bertentangan. Sikap pemerintah Orde Baru yang represif dan selalu mencampuri masalah kampus yang semakin memperkuat kecurigaan tentang "sesuatu" dibalik kepindahan UI.

Apalagi, sebelumnya terjadi peristiwa Malari '74 dan aksi menentang NKK/ BKK. Dan mahasiswa UI pada akhir

tahun 60-an memang berada di garda depan aksi-aksi demontrasi mahasiswa Indonesia.

Klop sudah. Lalu siapa yang memindah UI? Benarkah kepindahan kampus UI ke Depok merupakan rekayasa rezim Orde Baru untuk meminggirkan aktivitas politik mahasiswa UI?

Untuk langsung menarik kesimpulan bahwa keberadaan UI di Depok adalah rekayasa pemerintah Orde baru memang terburu-buru.

Sebab, hal ini sangat kontradiktif dengan isi pesan yang ditulis mantan presiden RI Soeharto di buku kenangan "Dasawarsa Kampus Baru UI Depok". Kecuali, jika itu hanya basa-basi seorang Presiden.

Pesan tersebut tertulis dengan judul "Teladan". Isinya, *"Universitas Indonesia adalah universitas tertua di Indonesia. Wajar bila ia dituntut keteladanannya terhadap universitas lainnya, terutama dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan dukungan kampus baru yang indah dan megah, terpadu dengan asas kepemimpinan: "Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya bangun karsa, Tut wuri handayani" keteladanan itu akan terwujud"* (Soeharto, 5-9-1987). Indah, berisi dan penuh harapan.

Kalaupun ternyata benar bahwa pindahnya UI ke Depok adalah rekayasa, lalu apakah juga berlaku terhadap kampus-kampus perguruan tinggi lain di Indonesia? Agaknya bisa begitu, seperti diakui oleh Rektor UGM Prof. Ichlasul Amal dalam Majalah Forum, UGM kini menjadi pusat gerakan karena letaknya yang strategis, mudah dijangkau. Berbeda dengan kampuskampus lain yang berada dipinggiran menjadi kurang strategis.

Dr. Sjafri Sairin,M.A., Ketua Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial (PPKPS) UGM ketika ditemui di kantornya berpendapat bahwa pemindahan kampus ke daerah pinggiran kota hanya masalah teknis belaka, termasuk UI. "*Nonsens*, kalau dikatakan bahwa pemindahan kampus adalah trik rezim Orde Baru. Dalam era informasi ini, sebenarnya tidak ada kampus yang terpinggirkan. Seperti UI kampus Depok merasa terpinggirkan karena daerah itu belum berkembang. UGM dulu juga pinggiran, tapi lihat sekarang, UGM jadi pusat kota," ucapnya kepada *Balairung*.

Sependapat dengan Dr. Syafri Sairin M.A,. Ki Dr. Supriyoko, pakar pendidikan Taman Siswa Yogyakarta memandang bahwa fenomena pemindahan kampus, dalam pengertian fisik, merupakan kecenderungan yang positif.

"Pemindahan kampus adalah masalah kekuatan ekonomi dan bukan bersifat politis," ujarnya.

Selain dua tokoh di atas, Musdariyono Msc. Purek II ITS juga mempunyai pandangan yang tak jauh berbeda. Artinya, masalah pemindahan kampus hanya masalah teknis belaka, yaitu agar kampus dapat dikembangkan menjadi lebih luas, besar dan nyaman. Dan jelas, harus sesuai dengan visi dan cita-cita universitas tersebut.

Menghadapi masalah ini Purek II ITS mengharapkan supaya semua pihak berpikir positif. "Kita tidak berpikir memecah belah. Sekarang yang menjadi sasaran perguruan tinggi adalah bagaimana mempersiapkan perguruan tinggi menghadapi tahun 2000 dengan visi yang jelas, kualitatif maupun kuantitatif. Jadi sebetulnya *ndak mindah*, tapi membangun di tempat lain dengan satu sistem manajemen," tegas nya.

Masih tentang benar tidaknya andil rejim Orde Baru merekayasa pemindahan kampus. Ketua Senat

Cerita dari Kampus "Warisan" Soeharto



Wisuda Unwama

H.Probosutedjo didampingi Rektor Unwama

Siang yang panas, terdengar adzan mengalun dari corong masjid yang tampaknya belum selesai dibangun. Di sudut lain, segerombol mahasiswa tampak sibuk dengan urusan masing-masing, tak terusik oleh suara adzan yang menyapu gedung-gedung megah dan areal persawahan disekitarnya. Sementara beberapa orang tampak mulai bergerak ke masjid.

Itulah sekelumit suasana kampus UWM (Universitas Wangsa Manggala), yang terletak dipinggiran kota Yogyakarta. Menarik lagi, kampus yang dilingkupi areal persawahan ini adalah salah satu peninggalan Soeharto. Berlokasi di desa tanah kelahirannya, Argomulyo, kecamatan Sedayu, Bantul.

Lokasi UWM yang terletak di Jalan Wates KM 10, jauh dari gelegar keramaian kota. Kondisi ini menuntut penyesuaian dan adaptasi tersendiri bagi yang terbiasa hidup di kota.

Dulu, masyarakat desa yang terbiasa tenang, dengan nilai-nilai pedesaan yang ketat sempat mengeluh. Bahkan mengatakan tentang lokasi mahasiswa yang terlalu ramai. Tapi itu dulu. Sekarang, mereka mulai menerima dinamika kampus. Apalagi secara ekonomis masyarakat desa.mereka terbantu. Hampir tiap rumah ada kos-kosan, belum lagi sarana penunjang seperti warung makan, rental komputer dan pernik-pernik sarana kebutuhan mahasiswa. Dapat dibayangkan berapa besar uang yang berputar.

Bu Min, yang berjualan nasi soto dekat kampus, menyampaikan rasa terimakasihnya. Ia mengakui bahwa berdirinya universitas dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Senada dengan hal itu, satpam UWM bertutur:" Orang-orang asli memang diberi prioritas untuk kerja disini, " ujar Suharno, penduduk asli yang sudah enam bulan menjadi satpam.

Meski begitu, bukan berarti semua merasa *sreg* dengan 'keterpencilan' kampus ini. Gerakan mahasiswa di

Mahasiswa ITS, Ja'far Amiruddin, menyatakan pemindahan kampus merupakan niatan murni pihak kampus. "Kalaupun ada andil Orde Baru (NKK/BKK), saya rasa bukan suatu kesenggajaan. Sebab belajar kan butuh tempat yang tenang?" jelas mahasiswa asal Jombang ini.

Tapi benarkah pemindahan kampus hanya masalah teknis *an sich,* seperti yang diungkap di atas. Tampaknya terlalu dini untuk menyebut demikian.

Sebab, kalaupun pemindahan kampus hanya masalah teknis belaka, karena sempitnya lahan di kota. Mengapa kemudian hanya lahan kampus yang dikorbankan? Sementara untuk membangun gedung bertingkat selalu bisa diatur secara super efektif dan efisien dengan lahan yang terbatas sekalipun.

Tanggapan berbeda datang dari pakar politik UGM, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., yang tampak lebih jernih dan arif. Ketika ditemui *Balairung* pakar politik sekaligus rektor UGM ini , menandaskan bahwa sebagian memang masalah teknis, terutama kasus pemindahan UI. Tapi, sebagian lain banyak dilatarbelakangi impian



Prof. Dr. Ichlasul Amal

Tapi, sebagian lain banyak dilatarbelakangi impian pihak kampus untuk membuat sebuah universitas yang besar...

pihak kampus untuk membuat sebuah universitas yang besar, khususnya di daerah luar Jawa.

Hal senada juga diungkapkan Afifi, Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII Yogyakarta. " Latar belakang pemindahan kampus itu ada dua, latar belakang teknis dan non teknis. Kita lihat konteksnya terlebih dahulu," jelasnya.

Berbicara mengenai pemindahan kampus ke daerah pinggiran kota tidak akan lepas dari alasan mengapa harus pindah. Dari sumber-sumber *Balairung*, secara umum ada dua alasan utama yang sebenarnya saling berkaitan. *Pertama,* karena sempitnya lahan kampus yang ada di kota, sehingga terpaksa mencari lahan lain yang lebih luas, strategis dan lebih murah. Dan biasanya terdapat di daerah pinggiran kota.

Kedua, alasan pengembangan kampus sesuai dengan cita-cita dan visi perguruan tinggi tersebut.

Akibat yang jelas, kepindahan kampus-kampus ke daerah pinggiran kota, membawa pengaruh yang tidak kecil dan tidak hanya dirasakan mahasiswa, dosen dan karyawan kampus, tapi masyarakat secara umum.

"Ada dua dampak yaitu positif dan negatif ", kata Ki Dr. Supriyoko. Dampak positif antara lain dari segi ekonomi. Pindahnya kampus ke pinggiran kota (desa) sedikit banyak

kampus contohnya, terkena kondisi yang tidak mengenakkan. Salah seorang aktivis bercerita, bahwa untuk menggelar acara seminar saja, cukup merepotkan. Pembicara, kadang malas harus jauh-jauh datang ke lokasi, demikian juga peserta dari Perguruan Tinggi lain. Karenanya, ia membenarkan indikasi usaha rejim Orba untuk meminggirkan kampus. Agar aksi-aksi di kampus terlokalisir, dan tetap "bonsai".

Soeharto, loyalitas

Mengenai nama Soeharto yang terpampang pada kepengurusan yayasan, memang membawa dampak tersendiri. Ir. Munasir, humas UWM mengatakan bahwa nama itu hanyalah sekedar *'mantebake'*. Tetapi secara riil Soeharto tidak pernah terlibat di dalamnya. Ketika ditanyakan tentang nama Soeharto pada beberapa mahasiswa, rata-rata mereka tidak ambil peduli dengan hal tersebut.

"Memang dulu ada sedikit rasa bangga, bahwa yayasan ini ada nama orang-orang *gedean*" ujar Adi, mahasiswa TP '93.

Sedangkan Irma, mahasiswi ekonomi '94 mengeluh, karena nama Soeharto ini. Ia khawatir akan menurunnya jumlah pendaftar baru, tiba tiba juga muncul. Namun Pak Munasir, Humas UWM tetap optimis. Karena UWM tidak ada kaitan secara politis dengan rejim yang runtuh, dan selama ini universitas independen.

Aksi-aksi mahasiswa di 'kampus hijau' ini pun, menyimpan cerita menarik. Misalnya, ada gurauan dari aktivis-aktivis lain, bahwa aksi mereka sering terpancung. Maksudnya, jangankan sampai ke DPRD yang jaraknya puluhan kilometer, baru sampai jalan besar saja sudah kecapaian dan dipotong aparat. Kejadian unik lagi, adalah tanggapan warga desa Argomulyo. Warga desa, bukan mendukung mahasiswa, malah mengintimidasi peserta aksi terutama aktivisnya.

Nama para aktivis tersebut diumumkan lewat corong-corong masjid desa, serta masuk catatan *black list* kelurahan. Mahasiswa-mahasiswa ini dianggap sebagai orang yang harus dicurigai. Mungkin karena, pemimpin Orde Baru itu lahir dan dibesarkan. Maka tak heran loyalitas warga desa terhadap Soeharto begitu besar. Walaupun rakyat di tempat lain sudah mulai menuntut perubahan.

Masih menurut keterangan Humas UWM, itu mungkin saja terjadi. Selain karena merasa mempunyai hubungan erat dengan Soeharto, loyalitas yang tinggi ini juga karena mereka sering mendapat bantuan dari keluarga Soeharto, termasuk Probosoetedjo. Selain itu, Kepala Desa Argomulyo adalah adik Soeharto, hingga mereka sampai melakukan intimidasi dan tindakan represif terhadap mahasiswa.❒

Shohifullah

akan meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah pinggiran. Kondisi ini dapat dilihat pada masyarakat desa di sekitar kampus Universitas Wangsa Manggala (UNWAMA) Yogyakarta, terletak 10 KM dari pusat kota Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Jl. Kaliurang km 14,4 ataupun masyarakat di sekitar ITS Surabaya. Bahkan di sekitar kampus Tlogo Mas Universitas Muhamadiyah Malang, harga tanahnya tiba-tiba melonjak hingga 4-5 kali lipat dari harga semula.

Dari segi pendidikan, kepindahan ini dapat meningkatkan wawasan serta daya kritis masyarakat desa. Lain daripada itu, pindahnya kampus ke daerah pinggiran kota, secara tidak langsung membawa mahasiswa kepada suasana yang masih tenang, nyaman dan jauh dari keramaian dengan fasilitas yang lebih baik dan lengkap.

Sebagai contoh kampus UII di Jl. Kaliurang km 14.4, meski harga kos-kosan di daerah ini relatif mahal, tapi suasananya sejuk, nyaman dan tenang. Di kampus UII Kaliurang juga disediakan mobil kampus yang siap melayani mahasiswa disekitar kampus.

Sedangkan sisi negatifnya, masih menurut Ki Dr. Supriyoko, dapat melonggarkan nilai-nilai masyarakat desa. Sebab, mahasiswa membawa pengaruh nilai-nilai kota pada masyarakat desa. "Hal ini hanya terjadi kalau mahasiswa tidak cocok dengan lingkungannya," jelasnya.

Sebaliknya bagi mahasiswa akibat yang paling dikhawatirkan adalah peran sosial-politiknya akan tereduksi. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi, sebab lokasi kampus yang jauh dari pusat kekuasaan melemahkan tekanan politik gerakan mahasiswa.

" Maka dari itu ", ujar Afifi, " Kita jangan terjebak pada masalah letak kampus. Sekarang, bagaimana kita dapat memerankan peran mahasiswa kita dengan baik, ini adalah tantangan". Senada dengan hal tersebut diungkapkan Dr. Damardjati Supadjar. "Kampus yang ideal memang di bawah kaki gunung, tetapi walaupun di tepi tidak berarti tidak mempengaruhi yang di hilir, karena itu di tepi tapi tetap jernih," katanya berfilsafat.

Adapun Ki Supriyoko, melihat peran mahasiswa dapat dibedakan antara peran akademis dan peran sosial. " Peran akademisnya mungkin tidak terpengaruh. Yang mungkin agak terpengaruh adalah peran sosial mereka, karena lingkupnya menjadi berbeda. Tapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan, karena mereka pasti bisa membina lingkungan sosial baru. " tandas beliau.

"Mahasiswa yang hanya bisa berteriak-teriak saja, itu bukan mahasiswa," tambah Dr. Syafri Sairin tentang peran mahasiswa.

> **...bagi mahasiswa akibat yang paling dikhawatirkan adalah peran sosial-politiknya akan tereduksi.**

Pemindahan kampus ke daerah pinggiran juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi mahasiswa. Diantaranya, masalah kesulitan transportasi, hiburan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan kuliah, seperti buku bacaan. Frekuensi kedatangan dosen juga kadang menjadi masalah."Kita kalau tidak perlu *banget* tidak akan pergi ke Yogya," ujar Ike dan Widi, dua mahasiswi UNWAMA yang tinggal di Delta Kost.

Namun hidup di kampus pinggiran kota tidak berarti sengsara. Seperti yang diungkapkan mahasiswi-mahasiswi UII Kaliurang yang indekost di Bungunsari 42, "Kayaknya nggak ada masalah, turun ya turun, main ya main. Memang sih pertama kalinya agak terpinggirkan, tapi lama kelamaan tidak jadi masalah," ucap mereka.

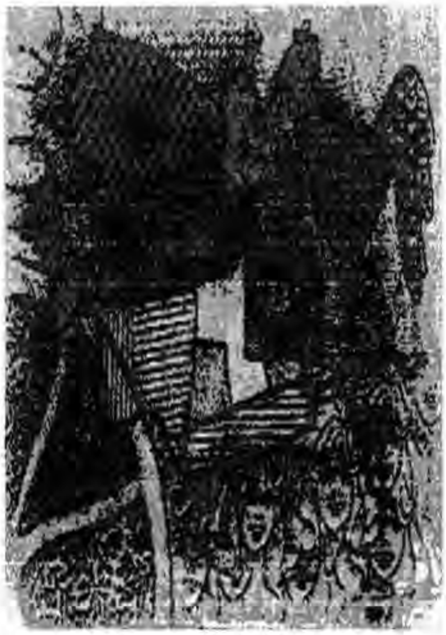
Benar tidaknya anggapan bahwa pemindahan kampus ke daerah pinggiran kota sebagai usaha rezim Orde Baru untuk meminggirkan peran mahasiswa memang belum ada pembuktian secara jelas dengan data yang valid.

Pemindahan kampus yang lebih ditekankan karena alasan teknis memang logis. Tapi, mahasiswa kemudian hanya berpangku tangan. Peran sosial politik mahasiswa tetap bisa berfungsi bahkan menjadi tantangan. Tinggal keputusan mahasiswa sendiri. Apakah melupakan fungsinya atau konsisten menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan.❐

Luqman Hakim A.
Dedy Sushandoyo, Shohifullah, Rhiska P. Irawan

Staple Food

Lapar. Sebuah kata ini masih turut menyeruak dalam perang wacana reformasi. Sebagai bentuk ketidakpuasan kondisi sosial politik dan ekonomi yang menerpa negeri ini, lapar menjelma menjadi tuntutan perlunya reformasi total di seluruh bidang kehidupan. Lapar pulalah yang menjadi sebab timbulnya tindakan anarkis berupa perusakan dan penjarahan. Peristiwa ini pun tidak bisa disalahkan, karena lapar adalah kondisi riil yang terjadi pada masyarakat Indonesia.



NO FOOD-NO MOOD, FIFI,JR

Setelah sukses menjadi akselerator pemicu turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan lewat keampuhannya membangkitkan berbagai bentuk perlawanan rakyat yang diterpa krisis, kini lapar terus bergerak dalam wujudnya yang asli, kekurangan pangan. Belum lama berselang dalam pemberitaan media massa, Indonesia dikabarkan mengalami kerawanan pangan. Sekitar 40 juta penduduk Indonesia terancam kelaparan yang cukup parah, stok beras sudah tidak lagi mencukupi.

Ironis sekali bila mengingat kejadian di Roma tiga belas tahun silam. Kala itu, tahun 1985 , di puncak acara peringatan 40 tahun FAO Indonesia berdiri membusungkan dada dengan prestasi swasembada pangan. Bukan hanya Presiden Soeharto saja saat itu yang menjadi saksi dan simbol keberhasilan, tetapi juga 33 petani Indonesia turut berbagi kebanggaan. Bahkan lebih hebat lagi, secara simbolis mereka menyumbangkan 70.000 ton beras untuk masyarakat Afrika yang kekurangan pangan. Semenjak itulah beras menjadi primadona *staple food,* komoditas pangan utama rakyat Indonesia.

Sebenarnya persoalan pangan sudah menjadi penyakit akut yang harus dibenahi sejak dulu. Setelah swasembada beras tahun 1984, ekspor impor netto beras masih bertahan surplus hingga tahun 1993. Namun setelah itu, tahun 1994, terjadi defisit neraca ekspor impor netto beras sebesar 400.048 ton (data HKTI). Gangguan iklim dan hama menyebabkan produksi terus menurun dan memaksa peningkatan impor beras. Kondisi ini terus bertahan dan mencapai puncaknya sekarang yang disebut-sebut sebagai masa pengadaan pangan terburuk selama 20 tahun. Seperti diakui Kabulog, Beddu Amang dalam dengar pendapat dengan DPR di Jakarta 2 Juli 1998. Akibatnya direncanakan impor beras sebanyak 3,1 juta ton pada tahun ini. Angka ini merupakan rekor impor beras tertinggi selama sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya angka tertinggi terjadi sebelum swasembada beras yakni tahun 1980 sebanyak 2,01 juta ton.

Kebijakan yang diambil pemerintah menjadi masalah krusial terpuruknya produksi pangan nasional. Setelah semakin terpinggirkannya masalah pertanian digantikan dengan kebijakan *hard industrialization* dan *catching up industrialization,* penanganan yang dilakukan pun terkesan asal-asalan dan tidak terarah. Selama ini kebijakan untuk tetap mempertahankan swasembada beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Metode ini akhirnya mencapai klimaks. Pelaksanaan intensifikasi sebetulnya masih mempunyai keleluasaan untuk terus berkembang. Namun karena tidak ada kesungguhan dalam pengembangan teknik budidaya, pengadaan infrastuktur teknis, inovasi teknologi, dan sosialisasinya di tingkat petani maka produksi beras tetap jalan di tempat atau malah mundur ke belakang.

Ekstensifikasi pun mengalami nasib serupa. Program yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan produksi akhirnya terbentur pada bumerang kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri. Pulau Jawa yang selama ini dikenal paling subur dan merupakan lumbung penghasil beras nasional, jelas tidak memungkinkan bagi pelaksanaan ekstensifikasi. Mencari dan meluaskan lahan sudah teramat sulit dilakukan. Daerah-daerah yang semula lahan hijau persawahan telah berubah menjadi bangunan-bangunan industri, perumahan dan jalan-jalan besar. Maka sangat mudah ditebak, program ekstensifikasi akhirnya dialihkan ke luar Pulau Jawa.

Sejak duduk di Sekolah Dasar, kita selalu diajari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang subur, kaya, makmur dan memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Pulau Jawa dan Sumatera merupakan penghasil padi, Maluku dan Nusa Tenggara adalah produsen sagu, orang Madura menggemari jagung sebagai makanan utama mereka, dan orang Irian sudah cukup puas dengan mengkonsumsi ubi jalar, tanaman budidaya mereka. Atau kalau berbicara tentang pengolahan hasil, kita dikenalkan juga pada tiwul, gaplek makanan khas Jawa Tengah, atau Nasi Kaukau *(Kaukau Rice)* hasil olahan orang Irian yang berasal dari ubi jalar.❐

Irfan Muktiono
Pemimpin Umum

KONTESTASI ANTARA MASSA DAN NEGARA :

MASSA TANPA PEMIMPIN



Drs. Aris Arif Mundayat, MA.
Staf peneliti PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta

Pada saat rejim Soeharto masih berkuasa, kisah sukses pemerintah Orde Baru dinarasikan melalui ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedemikian pesat dari tahun 1980-an sampai sebelum tahun 1996 (yang pada saat itu mencapai 8,6 %). Untuk mendukung keampuhan akan adanya pertumbuhan tersebut, disuarakan bahwa pendapatan perkapita pertahun pun menunjukkan peningkatan yang berarti, yaitu pada tahun 1980-an berkisar pada angka 500-an dollar AS dan pada tahun1996 berkisar di angka 900-an dollar AS pertahun.

Di luar, pernyataan itu direspon secara lain oleh masyarakat di tingkat *grass root* baik dari kelas akademik yang kritis maupun buruh, bahkan petani. Bagi mereka, pidato tersebut ketika beredar di masyarakat melalui mediasi televisi, radio dan surat kabar dimentahkan begitu saja oleh mereka. Masyarakat menganggap itu (dan belakangan dibuktikan benar) sebagai dongeng kosong mengenai pertumbuhan ekonomi, karena secara nyata merekalah yang menghadapi krisis moneter.



LOST IN THE DARK, FIFI, SR

Tampak jelas bahwa usaha kontestasi pemaknaan antara dua lapisan masyarakat pada saat ini telah mencapai titik didih, sehingga pada tingkat yang paling nyata telah meruntuhkan mitos pembangunan secara umum. Hal itu bisa diindikasikan dari sejumlah pernyataan yang mengungkapkan pertanyaan seperti "Bagaimana bisa para pejabat itu menyuarakan bahwa pembangunan kita sukses, sementara kita semua menderita secara ekonomi?" Ada pula yang mengatakan, "Bagaimana bisa mengatakan cinta rupiah, sementara kita tidak pernah melihat mata uang lain? Bahkan ada pula yang menyuarakan betapa romantisnya Koes Plus dahulu menyanyikan lagu, *"... bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu,....tongkat kayu dan batu jadi tanaman....."*. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ternyata kedelai pun impor dari negara tetangga. Sinisme yang kuat tersebut secara ekspresif telah mendekonstruksikan pemahaman mengenai pertumbuhan selama ini.

Negara dan kapitalisme

Selama pemerintahan Orde Baru, rejim telah mampu menyedot dana dari luar kawasan Asia. Konsekuensi logis tarikan dana tersebut, adalah mau tidak mau masyarakat Indonesia telah dibawa pada sistem ekonomi global yang lebih merupakan representasi ekspansi kapitalisme global yang bertumpu pada pasar bebas dan terlibat sejumlah hutang. Dalam kasus Indonesia tampak jelas bahwa suasana ekonomi politik yang hadir didalam sistim ekonomi yang seperti itu secara nyata lebih dimotori oleh peranan negara yang sangat sentral ketimbang peran serta aktor ekonomi domestik. Secara teoritis, bergeraknya sistem ekonomi-politik seperti itu lebih mendekati model yang disebut sebagai *state capitalism,* yang sesungguhnya banyak dipraktekkan oleh negara-negar sosialis-komunis seperti Cina, Uni Sovyet, Eropa Timur dan Kuba.

Di dalam kontestasi yang digambarkan pada awal tulisan ini, terasa bahwa ada sebuah kondisi yang merefleksikan terjadinya perebutan pendefinisian realitas bernegara. Bagaimanapun juga, kontestasi itu sangat ditentukan oleh kehegemonian kapitalisme dan negara itu sendiri. Artinya, kapitalisme mutakhir sekarang ini secara "*subtle*" dan canggih mampu menempatkan demokrasi sebagai salah satu fantasi dari lapisan akademik yang sesungguhnya telah terkooptasi olehnya. Di lain pihak, negara dengan model *state capitalism*-nya juga ikut menerobos sistem fantasi lapisan yang sama melalui teror-teror yang terus dikembangkan bersama dengan dominasi yang hegemonik sifatnya.

Jika kita bandingkan pada awal pertumbuhan kapitalisme di Eropa, -seperti yang pernah diargumentasikan oleh Marx dan Weber- ditandai oleh munculnya sistem kepercayaan sekuler yang menggeser peran agama (kendati tidak seluruhnya). Sistem kepercayaan itu kemudian disebut sebagai awal dari terbentuknya sebuah ideologi yang berkembang ditingkat masyarakat. Pada tingkat yang nyata pertumbuhan kapitalisme di Indonesia -seperti halnya kapitalisme yang tumbuh di Eropa pada masa lampau- telah membawa transformasi sosial yang mendasar. Penetrasi kapitalisme perkebunan yang diperkenalkan oleh kolonialisme Belanda secara nyata telah menjadi "batu pertama" dari munculnya gerakan ideologis -yang beranak cucu partai- yang kemudian memunculkan semangat nasionalisme yang sempat bertahan sampai masa akhir pemerintahan Soekarno. Pada masa ini pula, gagasan tentang kata *nasionalisme* dan *revolusi* yang dikumandangkan oleh Soekarno runtuh begitu saja. Secara sederhana hal itu juga bisa dikatakan sebagai akibat dari ekspansi kapitalisme global yang telah menyebabkan pemerintah Indonesia masa itu harus menghadapi krisis moneter.

Pada titik inilah posisi negara menjadi menguat, terutama sekali karena proses manipulasi simbolik yang dilakukan negara dalam banyak hal berkesesuaian dengan kultur lokal.

Di Indonesia, munculnya ideologi sebagai implikasi logis pertumbuhan kapitalisme modern pasca nasionalisme telah diantisipasi oleh negara dengan melakukan penyebaran sekaligus reproduksi ideologi negara melalui ritual yang diselenggarakan oleh organ-organ korporatisnya -terutama kekuatan ideologi militer yang secara ideologis lebih dominan ketimbang ideologi masyarakat sipil. Pada titik inilah posisi negara menjadi menguat, terutama sekali karena proses manipulasi simbolik yang dilakukan negara dalam banyak hal berkesesuaian dengan kultur lokal. Selain itu, juga disertai menguatnya kekuatan militer baik secara ekonomi (sebagai pelaku ekonomi) maupun politik (sebagai pelaku politik).

Kombinasi tersebut telah melahirkan sejumlah manuver negara dalam mengintensifkan reproduksi ideologi negara di tingkat sosial. Pada dasarnya, manuver-manuver tersebut telah meletakkan basis yang cukup luas dan memitos, yang secara kultural mempersempit ruang-ruang yang memungkinkan munculnya ideologi ysng lebih berbasis pada rakyat. Kalaupun pengentalan ideologi yang cukup oposisional itu terjadi, bisa dipastikan hampir selalu dipersempit lokasinya dan bahkan dimarjinalkan. Fenomena pemberontakan "ibu" seperti yang dilakukan oleh PDI merupakan contoh yang baik untuk kasus itu, yang kemudian menyeret PRD dan gerakan mahasiswa lainnya untuk dimarjinalkan.

Dalam konteks yang seperti itu, sesungguhnya negara telah menjadi sosok politik yang konservatif sehingga tertutup dari kemungkinan-kemungkinan ke arah perubahan yang lebih berorientasi ke rakyat. Pada situasi yang seperti ini negara telah menghasilkan sejumlah lapisan masyarakat yang menyebabkan mereka menjadi sangat tergantung pada negara yang mereka anggap sakti. Lapisan ini pula, yang mereproduksi anggapan bahwa negara memiliki kekuatan lebih yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apapun, dan kemudian mereka mendominasi berbagai ruang publik bersama kapitalisme yang berkembang di negeri ini. Di lain pihak, rakyat kehilangan bagian yang paling penting untuk menguatkan posisi rakyat dalam berhadapan dan bernegosiasi dengan negara, yaitu pemimpim.

Lapisan Akademik Dan Buruh : Sebuah Keterpisahan?

Didalam ruang publik yang telah didominasi oleh negara -yang mengakomodir kekuatan kultural- dan kapitalisme telah melahirkan sebuah proses pemisahan yang kuat antara lapisan akademik dan buruh. Dalam hal ini, lapisan akademik memiliki kehidupannya sendiri yang sama sekali lain dan berbeda dengan masyarakat di tingkat *grass root* (dalam hal ini buruh). Pada titik ini, mereka benar-benar telah terpisah secara sosiologis, mereka hidup dalam dunia mereka sendiri-sendiri secara *encapsulated.* Benar, bahwa mereka hidup di dalam alam dan bahasa yang sama, namun masing-masing mengembangkan dunia mereka sendiri yang hampir tak pernah bersentuhan. Benar, pula bahwa ada upaya sentuhan-sentuhan lapisan akademik (baik itu LSM, mahasiswa, akademisi dan lainnya) ke tingkat *grass root* namun sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi bagian dari *grass root* itu sendiri.

Situasi inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara *state capitalism,* karena di banyak negara tersebut masyarakat akademik seringkali juga buruh. Mereka adalah buruh terdidik yang benar-benar memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, banyak diantara mereka yang menjadi tokoh, ketimbang menjadi lapisan yang bergantung pada inisiatif lapisan lainnya. Di Indonesia, banyak lapisan akademik yang berupaya mengkondisikan lapisan buruh untuk memiliki kesadaran ideologis yang kuat, namun dalam prakteknya lebih menjadikan lapisan buruh tergantung pada mereka. Sehingga, tidak melahirkan pemimpin dari kalangan mereka sendiri, seperti yang biasa terjadi di Eropa. Hal ini banyak ditentukan oleh adanya hasrat yang kuat dari lapisan akademik untuk menjadi patron para buruh. Karena mereka terkapsulasi dalam dunianya sendiri dan telah terjerat oleh hegemoni sistim kapitalisme mutakhir. Dan, negara yang banyak memberi godaan itu.

Akhir kata, keterpisahan mereka telah bersifat kronis, sehingga diperlukan upaya-upaya yang benar-benar mampu menyatukan mereka menjadi sebuah kekuatan solid dan memunculkan seorang pemimpin alternatif yang dipercaya oleh semua lapisan masyarakat. Inilah tantangan yang kita hadapi dalam menyiasati sistimatisnya pemerintah Orde Baru dalam meniadakan kemungkinan muncul pemimpin alternatif.❑

Penanganan Energi Alternatif Indonesia

"ENERGI ALTERNATIF": SEBUAH TUNTUTAN MASA DEPAN

Dapat dipastikan ketersediaan sumber energi tak akan lama lagi. Upaya mencari sumber energi alternatif di Indonesia sudah dilakukan. Namun sayang usaha itu ternyata masuk dalam permasalahan yang tidak sepele. Belum ada follow up yang kongkrit diambil oleh para penentu kebijakan.

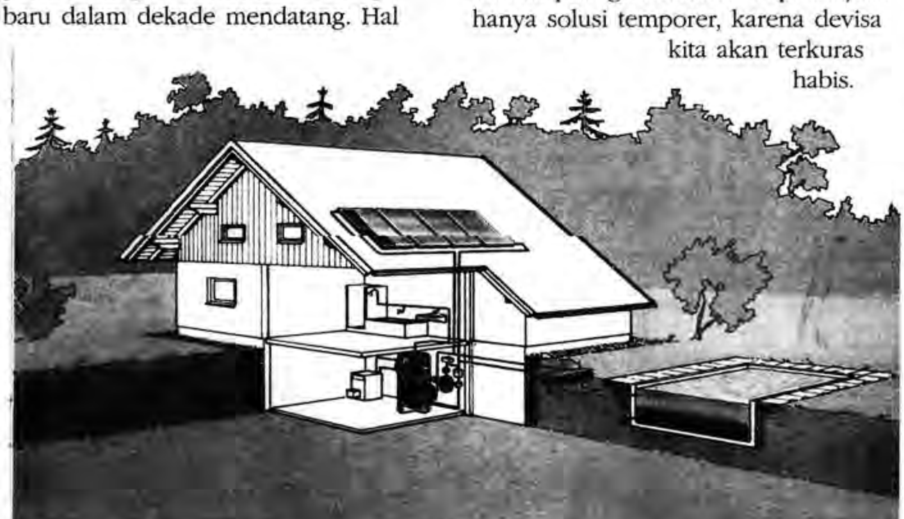
Dengan asumsi PDB 4,5 % pertahun, cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 8.982 milyar barel (1 Januari 1996) diperkirakan akan habis pada periode 1997-1998 -untuk konsumsi dengan skenario tinggi- dan dapat dipertahankan dengan skenario rendah hingga periode 2003-2007.

Produksi minyak bumi kita tiap tahunnya memang naik sebesar 8%, tetapi kebutuhan konsumsi termasuk impor naik sebesar 12-15%. Bahkan berdasarkan data terakhir yang di himpun *Balairung* saat ini kita bukan pengekspor minyak lagi. Indonesia telah mengimpor minyak 300 ribu barel perhari

Kebutuhan energi listrik pulau Jawa mulai tahun 2015 mencapai 27.000 MW per tahun. Sementara dengan memaksimalkan semua struktur yang ada yaitu eksploitasi energi air, panas bumi, gas alam, dan batubara, hanya tersediakan 20.000 MW sehingga perlu dibangun infrastruktur energi baru dalam dekade mendatang. Hal ini diperkuat dengan kenyataan 80% energi disuplai dari luar pulau Jawa. Sementara tingkat konsumsi di pulau Jawa mencapai 80% dari produksi kumulatif.

Enam puluh tiga persen energi listrik Indonesia dihasilkan dari sumber energi fosil, yaitu minyak bumi dan batubara. Indonesia hanya memiliki cadangan fosil minyak bumi 1%, gas alam 1-2%, dan batubara 3.1% dari persediaan dunia (Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi). Sementara itu dari 36 milyar ton cadangan batubara Indonesia, hanya 5 milyar ton di antaranya yang sudah terdefinitif, sedangkan sisanya masih bersifat terduga.

Beberapa solusi masalah krisis energi dimunculkan oleh para pakar yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com, dosen FE UGM, solusi terbaik adalah dengan mengimpor energi dari luar negeri karena paling ekonomis. Tapi ini jelas hanya solusi temporer, karena devisa kita akan terkuras habis.



ISTIMEWA

Sebuah model pembangkitan tenaga listrik tenaga Surya

Posisi kita juga akan sulit karena bergantung pada negara lain yang mengakibatkan kita tidak memiliki daya tawar dan akan didikte.

Dengan kondisi semacam itu kelangsungan suplai energi untuk jangka waktu yang tidak terbatas harus dari sumber energi alternatif yang sifatnya terbarui dengan kapasitas minimal konstan, serta ramah lingkungan. Keuntungan lainnya *power plant*-nya tidak membutuhkan lahan yang luas dan tidak mengeliminir lahan yang produktif.

Sumber-sumber yang berpotensi di antaranya adalah energi matahari, gelombang laut, OTEC, dan lain-lain, yang seharusnya sudah mulai diaplikasikan.

Penanganan yang kurang serius

KUBE (Kebijakan Umum Bidang Energi) sebenarnya telah menekankan tentang pengurangan peranan minyak bumi dengan peningkatan pencarian sumber energi penggantinya. Tetapi dalam prakteknya pemerintah kurang merespon masalah ini. Hal ini tampak dari alokasi dana APBN yang kecil untuk bidang Iptek. Kecilnya alokasi dana untuk pengembangkan iptek umumnya dan infrastruktur energi alternatif khususnya, disebabkan oleh banyaknya dana yang dialokasikan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat baik sandang, pangan, maupun perumahan. "Pemerintah saat ini tidak punya dana untuk penelitian", ungkap Profesor Sukanto, yang mantan rektor UGM ini..

Namun pendapat itu disanggah oleh DR. Singgih, staf ahli PSE.

"Duitnya itu ada cuma letaknya yang tidak diketahui". Kenyataannya memang banyak dana yang bisa dipakai untuk pengembangan energi alternatif, teralokasikan ke pos-pos tertentu yang justru belum krusial dan tidak efisien. Contohnya adalah IPTN yang merupakan proyek ambisius yang banyak menyedot modal tetapi tidak menghasilkan, karena sulit bersaing di pasaran.

Adanya krisis moneter seakan-akan turut menjadikan masalah ketersediaan energi menjadi terlupakan. *Collaps*-nya industri di Indonesia -yang merupakan pengkonsumsi energi yang besar- menyebabkan kebutuhan energi saat ini turun. "Masalah krisis ekonomi adalah *short term problem*, masalah energi adalah *long term problem* karena orang selama hidup butuh energi", ungkap Ir. Yudi Utomo Imardjoko, MSc., PhD, kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM.

Selama pemerintahan Orde Baru seringkali nampak fenomena ketidakpercayaan kepada para akademisi yang mencoba mengkritisi masalah teknologi pada umumnya. Padahal seperti diungkapkan dosen jurusan teknik nuklir ini "Seorang akademisi khususnya *engineer* bertugas untuk meneliti dan memberikan pandangannya yang obyektif tentang kekurangan dan kelebihan suatu produk teknologi". Lebih lanjut ditekankan bahwa sebenarnya sumber daya manusia kita cukup mampu, hanya saja kesempatannya belum ada.

Dr. Singgih juga menjelaskan, tuntutan terbesar kepada pemerintah bukanlah berupa pembangunan infrastruktur energi alternatif secara fisik, tetapi lebih ditekankan pada pembentukan kondisi yang mendorong pengembangan energi alternatif.

Bila hanya dilihat dari segi ekonomi pengembangan energi alternatif sulit dilakukan karena memerlukan investasi yang besar. Karena pertimbangan ekonomis inil pula pihak swasta tidak begitu tertarik terhadap pengembangan energi alternatif.

Selain itu, tingginya *cost production* mengakibatkan harga jual listrik dari sumber energi alternatif lebih mahal dibanding sumber energi fosil. Dengan harga jual yang mahal energi listrik yang berasal dari sumber energi alternatif sulit bersaing di pasaran, sehingga perlu waktu lama untuk kembali modal, apalagi meraih untung.

Masih menurur Dr. Singgih "Kita dapat menerapkan kebijakan pemerintah Jerman yang menetapkan semua daya listrik yang dihasilkan swasta dari sumber alternatif wajib dibeli oleh perusahaan listrik daerah terdekat, sehingga pihak swasta tidak kesulitan memasarkannya".



Ir. Yudi Utomo I, M.Sc., Ph.D.
Kepala PSE UGM

Tetapi untuk energi listrik yang dihasilkan dari sumber fosil tetap dijual bebas oleh pihak swasta sehingga terjadi persaingan yang sehat antar penghasil energi yang mengakibatkan harga ditentukan oleh pasar. Di Indonesia justru terjadi sebaliknya. PLN memonopoli listrik sehingga masyarakat mau tidak mau membayar tarif listrik yang ditetapkan PLN.

Memang dalam hal pengelolaan energi alternatif khususnya, pemerintah kurang transparan, sehingga masyarakat buta terhadap

Beberapa Alternatif Energi yang Potensial di Indonesia

Geotermal.

Posisi Kepulauan Nusantara yang berada pada dua sirkum gunung berapi yaitu Pasifik dan Mediterania menyebabkannya banyak memiliki gunung berapi. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang potensial.

Menurut Dr. Joko Wintolo, Ketua Jurusan Geologi Fakultas Teknik UGM, potensi energi geotermal Indonesia diperkirakan antara 9000-12000 MW yang tersebar di Jawa, Bali, NTT, dan Flores, dengan sukses rasio pengeboran hampir 100%.

Prinsip dasar pemanfaatan energi geotermal adalah pemberian panas terhadap suplai air yang sudah diperhitungkan. Sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi, yang mampu menggerakkan turbin pembangkit energi listrik (generator).

Energi Matahari.

Proses untuk menghasilkan energi listrik dengan matahari dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, tenaga matahari yang diubah langsung menjadi tenaga listrik dengan alat *photovoltaic*. *Kedua*, panas matahari difokuskan untuk menguapkan air sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin pembangkit listrik.

Keuntungan energi matahari selain ramah lingkungan, proses produksinya tidak bising, karena hampir tidak ada elemen yang bergerak. Kendalanya investasi yang dibutuhkan mahal dan belum adanya teknologi penyimpanan energi dalam skala besar.

Tenaga angin.

Dengan estimasi dari mekanisme terjadinya angin berdasarkan intensitas penyinaran dan dihitung pada posisi 15 LU, maka dengan kecepatan 20 knot dapat dihasilkan energi 0,58 KWH/m^2.

Energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir sebagai pembangkit listrik. Namun kecepatan dan arah angin yang tidak tetap menyebabkan teknologi kincir angin membutuhkan kontrol yang cukup rumit.

Pantai Baron di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta memiliki kecepatan angin mencapai 8 m/s sangat potensial untuk dikembangkan. Serta dapat digunakan untuk menaikkan air tanah yang dapat mengatasi kekeringan. "Di daerah seperti Baron bisa menghasilkan 300 watt, cukup kuat

ISTIMEWA



Dr. Singgih
Staf ahli PSE

Tuntutan terbesar kepada pemerintah bukanlah berupa pembangunan infrastruktur energi alternatif secara fisik, tetapi lebih ditekankan pada pembentukan kondisi yang mendorong pengembangan energi alternatif.

potensi energi alternatif yang ada di Indonesia. Padahal jika sumber-sumber alternatif ini dikembangkan, selain untuk mengantisipasi masalah ketersediaan energi di masa datang, juga di masa sekarang dapat menambah suplai energi. terjadinya persaingan harga nantinya diharapkan dapat menurunkan harga energi.

Dengan adanya persaingan harga, masing-masing penyuplai energi termasuk Pertamina dan PLN harus memperbaiki kinerjanya yang selama ini tidak efisien. Kenyataanya selama ini inefisiensi dalam pengelolaan energi khususnya minyak sangat besar. Menurut Ir. Yudi biaya produksi minyak kita sebesar 2 dolar per barel, sementara di luar negeri hanya 1 dolar per barel. "Konsumsi kita 1,3 juta barel per hari, jadi bisa dilihat ketidakefisienan 1,3 juta dolar per hari", tambah beliau.

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur energi alternatif yang tidak harus besar-besaran dengan investasi tinggi tetapi cukup diarahkan pada pengembangan skala kecil di tiap-tiap daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lebih spesifik lagi Ir. Yudi mengusulkan agar koperasi berperan dalam hal ini. Aliran sungai misalnya, dapat digunakan untuk proyek pembangkit mikro-hidro berkapasitas kecil yang cukup untuk kebutuhan listrik sebuah desa, yang diusahakan untuk diolah oleh koperasi setempat. Selain untuk mengurangi pengangguran, juga untuk meningkatkan peran koperasi.

Ditambahkan olehnya , bahwa di Amerika banyak produk energi telah ditangani oleh koperasi, baik itu untuk kawasan tertentu seperti tenaga angin di negara bagian California, tenaga panas bumi, bahkan untuk negara bagian Iowa, kekurangan listriknya dipenuhi oleh suatu usaha koperasi negara tetangganya (lintas negara). Tentu saja ini sangat ironis mengingat Indonesia yang sejak merdeka telah meletakkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Sesuatu yang pasti akan terjadi, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi sumber daya alam minyak bumi Indonesia akan habis, sehingga kita patut untuk turut memikirkan dampak dari masalah itu, karena krisis energi akan sulit dibenahi hanya dengan suatu tatanan birokrasi atau sekelompok peraturan, tetapi harus ditopang dengan suatu bentuk keberanian untuk memutuskan, apakah kita cukup awas dengan potensi energi yang kita miliki, atau

untuk membuat Gunung Kidul terang benderang dan tidak kekeringan lagi", kata Ir. Yudi Utomo Imardjoko, M.Sc., Ph.D.

Tenaga Gelombang Laut dan Pasang Surut Air Laut

Panjang garis pantai di Indonesia yang mencapai 80.000 km sangat potensial untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Karena *power plant*-nya tidak memerlukan lahan yang luas dan biasanya di daerah yang tidak produktif.

Prinsip tenaga gelombang air laut menggunakan *taper chanel*. Saluran yang ujungnya semakin mengecil, sehingga tinggi gelombang meningkat dan dapat melompati ujung *taper chanel* masuk ke dalam sebuah waduk *(reservoir)*. Perbedaan tinggi *(head)* antara permukaan air di dalam waduk dengan tinggi permukaan rata-rata air laut yang digunakan untuk memutar turbin penghasil listrik.

Daya yang dapat dihasilkan 8,42 KW/m2 dengan harga (tahun 1990) 3,6 cent/KWH, lebih murah dari PLTD yang 9 cent/KWH. Dari hasil survey, terdapat dua pilihan tempat di sekitar Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran Jawa Barat dan Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Menurut Dr.Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., ahli energi gelombang laut UGM, proyek Baron masih dalam skala kecil dengan kapasitas 1-2 MW. Dibangun untuk penelitian pembuktian kemungkinan pemanfaatannya di Indonesia. Bila jadi dibangun, harga energi listrik yang dihasilkannya 3,6 sen /KWH, bersaing dengan PLTA yang harganya 1,8 - 4 sen /KWH, menurut harga listrik tahun 1990.

Konversi Energi Suhu Laut/ Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)

OTEC pernah dikembangkan di Selat Lombok, tetapi kemudian berhenti karena krisis moneter.

"OTEC sangat potensial dikembangkan di Indonesia, selain ramah lingkungan, juga memiliki sumber tenaga yang gratis serta terus-menerus dari alam", jelas Dr. Nizam.

Prinsipnya teknologi ini, menggunakan perbedaan suhu antara permukaan laut yang panas dan suhu dasar laut yang dingin akibat aliran dari kutub. Suhu permukaan yang panas digunakan untuk menguapkan fluida kerja, biasanya amoniak yang memiliki titik didih 30 C, dengan dikenai tekanan yang rendah sehingga titik didihnya turun dan mudah menguap. Uap ini menggerakkan turbin penghasil listrik, kemudian dicairkan dengan suhu dingin dari dasar laut. Sayangnya pipa yang dipakai sering dijadikan tempat hidup kerang yang kemudian menyumbatnya.

Menurut Dr. Ir. Sunarno, M.Eng., Ph.D., banyak ahli sepakat bahwa

kita akan menawarkan suatu ketergantungan yang lain dari bangsa ini kepada luar negeri.Amerika banyak produk energi telah ditangani oleh koperasi, baik itu untuk kawasan tertentu seperti tenaga angin di negara bagian California, tenaga panas bumi, bahkan untuk negara bagian Iowa, kekurangan listriknya dipenuhi oleh koperasi negara bagian Nebraska (lintas negara). Tentu saja ini sangat ironis mengingat Indonesia yang sejak merdeka telah meletakkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional tetapi justru tidak diberdayakan.

Menumpuknya Masalah

Secara umum terdapat beberapa masalah pokok dalam pengembangan suatu proyek energi Alternatif, yaitu; biaya (investasi), Kematangan Konsep sosial maupun teknis, kesiapan masyarakat menyangkut aspek psikologis dan daya beli terhadap produk energi tersebut, dan mungkin juga sebuah keputusan politik.

Idealnya suatu produk teknologi haruslah dapat memecahkan problem-problem sosial dan bukan hanya untuk dikomersilkan atau hanya sekedar dibanggakan, apalagi proyek-proyek tersebut seringkali menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang cukup besar tetapi seringkali hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Selama pemerintahan Orde Baru seringkali nampak fenomena ketidakpercayaan kepada para akademisi yang mencoba mengkritisi masalah teknologi pada umumnya, contohnya kesenjangan mega proyek IPTN yang terlalu mercu suar dan padat modal dibandingkan dengan kebutuhan sebagian besar rakyat yang masih memerlukan produk-produk teknologi sederhana untuk proses pertanian dan perikanan yang ironisnya masih tergantung pada produk-produk impor yang relatif mahal dan sulit terjangkau apalagi di saat krisis seperti sekarang ini." Seorang akademisi khususnya enginer bertugas untuk meneliti dan memberikan pandangannya yang obyektif tentang kekurangan dan kelebihan suatu produk teknologi", kata kepala PSE-UGM Ir. Yudi Utomo Imardjoko M.Sc.Ph.D.

Sebenarnya, dengan bentuk tanggung jawab sebagai akademisi dan membawa pesan moral dari rakyat, beberapa forum resmi seperti lembaga studi telah mengusulkan beberapa alternatif pemecahan masalah energi, dan yang pantas kita syukuri, bahwa pemerintah reformasi mulai terbuka dan mulai menyadari pentingnya masalah ini, terutama keseriusan untuk mengkaji lebih lanjut tentang tidak efisiennya pemanfaatan energi oleh PLN, atau Pertamina yang selama ini memonopoli pasokan listrik dan minyak.

Pembangkitan energi oleh beberapa perusahan swasta Nasioanal maupun asing yang kemudian harus dijual ke PLN atau Pertamina dalam nominal dolar akan lebih mempersulit rakyat dibandingkan langsung ditransmisikan ke pusat-pusat beban. Karena selain harganya semakin mahal juga tidak membentuk suatu kondisi persaingan yang sehat antara perusahan-perusahan pembangkit, dan dominannya posisi pemerintah merupakan lahan yang subur bagi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan rezim Soeharto, termasuk memperkaya kalangan tertentu, walaupun menurut ahli ekonomi UGM, Sukanto Reksohadiprojo; "Itu cuma bisnis dan kembali kepada oknum pemerintahnya kenapa mau diajak ber-KKN".❐

Fahmi, Iwan

---

yang paling potensial dari sumber daya energi laut adalah OTEC. Tetapi menurut Dr. Nizam, teknologi pengembangan OTEC masih mahal bila dibandingkan dengan PLTGL Tapchan.

Potensi di Indonesia ada di dekat Bali dan Sulawesi yang mempunyai banyak palung yang dalam.

Tenaga Pasang-Surut

Prinsipnya menggunakan saat pasang untuk menampung air dalam sebuah *reservoir* dan dimanfaatkan memutar turbin pada saat air surut

Posisi negara kita yang terletak di daerah khatulistiwa dengan banyaknya laut terbuka menyebabkan pasang surut rata-rata hanya sekitar 1-2 meter yang kurang efisien. Karena pemanfaatan tenaga akan efisien bila pasang surut 5 m. Tetapi di beberapa tempat seperti Irian ternyata ditemukan pasang-surut mencapai 6 m sehingga sangat baik dikembangkan dikemudian hari.

Menarik juga adalah kemungkinan pengembangan kawasan pasang-surut rendah (*micro tidel*). Sehingga air pasang yang rata-rata 1-2 m menjadi sumber potensial. Dapat dikembangkan dalam skala kecil sekitar 1-2 KW, dan cukup untuk 10 - 20 kepala keluarga di daerah pasang surut seperti di Kalimantan dan Irian.

PLTN-Thorium

Thorium digunakan untuk mendidihkan air yang menghasilkan uap air untuk memutar turbin. *Thorium* memiliki waktu paruh yang relatif singkat dibandingkan dengan Uranium yaitu, hanya sekitar 100 tahun, dan dijamin dengan teknologi penyimpanan yang sudah bisa sampai 300 tahun..

Menariknya limbah yang dihasilkan oleh reaktor bisa langsung diproses agar dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar. Akhirnya yang disimpan volume kecil dan radioaktivitasnya rendah. Atau diambil isotopnya yang ada sekitar 400 macam untuk keperluan penelitian, kesehatan, pertanian dan bioteknologi dan sebagainya.

Keuntungan dari PLTN adalah tidak mencemari lingkungan karena hanya membuang uap air ke udara yang bebas radiasi. Kemudian dapat menghasilkan energi yang sangat besar dengan massa bahan baku yang sedikit dan relatif murah sehingga sangat menguntungkan. Energi thermal yang dihasilkan 1 kg Thorium kira-kira sebesar 17 ribu juta kilo kalori yang setara dengan energi thermal yang dihasilkan oleh 2,4 juta kg batu bara. Hal ini menyebabkan listrik yang dihasilkan PLTN lebih murah dibandingkan pembangkit yang lain.

Kalaupun akan jadi dibangun akan diusulkan agar dibangun di pinggir-pinggir Indonesia seperti Pulau Batam atau Irian agar listriknya dapat dijual untuk negara-negara tetangga seperti Singapura.❐

Fahmi, Iwan.

Citra Emas (CES) Sekolah Manajemen dan Publik Relation

Pada dasarnya setiap individu senantiasa dapat memancarkan di dalam meniti kehidupannya, ia sekitarnya. Upaya membangun sudah menjadi prasyarat utama berhasil didalam menembus ern. Realitas sosial tersebut secara organisasi perusahaan, apapun manajemen di dalam membangun upaya pembinaan moral kerja yang usahanya.

Maraknya kegiatan ekonomi yang mempercepat laju permintaan terhadap baik secara teknis maupun masing-masing individu tersebut bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai diri serta institusi yang positif akan lebih



STAF PENGAJAR, **komitmen dengan kualitas**

selalu berupaya agar dirinya sosok pribadinya secara positif agar dapat diterima oleh masyarakat citra diri *personal image)* yang baik agar dirinya bisa survive dan peradaban masyarakat yang mod-macro juga terjadi pada setiap jenisnya. Sehingga keberhasilan sebuah citra *(institusional building)* dan kondusif akan menentukan kelangsungan

makin kompetitif dewasa ini tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas, kepribadiannya. Kesiapan diri pada semestinya direncana sejak dini agar ia dengan tuntutan kerja. Perwujudan citra memungkinkan perusahaan tersebut

dapat merebut ruang kehidupan *(niche)*, yang makin hari persaingan makin sengit.

Melihat problem tersebut, C-E-S hadir dengan memberikan berbagai alternatif pendidikan pelatihan, konsultasi maupun riset yang arahnya untuk mengisi kecakapan *Public Relations* baik dalam perspektif mikro sebagai pengembangan kepribadian (bisnis) maupun pengolahan *Public Relations* secara kelembagaan, sebagai salah satu fungsi manajemen yang semakin strategis. **Rhenald Kasali** (pakar manajemen dan Public Relations dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) mengatakan bahwa C-E-S telah melakukan terobosan maju dan merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali di Indonesia yang memadukan kajian *Public Relations* dalam terminologi manajemen modern, yang prospektif.

Kelahiran yang bertepatan dengan Tahun Indonesia Emas (1995) memberikan inspirasi untuk memberi nama Citra Emas (CES dibaca Ce-E-Es). Dengan semangat memberikan yang terbaik pada siswa didik dan klien serta ditopang dengan fasilitas pendidikan yang ekslusif di pusat kota Malioboro Yogyakarta.

DIPLOMA MANAJEMEN DAN *PUBLIC RELATIONS*

Program ini dirancang bagi Anda yang lulus SMA atau mahasiswa/wi yang punya minat didalam Public Relations secara mendalam, yang ditempuh selama 1 tahun. Adapun materi dasar meliputi: Teori Komunikasi, Dasar-dasar Public Relations, Marketing, Komunikasi Organisasi, dan Teknik Presentasi. Materi lanjutan meliputi Manajemen Public Relation, Perencanaan Media, Pengelolaan Media Internal, Komunikasi Lisan, dan Periklanan. Sedangkan materi penunjang adalah Komputer (Under Windows) dan English for Bussiness I dan II serta diakhiri dalam proses magang. Para lulusan diharapkan siap memasuki dunia ke-PR-an diberbagai perusahaan. Hingga saat ini kami sudah menerima pesanan dari beberapa perusahaan bagi para lulusan progam ini. Program berikutnya direncanakan dimulai 14 September 1998.

PUBLIC RELATIONS FOR EXECUTIVE

Para eksekutif dan manajer perusahaan perlu menambah wawasan berkenaan dengan perannya dan arti penting PR bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Program ini disajikan secara intensif dengan mengutamakan pada analisis kasus, agar para peserta dapat mamahami secara teoritis maupun praktis serta kritis didalam mensikapi persoalan organisasi perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Materi yang disajikan meliputi Budaya Perusahaan, Manajemen PR, Kepribadian Plus, Lobby dan Negosiasi, Table Manner, dan lain-lain. Masa pelatihan selama enam minggu (seminggu tiga kali)

PROGRAM REGULER LAINNYA

Meliputi: Pelatihan Komunikasi Bisnis (selama tiga minggu); Komunikasi Pemasaran (selama tiga minggu); Mensiasati Interview (selama dua minggu); Kepribadian Plus (selama dua minggu); Program Pengembangan Potensi Diri (diklat PR tiga bulan) dan segera dibuka Diploma Marketing (selama satu tahun).

LAYANAN IN HOUSE TRAINING

Kinerja sebuah perusahaan biasanya mengalami pasang surut, yang terkadang bisa memunculkan kondisi krisis yang sulit dideteksi dan diramalkan. CES siap mendampingi dalam pelatihan spesifik di perusahaan ataupun di CES. Serta dimungkinkan konsultasi dan riset yang relevan dengan kasus tersebut. Waktu dan pelaksanaan disesuaikan dengan keinginan perusahaan.

STAFF AHLI DAN PENGAJAR

CES didukung oleh Prof. DR. Harsono Suwardi (Ketua Program Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana UI); DR. Sasa Djuarsa Sendjaja (Direktur LPPKM Jakarta); Dra. Miranty Abidin (Praktisi PR); DR. Suyanto, M.A. (Konsultan Bank Dunia). Staff Pengajar: Drs. Widodo Muktiyo, S.E. M.Com; Drs. Jefta Leibo M.S.; Drs. A. Eko Setyanto, M.Si; Drs. Ahmad Zaini Abar; Drs. IG. Ngurah Putra, M.A.; Okina Fitriyani, S.Psi; Ir. Herawati, M.M; Dra. Mirra Noor Milla; Ahmad Syauqi Soeratno; Drs. M. Alexander; Dra. Ida Anggraeni Ananda, M.Si dan Drs. Tulus Subardjono.***

Waktu Pendaftaran:
setiap hari kerja, jam: 08.00 s/d 17.00 di Kantor CES Jl.Malioboro 183 lantai II (Depan Hotel Garuda) Yogyakarta Telp. (0274) 581706. Area parkir di Taman Parkir Abubakar Ali

Orang-Orang di Dasar Penderitaan:

Kembali Mereka Yang Terpinggirkan

Cerita pedih tragedi Mei masih berceceran. Mengaduk aduk segenap rasa manusia, memicu kemarahan, iba sekaligus kegamangan. Kegamangan atas kesimpang-siuran data korban ataupun upaya penanganan yang masih tertatih-tatih. Menyusul dituduhnya para korban sebagai penjarah.

Mimpipun tidak. Sebuah bangsa yang sudah berpuluh-puluh tahun mengagungkan-agungkan nilai leluhurnya, kelemahlembutannya, keramahanya tiba-tiba beringas dan menghancurkan begitu saja bangunan budaya. Sebuah konstruksi yang ternyata hanya kokoh di luar tapi rapuh di dalam. Tak ada nurani, tak ada harga diri. Seolah lupa daratan, bahkan orang asing mungkin enggan menyebut kita, sebuah bangsa itu manusia. Ketika tragedi itu datang, seolah tak ada cinta, tak ada Tuhan, dan tak ada sesuatupun yang bisa menunjukkan kita sebagai bangsa yang kadang mengatakan secara arogan sebagai manusia ber-Pancasila.

Luka itu, akan lama menjadi borok dan noda sejarah yang kekal. Bahkan untuk orang-orang yang telah lama tertindas dan secara sepihak disebut sebagai penjarah. Sementara konspirasi politik yang menjadi latar kedurhakaan itu masih saja terbentang di atas langit, tak terjangkau.

****

Kalau mau secara jernih berpikir, kaum miskin kotalah yang terpaksa menelan pil kehidupan. Lebih pahit dari sebelumnya dengan dikatakan sebagai pengambil kesempatan dalam kesempitan. Jargon klasik kesenjangan ekonomi dan konflik rasial, seolah menjadi alasan yang cukup memadai untuk menimpakan tuduhan itu.

Adalah Sandyawan Sumardi, SJ atau yang lebih dikenal dengan panggilan Romo Sandy, direktur Institut Sosial Jakarta (ISJ), melihat bahwa potensi konflik dua hal diatas memang riil ada, tetapi sebagai sebab utama, sama sekali tidak benar. Karena, menurutnya, jaringan pelaku kekerasan politik ini begitu terencana. "Para provokator itu, paham betul psikologi massa. Massa yang sudah diremuk oleh krisis ekonomi,baru sadar akan kebohongan Orde Baru, masih ditambah kemarahan moral melihat mahasiswa di*bedil* di Trisakti, dipancing kemarahannya dengan penyebaran isu-isu yang excessive," jelas koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan ini.

Maka, lanjut Romo Sandy, massa mulai ikut turun ke jalan, menonton bagaimana para provokator ini dengan amat profesional, sistematis dan cepat, membakar dan menguasai plaza-plaza. Melihat dengan mudahnya para provokator ini mengeluarkan barang-barang besar, seperti, kulkas dan televisi. Massa yang sehari-hari mencari sandal jepit saja susah, mulai tertarik untuk ikut mengambil barang. Apalagi mendengar seruan-seruan, seperti: "Masuk saja! masuk, ini hak rakyat!" Pada saat



FOTO:DOKUMENTASI INSTITUT SOSIAL JAKARTA

itulah, dahaga mereka akan barang murah apalagi gratis , setelah hampir satu tahun tercekik kenaikan harga, hari itu menemukan penghilangnya.

Berebutlah mereka mengambil sabun cuci, mie instant, susu atau anak-anak yang sekedar meloncat-loncat diatas *spring bed* tanpa dibentak satpam. Ketika massa sudah masuk ke plaza, tiba-tiba ada orang turun dari lantai atas gedung sambil menumpahkan bensin dari dalam jerigen. Kemudian, mereka dengan begitu dinginnya, membakar gedung penuh manusia itu. Massa histeris, sayup-sayup terdengar lolong memilukan orang bersama gemertaknya api yang membakar. "Gila kamu! di atas banyak orang!" teriak massa dengan marah pada para pembakar gedung itu. Provokator itu berlalu.

Sebenarnya, sangatlah sepihak untuk menilai kaum miskin kota sebagai kelompok orang yang mudah terprovokasi. Menurut PM. Laksono, dosen Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra UGM ada proses panjang yang menyebabkan mereka bisa terprovokasi. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka frustasi dan kehilangan akal. Akumulasi perlakuan tidak adil yang mereka terima, seperti upah yang rendah sementara ada orang yang hidupnya berlebihan, telah "melecehkan" martabat mereka.

Dalam keadaan seperti ini, kesempatan sekecil apapun untuk mendapat makan akan diambil. "Sebenarnya, stigma penjarah, hanyalah untuk membenarkan aksi pembunuhan massal. Ribuan orang yang mati terpanggang itu, sebelumnya, selama bertahun-tahun telah dijarah oleh sistem kapitalisme global. Jadi, inilah cerita tentang orang terjarah yang menjarah!" jelas Antropolog UGM ini.

Sementara menurut Romo Sandy, hampir 90% korban yang datang mengadu ke posko relawan ternyata bukan dari etnis Cina. Tetapi, sayangnya tidak banyak orang yang mau memperhatikannya. Vonis penjarah telah meneggelamkan banyak kisah-kisah getir. Sukidah, misalnya. Perempuan ini tewas terbakar di dalam Yogya Plaza, Klender, bukan karena hendak menjarah, melainkan karena niatnya untuk menyelamatkan seorang anak yang melolong dari dalam kobaran api. Para korban, seperti ditulis dalam buletin "Pos Relawan", akhirnya memilih untuk diam. Mereka malu dan takut untuk menyampaikan pengaduan karena mereka tahu bila semua itu hanya berakhir dengan cemoohan Tuduhan sepihak bahwa penjarahan dan perampokan pada siapapun yang berada dalam peristiwa Mei itu serasa tidak fair. Kalau melihat kondisi di lapangan, kejadian itu begitu serentak dan sistematis dan dengan motif yang hampir sama. Siapapun orangnya, barangkali akan lakukan hal yang sama bila melihat kesempatan memiliki barang, yang bila dalam kondisi normal hanyalah mimpi di siang bolong.

... sungai itu berwarna coklat, penuh sampah dan berbau busuk, karena menjadi muara -maaf- buangan tinja...

Apalagi, bila mereka itu adalah orang-orang kelas bawah yang untuk makan saja sulit. Hidup dari mengais sampah, tidur di bantalan sungai, ataupun kolong jembatan. Hal ini, bukan berarti apa yang mereka lakukan itu dapat dibenarkan. Kemarahan mereka adalah bagian dari proses yang tak bisa dihindari. Kemarahan mereka adalah buah-buah yang harus dipetik dari benih-benih ketidakadilan yang ditanam selama berpuluh-puluh tahun oleh "Orde Pembangunan".



ISTIMEWA

Romo Sandyawan SJ

Penderitaan di Kerak Kehidupan

"Sudah jatuh tertimpa tangga". Demikian, tampaknya, gambaran nasib kaum miskin kota pasca kerusuhan Mei. Kehidupan keseharian mereka kian sarat beban. Seperti ditulis *Kompas (3/7)*. Awan kelabu krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997, telah memukul kehidupan sehari-hari. Erna dan Sjafrie, pemulung yang dijumpai *Balairung* di Kawasan Pemukiman Kumuh di Penas, Tanggul, Jakarta Timur, tinggal di tepi sungai, dengan ritmis aliran air dan tiupan hawa segar, yang mungkin menjadi impian hampir setiap orang. Tetapi, bila sungai itu berwarna coklat, penuh sampah dan berbau busuk, karena menjadi muara -maaf- buangan tinja, masihkah menjadi impian?

Itulah kondisi yang harus dihadapi Erna, Sjafrie dan kawan-kawannya, yang sudah bertahun-tahun tinggal di kawasan pemukiman kumuh di tepian sungai Cipinang. Bersama-sama 122 keluarga lainnya, dalam petak-petak rumah panggung, yang dibangun untuk menyiasati banjir, berhimpitan memenuhi tepian sungai. Bila hujan tiba, makin sempurnalah penderitaan mereka. Banjir, tak kenal kompromi merendam petak-petak panggung yang sudah lusuh itu.

Sementara, bila musim kemarau, keadaan tak lebih baik. Tinja yang tak terseret air menimbulkan bau busuk yang bukan kepalang..

Agus (22), seorang pengasong yang sudah sekitar tiga tahunan tinggal disitu, menceritakan, sungai yang menjadi halaman depan rumah mereka, memang menjadi tempat buangan akhir limbah tinja Pemda DKI dan juga beberapa rumah sakit. Tapi, tidak ada yang dapat mereka lakukan, kecuali pasrah. Karena tak ada pilihan, tak ada lagi tempat.

Lebih ironisnya, status kepemilikan mereka akan lokasi yang rentan penggusuran ini juga tidak jelas

"Sebenarnya, kami hampir saja diberi RT dan RW yang jelas, tetapi gara-gara ada seorang anak yang memasang gambar PDI di jembatan, Pak Lurah membatalkan janjinya untuk memberi RT dan RW bagi kami," ungkap Erna.

Status RT dan RW yang jelas memiliki arti politis yang dan sangat diharapkan bagi mereka. Bukan saja, untuk memperoleh alamat surat, tapi lebih-lebih untuk meningkatkan posisi tawar mereka bila terjadi penggusuran. Belajar dari pengalaman penggusuran beberapa tahun yang lalu, dimana satu gubuknya hanya dihargai Rp. 150 ribu.

FOTO:DOKUMENTASI INSTITUT SOSIAL JAKARTA



Demi hidup:
Jamur sampahpun dimasak

Di tempat yang baru, bagian lain dari tepian sungai itu, mereka berusaha merubah rawa kangkung menjadi lahan yang layak bangun. Sekarang, rumah-rumah baru yang cukup bagus dan sehat, permanen, berubin, dan berventilasi, menjadi tempat tinggal mereka. Bersama sebuah LSM yang mendamping, mereka terus berusaha menata rumah-rumah lain yang belum selayak rumah di bagian barat tepian sungai. Seperti rumah Mbok Jum, perempuan yang berusia sekitar 80-an dan sudah sekitar 15 tahunan tinggal disitu, masih berupa bilik kecil, berukuran sekitar 2,5x2,5 meter, berdinding kardus dan lembab. Bilik kecil dan gelap ini, disekat dengan selembar kain kumal. Di bagian depan, diisi tempat tidur dari busa tipis dengan bantal-bantal yang warnanya sudah menghitam. Sementara, pada bagian belakang, dipakai untuk dapur. Sudah hampir dua bulan, perempuan ringkih dan kurus ini, tidak bisa memulung seperti biasa akibat sakitnya. Sariawan akut mengharuskannya berdiam dalam biliknya, ditemani udara sumpek, perpaduan antara aroma obat gosok dan bau karpet yang basah oleh tetesan-tetesan air hujan dari atap yang bocor.

Bersama tikus-tikus kecil, dihabiskan waktunya dengan menatap air sungai yang meluap dan mencapai bibir pintu rumah panggungnya. Tawaran rawat inap dari sebuah LSM , ditolaknya. Alasannya, "Kalau di rumah sakit sepi, nggak ada anak yang mengunjungi. Kalau disini, mau nungging, kek, nggak ada yang ngatur!" ujarnya ketus.

Bila warga di kawasan Penas, direpotkan dengan bau busuk di musim kemarau, warga pemukiman kumuh Bantar Gebang, Bekasi, justru hampir disepanjang musim direpotkan dengan masalah ini. Tinggal diantara timbunan sampah, areal pembuangan sampah akhir, memaksa mereka menghirup bau busuk setiap waktu. Seperti juga, ketika kemiskinan mengharuskan mereka makan dari sisa-sisa makanan. Apapun itu, daging, sayur, buah atau jamur sampah sekalipun. Belum lagi, bila musim kemarau datang dan mulai terjadi kebakaran sampah. Batuk dan sesak nafas pun harus diterima sebagai rutinitas.

Sedangkan upaya mencari pengobatanpun *mentok*, terbentur masalah status rumah tinggal mereka. Secara geografis, Bantar Gebang, masuk wilayah Bekasi. Namun, daerah itu telah disewa oleh Pemda DKI sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Akibatnya, upaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, menjadi terkatung-katung. Instansi kesehatan di Bekasi, menganggapnya sebagai tanggung jawab instansi kesehatan DKI dan sebaliknya instansi kesehatan DKI menganggapnya sebagai tanggung jawab instansi kesehatan Bekasi. Ruwet.

Keadaan yang memilukan ini memang ada, di negeri kita. Cukilan kisah di atas hanya sebagian kecil menjelaskan, bahwa kehidupan di bawah batas garis kemanusiaan masih ada. Penderitaan itu sudah demikian terakumulasi. Diperparah lagi oleh tiupan bencana ekonomi yang melanda Indonesia. Pengangguran meledak, ekonomi macet, sementara kebutuhan makan tidak bisa dikompromikan atau ditunda. Dapat dibayangkan, berapa juta tambahan orang miskin baru dalam dua belas bulan terakhir ini.

Mereka makin tepinggirkan dan terasing di negerinya sendiri. Laju pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan, ternyata dilandaskan pada upah buruh yang rendah. Padahal, tidak sedikit pabrik-pabrik di negeri ini yang mampu mengupah tenaga asing dengan gaji yang sangat tinggi. "Ini, kan! tidak adil," sesal PM Laksono, "Memang, ini bagian dari ketidakadilan global. Tetapi, ketidakadilan ini kita kita terima dan kita perdalam secara kualitatif maupun kuantitatif!"

Negara ini agaknya juga alergi untuk mengakui kemiskinan sebagai suatu yang nyata ada. Banyak pejabat yang tidak bersedia mengakui, kalau di wilayahnya ada kemiskinan. Lebih-lebih, di wilayah metropolis seperti Jakarta.

Di tengah semua kegemerlapan, kehadiran komunitas-komunitas kumuh, membangkitkan perasaan risih. Maka, upaya-upaya pengentasan kemiskinan segera dicanangkan. Sayangnya, yang terjadi di lapangan

bukannya pemberdayaan orang-orang miskin, melainkan pemberantasan orang-orang miskin. Sesuatu yang dalam batas-batas tertentu, mengakibatkan terenggutnya hak untuk memperoleh penghidupan yang layak dari si miskin. Seperti, pemulung di Bantar Gebang. Sebelumnya, mereka adalah petani-petani di daerah Indramayu. Pembelian sawah-sawah oleh orang kaya, merubah mereka menjadi buruh tani. Pendapatan seorang buruh tani yang tidak mencukupi kebutuhan, mendorongnya hijrah ke Jakarta. Tempat, dimana hampir 75% uang rupiah beredar. Namun, ternyata uang itu hanya terpusat pada beberapa konglomerat dan pemilik modal. Ketika hanya sampah yang tersisa untuk mereka, maka pemulung menjadi jawaban akhirnya.

Padahal, seperti dikatakan Romo Sandy, sebenarnya sektor informal dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada sektor formal, bila saja tidak ada campur tangan ekonomi politik.

Ambil contoh, kasus sampah impor, yang sangat memukul para pemulung di Bantar Gebang. Sampah impor adalah sampah dari negara-negara maju yang dikirim ke Indonesia. Atas undangan perusahaan-perusahaan gelap milik anak-anak pejabat. Biasalah, mereka berkolusi dengan pihak kejaksaan dan bea cukai dan sampah-sampah itu pun membanjiri Indonesia.

Anehnya, para pengundang ini, hanya peduli dengan uang dari negara pengirim, tetapi tidak mau mengurusi sampahnya. Maka, banjirlah Jakarta dengan sampah. Seketika, harga sampah turun drastis. Seperti kasus sampah impor tahun 1997, yang mengakibatkan harga kardus turun. Yang semula mencapai Rp 1000/kg menjadi Rp 300/kg, bahkan untuk sampah kertas bisa mencapai Rp 50/kg. Pola lain adalah program "penculikan" sampah oleh pemulung berdasi. Truk-truk sampah yang menuju Bantar Gebang, oleh para pemulung berdasi dihentikan di tempat-tempat transit tertentu, seperti di daerah Cakung. Kemudian pemulung berdasi ini membayar pemulung-pemulung murni untuk menyortir sampah. Memilah sampah yang masih layak jual. Akibatnya, sampah yang masuk ke Bantar Gebang, betul-betul sampahnya sampah. Sampah organik yang tidak bisa lagi didaur ulang.

Pola-pola semacam ini menghancurkan *survival system* pemulung yang dibangun secara tradisional. *Survival system* yang biasanya menjadi karakter kaum miskin kota yang tidak berdaya melawan tekanan-tekanan vertikal itu. Akhirnya, kekalahan itu tertumpah dalam konflik-konflik horisontal. Misal seperti seorang tukang ojek, dia akan menampar istrinya untuk melampiaskan perlakuan tidak adil dari majikan.

...kemelaratan, ketertindasan, kecemburuan sosial yang lama mengakar merupakan pemicu. Sehingga kaum miskin kota begitu reaksioner dan dekat dengan kekerasan.

Atau, konflik horisontal antara kelompok tukang ojek dan kelompok pemulung, yang muncul karena salah seorang pemulung merampas sepeda motor milik salah seorang tukang ojek. Hal itu, berbuntut kemarahan tukang ojek dan hampir saja sekitar 600 tukang ojek bergabung untuk menyerang pemulung Bantar Gebang. Konflik diatas masih melibatkan sentimen profesi akan lebih mengerikan, ketika sudah melibatkan sentimen suku. Potensi-potensi konflik horisontal inilah, yang seringkali dimanfaatkan oleh para perekayasa politik.

Pergesekan-pergesekan yang tidak diikuti suatu kesadaran politik yang memadai, mengakibatkan mereka rentan terhadap perpecahan. Misalnya, Mbok Jum yang sangat sakit hati dengan tetangganya karena menuduhnya, berpura-pura sakit dan menjual air mata kepada para relawan dari LSM yang mendampingi. Atau munculnya, juragan pemulung atau biasa disebut Lapak, yang memborong sampah.

Kondisi serupa, yaitu kemelaratan, ketertindasan, kecemburuan sosial yang lama mengakar merupakan pemicu. Sehingga kaum miskin kota begitu reaksioner dan dekat dengan kekerasan. Ketika, uang menjadi tidak berharga, dikantong-kantong uang seperti Jakarta inilah, orang akan lebih kelaparan. Tak mengherankan bila saat tragedi Mei meledak sebagian mereka begitu memanfaatkan kesempatan yang mungkin tak akan terulang lagi selama hidupnya.

Kerusuhan pertengahan Mei lalu, sebenarnya bisa menjadi lahan potensial bagi pemulung. Namun, ada pelapak, yang dengan kelebihan uangnya, memborong satu gedung tertentu. Harga borong per gedung bisa mencapai jutaan rupiah. Dengan demikian, seluruh puing-puing gedung dan isinya menjadi hak sepenuhnya pelapak ini.

Apa yang terurai di atas menunjukkan betapa kesenjangan sosial ekonomi dan konflik-konflik horisontal dapat memicu munculnya amuk massa. Namun, yang lebih perlu diwaspadai sebenarnya adalah orang-orang yang memanfaatkan potensi-potensi konflik ini.

Maka, agenda yang harus diprioritaskan, menurut Sandyawan, adalah membangun *Basic Human Comunities*, dengan ruang-ruang alternatif. Mulai dari yang karitatif seperti logistik dan medis, sampai yang edukatif. Seperti pelayanan informasi yang jernih. Desas-desus dilawan dengan akurasi data. Sementara, menurut PM. Laksono, agenda terpenting adalah pemulihan kepercayaan. Tidak berharganya rupiah, menjadi bukti kegagalan negara membayar hutang pada rakyatnya.

Hanya dengan kepercayaan, bahwa nasibnya tidak akan lagi seperti tanah liat, yang dapat seenaknya diubah, mereka akan meninggalkan kemarahan sebagai cara memperoleh hak-haknya. Dan cerita-cerita hidupnya, tidak lagi sekedar menjadi cerita-cerita sunyi dalam ruang bising pembangunan. Apalagi, harapan mereka tentang hidup yang lebih baik, sebenarnya sederhana saja "Bertahan hidup!" atau "Memulung tanpa dikejar-kejar" .❐

Monica
Bekti, Eka Rinanda

Hijau Hutan Takkan Memudar' sebuah iklan yang menggambarkan kondisi hutan Indonesia itu di protes oleh LSM lingkungan dunia. Iklan itu dinilai over akting, keterlaluan karena jauh dari kenyataan.



REPRO: POPULER

Iklan yang diprotes itu

Tarik Ulur Partai Lingkungan

Namun dua tahun kemudian (1997), iklan itu dijungkirbalikan oleh dahsyatnya kebakaran hutan yang menggila di negeri ini. *Ngeri*, tak usahlah bicara soal ekosistem hutan yang hangus. Sudah pasti. Kenyamanan penduduk Pontianak, ataupun Riau, kota terdekat dengan pusat kebakaran, terusik oleh asap yang menyerbu kota. Lebih payah lagi asap itupun sukses 'terekspor' ke negeri jiran. Malaysia dan Singapura mencibir dan memaki pemerintah kita. Kalau sudah begini siapa yang tidak malu. Setelah sukses mengekspor tenaga kerja, asappun diikutkan juga.

Gambaran di atas adalah sedikit dari permasalahan lingkungan yang diketahui orang awam. Tetapi sudah cukup menggambarkan betapa kacaunya pengelolaan lingkungan kita. Selama ini keadaan lingkungan sangat terabaikan. Menyusul eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang melimpah. Sangat tidak adil, kalau sekarang kita menggadaikan alam yang sebenarnya untuk anak cucu kita kelak. Lebih parahnya persoalan lingkungan, menjadi bagian yang dimarginalkan oleh negara. Negara tidak pernah secara serius menanganinya. Sementara itu eksploitasi alam berdalih pembangunan habis-habisan dilakukan

Kalaupun kita mau cermati, sebenarnya tidak ada yang menentang pemanfaatkan sumber kekayaan alam kita yang menyerupai surga ini. Tapi bukan berarti kita boleh *kemaruk*. Tuntutan LSM lingkunganpun masuk akal dan manusiawi. Menjaga keseimbangan alam, sehingga tidak terulang sejarah negara maju yang alamnya terlanjur rusak. Sayang, hal itu hanya dianggap angin lalu bahkan dicap " kelompok anti kemampanan", dan pemerintah menjadi alergi.

Yang ini lebih Ironis , selama pemerintahan Orde baru masalah pengelolaan lingkungan kurang mendapatkan perhatian yang serius. Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan)-pun ternyata tidak berdaya dalam menanggulangi kerusakan lingkungan.

"Situasi rancu" semacam ini diakui pula oleh Arimbi Heroepoetri, *Deputy Director* Walhi.

Belum soal pengangkatan menteri lingkungan hidup yang bukan dari kalangan pecinta lingkungan, juga dianggap memperparah kondisi. Belum pernah sepanjang sejarah kursi Orde Baru, menteri lingkungan dijabat oleh orang yang seharusnya *capable* menangani lingkungan. Emil Salim (ekonom UI), Sarwono Kusumaadmaja (teknokrat/Teknik Sipil ITB), Juwono Sudarsono (pakar politik) adalah bukti. Bahkan dalam kabinet saat ini, Habibie mengangkat seorang politisi yang dokter (Panangian Siregar).

Bagi Arimbi Heroepoetri, menteri lingkungan hidup haruslah orang yang mengerti benar tentang lingkungan. Mengingat seorang menteri akan berhubungan dengan banyak negara untuk melakukan negosiasi-negosiasi. "Apa jadinya kalau menterinya *nggak* mengerti masalah lingkungan ?" tegas Arimbi.

Ketidakmengertian seorang menteri lingkungan hidup terhadap masalah-masalah lingkungan menyebabkan penanganan lingkungan tak pernah beres. Seperti, penanganan kebakaran hutan Kalimantan, eksploitasi hasil tambang di Irian Jaya ternyata meluluh lantakkan ekosistem di sekitarnya.

Timbulnya masalah seputar penanganan dan pengelolaan lingkungan memang disebabkan oleh berbagai hal. Tetapi penyebab utama semakin kacaunya pengelolaan lingkungan lebih karena rakyat tidak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Kondisi ini tercermin dari sistem sentralistik yang diterapkan di Indonesia. Termasuk dalam penanganan lingkungan.

Dengan tidak adanya kontrol masyarakat maka setiap keputusan yang diambil selalu kurang memuaskan, terlebih dalam pelaksanaannya.

Sebenarnya DPR lah yang melakukan fungsi kontrol tersebut. Tapi tahu sendirilah seperti apa DPR sekarang, hanya lembaga stempel pemerintah yang kehilangan fungsinya .

Menurut Rizal Panggabean,

pengamat politik yang juga dosen Fisipol UGM saat ini, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lah yang berada pada tingkat.massa. Tapi sayang, sampai sekarang keberadaan LSM sering kali termarginalkan dan masih sangat lemah. Bahkan sering kali LSM-LSM tersebut, tak terkecuali LSM Lingkungan dianggap sebagai pembangkang. Semua hal yang dilakukan LSM selalu diabaikan dan dianggap angin lalu oleh negara. Meski aksi-aksi sudah sering dilakukan, tapi tetap saja negara enggan untuk menindak lanjuti. Lagu lama pemerintah yang selalu terulang, masukan itu akan ditampung.

Tingkatkan peran

Kedudukan LSM maupun organisasi kemasyarakatan di tingkatan massa inilah yang seharusnya segera ditingkatkan. Tak terkecuali LSM maupun ormas lingkungan. Tanpa peningkatan kedudukan, posisi tawar (*bargaining position*) LSM akan tetap lemah. Akibatnya kejadian-kejadian seperti diungkapkan diatas akan senantiasa terulang.

Langkah-langkah peningkatan peran tersebut mestinya diupayakan sendiri oleh LSM maupun ormas lingkungan. Karena kemungkinannya sangat kecil sekali bila mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Menurut Dr.Ir. Haryadi,M.Sc.,Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta.pembentukan partai hijau *(Green Party)* sebenarnya dapat dijadikan alternatif memperjuangkan lingkungan, disamping kemungkinan yang lain tentunya.

Partai hijau, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan partai-partai politik lain. Faktor yang membedakan antara partai politik dengan partai hijau terletak pada isu yang akan diangkat. Atau dengan perkataan lain partai hijau secara khusus hanya akan memperjuangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Peluang terbentuknya partai hijau sendiri sebenarnya cukup besar. Apalagi di Indonesia tidak kekurangan pecinta lingkungan, baik yang berasal dari kalangan LSM, mahasiswa pecinta alam, maupun individu-individu yang peduli akan masalah ini.

"Sebaiknya dibentuk partai hijau karena merupakan persoalan penting dalam politik kita. Orang yang tertarik pada persoalan-persoalan lingkungan cukup banyak. Soal kebakaran hutan, pencemaran udara, pencemaran sungai, persoalan polusi perkotaan, saampah dimana-mana, itu. merupakan persoalan yang nyata dalam kehidupan", ungkap Rizal Panggabean, pengamat politik dari Fisipol UGM..

Selain itu, sumber alam yang sangat besar dan beranekaragam ini perlu untuk dijaga kelestariannya. Tanpa adanya langkah-langkah yang serius dan terpadu rasanya terlalu sulit untuk mengamankan kekayaan ini. Dengan bergerak secara sendiri-sendiri seperti yang telah dilakukan oleh LSM maupun para pecinta alam selama ini, terbukti sekali kurang efektif. "Musuh besar" yang kita hadapi sekarang ini hanya bisa dihadapi dengan bersatunya para pecinta dan orang-orang yang peduli akan masalah alam ini. Di sinilah partai hijau bisa dijadikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan bersama, yakni terselamatkannya lingkungan dan alam ini.



ISTIMEWA

KTT Bumi+5
Serius di tingkat dunia, tidak di Indonesia

Harus diakui bahwa pada saat Soeharto berkuasa, pembentukan partai baru merupakan hal yang sangat tabu. Jangankan upaya pembentukan partai, sekedar gagasan saja akan bisa dituduh subversi.

Tapi tak berminat

Alam kebebasan yang sedang melanda Indonesia ini dimanfaatkan betul oleh para politisi untuk *latah* mendirikan partai politik. Isu maupun ideologinya beraneka ragam. Ada partai demokrasi, partai agama, partai etnik, partai gender dan masih banyak lagi. Yang agak mengherankan, partai-partai yang berdiri tersebut ternyata sampai sekarang tidak ada satupun yang secara khusus memperjuangkan nasib lingkungan.

Walhi sebagai LSM besar yang bergerak dalam bidang lingkungan ternyata memang tidak berpikir ke arah pembentukan partai hijau. Walhi, seperti yang dikatakan oleh Arimbi, tetap mempertahankan dirinya sebagai LSM dengan memposisikan sebagai *pressure group*. Selain itu, Walhi juga lebih tertarik dengan cara-cara mengkonsinyasikan ide-ide ke berbagai kalangan yang tertarik atau bersangkutan dengan masalah-masalah lingkungan

"Dari pada saya mendirikan satu partai yang nggak jelas massanya lebih baik saya jualan ide. Mau siapa yang membawa bendera saya nggak peduli", tuturnya.

Senada dengan Arimbi, Emil Salim, mantan menteri lingkungan hidup, berpendapat bahwa sebaiknya semua partai hijau (berwawasan lingkungan-red), jangan hanya satu partai yang hijau, prinsip lingkungan harus dianut oleh semua partai.

Memang idealnya semacam itu. Tetapi hal yang harus kita ingat, bahwa dengan menitipkan isu atau ide ke pihak lain, resiko yang dihadapi adalah ditolaknya ide-ide tersebut dan ini berarti, tidak ada lagi yang memperjuangkannya.

WWF (World Wide Fund) yang merupakan LSM kelas dunia rupanya lebih memilih cara " bekerjasama" dengan pemerintah. "Merangkul musuh" itulah istilah yang digunakan oleh WWF. Cara tersebut ternyata menjadi bumerang. Karena WWF seperti tidak berdaya ketika melihat



ISTIMEWA

Dr. Haryadi, M. Arch
Ketua PPLH UGM

hutan-hutan Kalimantan membara.

Walaupun diakui bahwa masalah lingkungan sangat berhubungan dengan masalah politik, tetapi "WWF sudah wanti-wanti kepada kita untuk tidak bergerak dalam bidang politik, karena memang misi WWF tidak kesitu," kata Westiani Agustin Sekertaris Kerabat WWF DIY-Jateng.

Dalam kasus semacam ini, langkah yang ditempuh oleh kerabat WWF DIY-Jateng hanya dengan membuat peta kebakaran hutan. Berdemo pun mereka tidak diperbolehkan oleh WWF Jakarta.

Sampai sekarang, partai hijau (*green party*) baru berdiri di beberapa negara Eropa, di antaranya Jerman. Keprihatinan atas nasib lingkungan dan keinginan menyelamatkan lingkungan itulah motivasi mereka. Keprihatinan ini dipicu oleh sistem kapitalisme yang dianut negara-negara Eropa Barat. Sistem kapitalisme yang selalu bertumpu indutri untuk menghasilkan barang dalam jumlah besar (product mass). Mau tak mau sumber daya alam terkuras. Akibat lain dari munculnya industialisasi adalah pencemaran lingkungan yang sangat berbahaya terhadap keberlangsungan hidup kita.

Padahal, "Akibat yang ditimbulkan dari kapitalisme perkoncoan (crony capitalisme) seperti yang terjadi di Indonesia lebih berbahaya dari apa yang terjadi di Eropa," jelas Dr. Ir. Haryadi.

Maka sudah seharusnya bagi kalangan pecinta lingkungan di Indonesia, untuk berusaha lebih keras dalam penyelamatan lingkungan.

Bukan untuk menang

Pendirian partai politik merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan tujuan melalui parlemen (DPR). Ini berarti perlu adanya dukungan massa.

"Dengan pendirian partai hijau, aspirasi siapa yang ditampung?, Pendirian partai butuh dukungan massa yang riil, bukan diawang-awang", ungkap Arimbi. Alasan ini jugalah yang membuat Wahli enggan untuk mendirikan partai hijau.

Menanggapi hal ini, Rizal Panggabean, memberikan komentar "Saya kira tidak harus (dukungan massa-red), ketika kita mendirikan suatu partai, tujuan kita tidak harus untuk mendapatkan kursi di parlemen, DPR dan MPR apalagi untuk sebuah partai lingkungan."

Menyimak pengalaman di Eropa, partai hijau di sana tidak pernah memperoleh hasil mayoritas di parlemen. Perolehan kursi di parlemen hanya didapat ketika isu lingkungan sedang hangat. Seiring meledaknya reaktor nuklir di Cyernobil dan di Bopal pada tahun '80an. Ketika itu partai hijau menemukan momentumnya untuk mendapatkan kursi.

"Kalau kita melihat sejarah, bukan partai berbendera lingkungan yang memenangkan pemilu. Sebagian besar memang tidak peduli untuk memenangkan pemilu. Dengan menjadi partai kecil, justru memungkinkan partai ini melakukan fungsinya sebagai partai penekan. " kata Rizal lebih jauh.

Ia juga menambahkan bahwa, partai dengan isu tunggal (partai hijau-red) datang untuk menyuarakan suatu gagasan. Karena dengan berbentuk partai, maka kesempatan untuk ikut serta dalam kampanye pemilu dimungkinkan.

Rizal Panggabean, juga menekankan bahwa keberhasilan partai hijau sebagia suatu gerakan, dapat di lihat dengan disuarakannya isu lingkungan oleh partai-partai besar. Hal demikian dapat dijumpai di Jerman, Skandinavia, maupun di AS.

Pendapat yang berbeda diberikan oleh Dr.Ir. Haryadi, M.Arch. Menurutnya hal yang harus dicatat oleh semua pecinta lingkungan adalah pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah lingkungan. Proses ini bisa berjalan



REPRO: KOMPAS

Sarwono Kusumaatmaja

dengan baik ketika pendidikan di tingkat masyarakat sudah baik. Termasuk usaha penyadaran atas pengelolan dan pemanfaatan alam dan lingkungan.

Masih menurut Ketua Pusat Studi Lingkungan ini, institusi untuk melakukan kerja-kerja itu lebih tepat dilakukan oleh para LSM, kelompok pecinta lingkungan, dan pusat-pusat studi yang ada di berbagai universitas, maupun individu-individu yang peduli akan permasalahan lingkungan.

"Jika sudah berbentuk partai politik, biasanya geraknya menjadi tidak bebas lagi karena sudah terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, apalagi jika sistem politiknya masih seperti yang dulu (orde baru-red), maka pembentukan partai politk juga tidak banyak membantu," tambahnya.

Mengenai hal ini, Sarwono Kusumatmaja mantan menteri KLH berpendapat, "Ya, harus ada kampanye untuk menciptakan pembuktian bahwa pertimbangan itu punya manfaat jangka pendek. Dulu kita selalu bilang pertimbangan lingkungan mempunyai manfaat jangka panjang, karena dengan demikian kita memikirkan generasi berikut. Nah sekarang orang mikir ini hari, mesti makan besok, pertimbangan lingkungannya apa?. Jadi semua pendekatan harus berubah.

Tarik menarik antara pendirian partai hijau atau alternatif lain yang lebih efektif untuk menyelamatan lingkungan sedang terjadi. Perbedaan pendapat menjadi hal biasa, seiring dengan bertiupnya angin kebebasan di negeri ini. Harapan akhir dari semua perdebatan itu adalah kelestarian lingkungan Indonesia.❐

Dedy Sushandoyo

Murah Tapi Belum Menggantikan

Kondisi saat ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk kembali mengkonsumsi obat-obat tradisional. Sayangnya, obat tradisional belum mampu menggantikan efek medis obat modern. Dilema ini makin diperburuk dengan mahalnya obat-obat modern.

Bisakah Anda bayangkan, jika satu kaplet obat pusing, yang semula dapat dibeli dengan empat ratus rupiah, kini dengan jumlah rupiah yang sama hanya didapat satu tablet saja?

Kenyataan inilah yang kemudian membuat masyarakat kembali beramai-ramai "melirik" obat-obat tradisional sebagai alternatif.

Ironisnya, menurut **Subagus Wahyuono, Apt. Ph.D.** dari Pusat Penelitian Obat-obat Tradisional UGM, masyarakat kita sebenarnya belum mengerti sepenuhnya tentang obat-obat tradisional, khususnya masalah aktivitas obat tradisional.

Jika masyarakat kembali pada obat-obat tradisional, hal ini bukan sebagai tingkat pemikiran yang *back to nature* melainkan karena kondisi perekonomian yang menyulitkan untuk membeli obat modern.

Sama tuanya dengan kehidupan

Pengobatan dengan menggunakan obat tradisional bermacam-macam. Antara lain dengan pengobatan supra natural, pengobatan dengan menggunakan alat misalnya urut atau pijat dan akupuntur serta pengobatan dengan menggunakan tanaman obat.

Secara turun menurun, penggunaan tanaman obat (ramuan berkhasiat) sudah digunakan masyarakat kita sejak abad 17. Bahkan literatur barat menyebutkan pengobatan tradisonal berlangsung sama tuanya dengan kehidupan manusia di bumi.

Keunggulan obat tradisional dibandung dengan obat-obat modern adalah sebagai berikut;

Yang pertama, harganya murah dan mudah didapat. Bahan obat tradisional dapat ditanam dalam rumah atau tempat yang tidak produktif.


ISTIMEWA

Ramuan obat tradisional:
tidak memiliki toksinitas yang berarti

Kedua mempunyai aktifitas yang bermacam-macam. Di dalam bahan obat tradional terdapat banyak sekali senyawa yang masing-masing kemungkinan memberikan aktifitas farmakologi sendiri-sendiri, bahkan memungkinkan saling menutupi atau menghilangkan efek samping yang diakibatkan oleh komponen-komponen senyawa. Dikenal dengan istilah *side effects eliminating subtances.* Hal ini juga disebut sebagai filosofi obat tradisional. Bahwa di dalam tanaman obat terkandung substansi-substansi yang dapat menghilangkan efek samping dari senyawa aktif yang terdapat dalam obat tradisional.

Selanjutnya, dalam obat tradisional tidak mempunyai toksinitas yang berarti. Selama ini belum ditemukan keracunan akut yang disebabkan oleh obat tradisional. Namun, dalam penggunaan obat tradisional yang terus menerus, keracunan kronis (penggunaan yang terus menerus, dosis berlebihan dan dalam waktu yang sangat lama) harus tetap diperhatikan.

Namun selain keunggulan yang dimiliki oleh obat tradisional, salah satu kelemahan dari obat tradisional adalah bahwa bahan obat tradisional belum distandarisasi secara sempurna, misalnya mengenai kandungan senyawa yang terdapat di dalamnya.

Pemanfaatan sumber daya alam

Di berbagai daerah di Indonesia, aneka macam empon-empon dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit.

Namun sayang, sejauh ini menurut Subagus, pemberdayaan sumber daya alam tersebut belum banyak dilakukan. "Di GBHN itu dituliskan

Pemerintah akan menggali kekayaan alam untuk obat tradisional, mengembangkan dan kemudian membawa ke forum-forum internasional. Sejak dari dulu. Tapi saya rasa sampai sekarang belum ada *leading*-nya".

Sementara itu menurut **dr. Budiono Santoso,DSFK**,Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Farmakologi Kedokteran Umum UGM, pengembangan obat tradisional saat ini masih dalam lingkup penelitian-. " Pelayanan obat tradisional itu meskipun banyak, seolah-olah tidak ada strukturnya. Di India ada *Alternative Medicine*, sedangkan kita tidak "

Obat tradisional versus obat modern

Dibandingkan dengan obat modern, Subagus mengemukakan bahwa aktifitas obat tradional memang memakan waktu yang lama.

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan efek medis diantara keduanya. Obat -obat modern biasanya sebagai obat tunggal." Dalam satu tablet misalnya untuk obat pusing itu ada *antalgin* atau *paracethamol*. kalau obat flu campurannya bisa tiga atau empat. tetapi kalu obat tradisional, isi kimiawinya banyak sekali. dalam daun saja isi bisa berpuluh-puluh dan kita tidak tahu apa isi di dalam daun-daun tersebut " papar Subagus.

Contohnya, obat modern untuk pegal linu (*rheumatik*) yang sering digunakan adalah *ibuprofen, sodium diklofenak, dsb,* waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut membutuhkan waktu berkisar 30 menit. Tetapi tidak demikian halnya dengan obat tradisional untuk pegal linu. Waktu yang dibutuhkan lebih dari 30 menit, walaupun intensitasnya relatif sama tinggi dan toksinitas akutnya akan lebih banyak kemungkinan terjadi pada obat-obat modern dibandingkan dengan obat tradisional.

Berkaitan dengan hal ini, ada dua hal yang perlu menjadi catatan. Pada obat modern efek kimianya cepat tetapi juga memiliki efek samping yang jelas dibandingkan dengan obat tradisional " Misalnya seperti *paracetamol*. Kalau mengkonsumsi *paracetamol* terus menerus, liver seseorang bisa terkena dampaknya" tambahnya.

Sedangkan dalam obat tradisional. walaupun efek kerjanya lambat tapi efek sampingnya bisa dikatakan tidak ada. Dalam beberapa hal misalnya untuk penjagaan, penggunaan obat tradisional jauh lebih menguntungkan.

Efek negatif yang terkandung dalam obat tradisional sejauh ini belum banyak survey yang mengarah ke hal tersebut.Berangkat dari kurang terlihatnya efek negatif oleh obat tradisional, maka jamu kemudian dijual dengan bebas.

Sayangnya, hal tersebut digunakan oleh sebagian kelompok orang dengan menjualnya tanpa


ISTIMEWA

Subagus Wahyuono, Apt. Ph.D

mendaftarkan lebih dahulu ke departemen kesehatan. Terkadang ungkap Subagus, untuk jamu macam itu banyak yang ditambah dengan kimia yang lain. Padahal untuk jamu tidak boleh ada campuran kimiawi apapun .

Belum bisa menggantikan

Masalahnya sejauh mana obat tradisional dapat menggantikan obat-obat modern yang harganya melangit. dan sejauh mana obat tradisional dibutuhkan masyarakat .

Banyak pendapat mengatakan obat tradisonal belum bisa menggantikan obat modern.

Menurut Dr. Budiono Santoso, Kepala PPFSK Kedokteran Umum UGM, orang yang menggunakan obat tradisional tujuannya hanya untuk menjaga kesehatan. " Alternatif untuk ke bahan alam yang bisa diterima karena harganya relatif murah dan efek sampingnya minim. Tetapi berbeda dengan jamu jika beralih harganya belum tentu murah, khasiat belum tentu terjangkau dan efeknya tidak jelas " jelasnya.

Budiono menambahkan sebenarnya obat bahan alam akan lebih pada fungsi menggantikan placebo obat modern. Misalnya banyak keluhan pada penyakit ringan yang sembuh dengan efek placebo obat modern. Segmen ini yang akan terpengaruh tapi untuk segmen vital tidak banyak berpengaruh.

Hal senada juga diungkapkan oleh Subagus berkaitan dengan belum dapatnya obat tradisional menggantikan obat modern.

"Saya kira memang belum bisa menggantikan karena sentra penelitian obat-obat tradisional belum tuntas membuktikan efektifitasnya" kata Subagus.

Berkenaan dengan hal itu, pada akhirnya akan dicapai kesepakatan bahwa kepentingan akan obat modern masih diperlukan oleh masyarakat. Namun, kondisi perekonomian saat ini menuntut industri farmasi (obat modern) di Indonesia untuk menaikkan harga di pasaran. Belum lagi sistem farmasi Indonesia yang ternyata masih sangat rentan terhadap goncangan global, saat konsumsi obat semakin meningkat industri dihadapkan pada setting industri farmasi yang lebih kompleks yaitu jenis industri farmasi yang hanya berkategori formulasi, sangat bersifat hilir dan menggantungkan seluruh bahan bakunya kepada impor.

Memang demikian sulit keadaannya. Di satu sisi obat tradisional belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menggantikan obat-obat modern. Di sisi lain, mengkonsumsi obat-obat modern memberatkan masyarakat karena melambungnya harga.

Menurut Budiono antara dunia obat tradisional dan modern memang sudah sangat lain. "Ada keterpisahan yang jelas. Pelayanan obat tradisional itu meskipun banyak seolah-olah tidak ada strukturnya. sangat susah untuk memasukkan ke dalam sistem karena memang berbeda."

Aprilina Prastari
Bekti Dwi Andari

Pentas Musik Perkusi
Djaduk Ferianto
Purnabudaya, Yogyakarta,
6 Juli 1998

Kompi Susu:

Radikalisme Refleksif Pasukan Kompi

Gelombang reformasi memang tak lagi se-marak beberapa waktu yang lalu. Hari-hari kita, perlahan kembali pada rutinitas biasa. Selebihnya, masing-masing dari kita mulai membenahi diri dan siap pergi ke ladang, kampus, kantor, pantai, ke pusat hiburan, ke pasar, ke mall - meski dengan meninggalkan kekecewaan atas ketidakrasionalan harga, bahkan yang lainnya sudah ada yang bersiap-siap pergi berlibur ke luar negeri tanpa ganjalan. Pendeknya gulungan gelombang seolah sampai ditepi pantai yang siap mereda.



Reformasi, agaknya menjadi dongeng rakyat yang menyisakan ribuan gantungan angan di awang. Rakyat diberi kebebasan luas untuk mengurai tanya, bermain dengan apresiasi masing-masing, ramai-ramai menterjemahkan artinya dalam logika pas-pas-annya. Ada juga yang cuek, dan sebagian lagi ada yang merasa diombang-ambingkan gelombangnya. Satu lagi, beberapa dengan rela membereskan puing-puing gemanya. Benar-benar sebuah drama sebabak yang masih menyisakan episode panjang, yang memerlukan garapan sutradara beserta krunya yang handal. Kendati demikian, kerja keras mereka bakal tidak ada artinya jika kelak, episode yang digarap tidak dinikmati oleh konsumennya.

Setidaknya ini diingatkan oleh Djaduk lewat repertoar musikal berlabel "Kompi Susu" di gedung kesenian Purna Budaya, bilangan Bulaksumur, Senin (6/7) serta di Pekan Raya Jakarta (PRJ) (10/7)lalu.

Mengisahkan pasangnya gelombang reformasi sekitar awal tahun 1998 yang memuncak pada 23 Mei dengan menggulung si aktor, Soeharto. Namun, selain itu masih juga menyisakan kepahitan dihati sang rakyat. Sedikitnya itulah yang dirangkum Kompi Susu.

Pertunjukkan teater musikal yang amat lugas menggunakan bahasa seni musik ini didominasi bunyi bunyian bakiak dan olah vokal yang menakjubkan. Sejak pertama hingga pertunjukkan berakhir banyak mengundang tawa penonton yang berjubel.

Pertunjukkan ini jelas mengemas sebuah ironi kehidupan masyarakat Yogyakarta beberapa waktu silam. Saat itu, - seperti ide awal produksi Kompi Susu, sang komandan kompi berada ditengah-tengah massa yang menginginkan turunnya penguasa rejim Orde Baru, Suharto. Ribuan mahasiswa yang bergabung dengan rakyat memenuhi jalan-jalan yang dipagar betisi aparat. Dan saat itu pula, ia hampir saja menjadi korban tindakan represif aparat. Tampaknya peristiwa ini sangat lekat hingga memunculkan gagasan yang apik lewat Kompi Susu.

Ide yang baik memerlukan penyajian yang baik pula. Ia harus enak didengar dan tentu saja sedap dipandang. Itu sebabnya Djaduk memilih sembilan pasukan Dalmas (pengendali massa-POLRI) dengan ia sendiri yang berlaku sebagai komandan kompi. Dengan busana dan asesoris aparat yang lengkap, dipilihnya bakiak, kaus kaki sepak bola, topi berumbai sebagai helm, senapan kayu, serta perisai sebagai ornamennya. Hingga persis seragam pasukan Dalmas yang sebenarnya.

Pertunjukkan perkusi yang dominan dengan teriakkan pasukan serta gertak bakiak ini, semakin menarik dan variatif saat dipadu dengan potensi alat musik lainnya seperti bedug, simbal, gendang yang kemudian masih dikombinasikan lagi dengan *synthesizer*.

Sungguh, merupakan tontonan yang mencoba merefleksikan gebalau demonstrasi dengan gebugan anyaman rotan pasukannya yang didaratkan pada sehelai kasur sebagai sasarannya.
Begitu Djaduk memberikan aba-aba "Pasukan serbu..!!!", maka dengan serta merta pasukannya berbagi tugas "Bug,..bug..bug..!!", melepaskan tembakan "Threthek.. thek..threk...!", sampai menyemprotkan pengharum ruangan sebagai gas air matanya. Mereka menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perintah sang komandan, ditingkahi bentakan,"Sana bilang rektormu sana!"

Sementara itu tata panggung didominasi warna hitam dan tampak dua berikade pagar kawat berduri yang dipasang pada sisi bagian belakang panggung, dan seorang berbusana hitam-hitam yang memainkan *synthesizer*. Suasana seolah terdramatisir lagi ketika tata cahaya dan gaung musik mampu membangkitkan kenangan, emosi bahkan luapan perasaan haru penonton yang sejenak terbawa pada pertengahan bulan Mei 1998 lalu.

Kompi susu, seolah sejenak memutuskan hubungan waktu penontonnya, kemudian membawanya ke masa lalu, hari yang penuh gelombang demonstrasi dan mimbar bebas, selama setengah jam.

Memang, ketika penembakan, pembunuhan, penculikan kejahatan lainnya tidak lagi menjadi sesuatu yang mengerikan dan membangkitkan rasa sedih atau sadis, Djaduk dengan Kua Etnikanya mengolah menjadi lain. Ia masih percaya bahwa kekuatan simbolik kesenian mampu merefleksikan realitas sosial melalui energi estetika yang tertuang dalam fragmen demi fragmen disetiap pentas seni yang bertema sastra politik.❐

Irma Hidayana

REKONSTRUKSI SISTEM KEKUASAAN

Judul buku : Menggugat Politik Orde Baru
Penulis: Syamsudin Harris

Penerbit : Grafiti Utama, Jakarta 1998
xii + 348 halaman

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru setelah tiga dekade mengkooptasi kebebasan kehidupan politik di negeri ini, merupakan wacana menarik di tengah gelombang reformasi dan demokratisasi. Agenda reformasi politik yang semakin nyaring didengungkan dan disuarakan oleh masyarakat seolah menemukan momentumnya. Apalagi lampu hijau yang telah diberikan oleh pemerintah mendorong DPR supaya memberdayakan hak-hak inisiatifnya, semakin menyemarakkan proses politik menuju perubahan. Lebih jauh lagi, turunnya Soeharto akibat tekanan krisis yang berkepanjangan menjadi awalan sekaligus semakin menyadarkan bahwasanya rekonstruksi sistem politik dan kekuasaan memang signifikan untuk segera dilaksanakan, mengingat stabilitas pembangunan yang menjadi jargon politiknya semakin menampakkkan kerapuhannya. Disamping itu, sentralisme kekuasaan yang dijadikan panglimanya secara berangsur-angsur terpuruk hingga menjelmakan suatu krisis kepercayaan yang menghantarkan masyarakat pada jurang kehancuran.

Dalam paradigma ini secara jelas terkuak, bahwa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi selama ini, dikembangkan dalam sebuah mekanisme politik yang absolut. Konsekuensinya, tatanan politik sekarang tidak memungkinkan terciptanya koreksi mendasar dan konsisten melakukan fungsi kontrol publik bagi rakyat secara fair dan demokratis. Pada akhirnya, kondisi ini menganulir setiap ide tentang reformasi yang hendak meninjau kembali format politik Orde Baru, karena selalu dianalogikan sebagai pembuat makar serta inkonstitusional

Dilandasi oleh keprihatinan yang mendalam terhadap struktur dan tatanan politik Orde Baru itulah, Syamsudin Haris menggugatnya secara kritis terhadap pelaksanaan hegemoni negara yang kian lepas kendali dalam mengebiri kedaulatan rakyat. Dengan melandaskan pada legalisasi UU politik, yang cenderung mengabdi pada kekuasaan, memasung kepentingan rakyat serta bersifat represif, penulis mengangkatnya dalam lima tema aktual. Pertama, dampak distorsi kebijakan pembinaan politik yang menimpa PPP dan PDI. Kedua, substansi pemilu-pemilu Orde Baru yang tidak pernah berubah. Ketiga, birokrasi Golkar yang diskriminatif, arogan serta mengagungkan kekuasaan. Keempat, dilema DPR/MPR dan implikasinya bagi proses suksesi dan terakhir urgensi demokratisasi dan reformasi politik Orde Baru.

Selanjutnya, peneliti LIPI ini juga melihat format pemilu selama kekuasaan Orde Baru secara sistematis didesain untuk memenangkan Golkar, sehingga tak memberikan peluang bagi dua kontestan lain dalam mengimbanginya. Dengan kata lain, secara gamblang dipaparkan bahwa PPP dan PDI bukan menjadi partai minoritas. Lebih dari itu, keberadaaan keduanya pun sekedar menjadi aksesoris demokrasi karena secara sistematis dijauhkan dari proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang memberdayakan. Implikasinya, kualitas dan keberdayaan DPR-DPR hasil pemilu Orde Baru terus merosot integritasnya dalam merespon serta mengakomodasikan kepentingan rakyat.



Dengan demikian, memang tak dapat disangkal bahwasanya kehidupan politik yang bebas dan demokratis semakin jauh dari harapan. Selain "diskriminasi" politik masih menjadi acuan serta dipertahankan, mekanisme politik-pun telah direduksi sedemikian rupa demi kepentingan kekuasaan belaka. Maka, sangatlah beralasan kalau akhirnya penulis menyimpulkan bahwasanya DPR merupakan institusi demokrasi yang berwajah *illusive* serta *impossible*. Dikatakan "*illusive*" karena elit politik yang diorbitkan partai di DPR sebenarnya mewakili kepentingan pemerintah dibandingkan kepentingan rakyat, sedangkan *impossible* karena sesudah terpilih menjadi anggota dewan dengan mudahnya menjadikan kepentingan oligarkhis seolah-olah merupakan kepentingan rakyat. Akhirnya *lengser*-nya Soeharto dari kekuasaan hendaknya mampu kita sikapi dengan cerdas sebagai prasarat terbentuknya *civil society* yang tangguh. Bagaimanapun juga, akhir dominasi rezim Orde Baru ini barulah awalan menuju terbentuknya tatanan baru kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak pada *euphoria* politik dan demokrasi seperti teraktualisasikan belakangan ini, karena sesungguhnya kekuatan Soehartoisme masih cukup dominan sekalipun sistem politik yang dibangunnya telah mengalami kebangkrutan serta dilikuidasi oleh kekuatan dan gelombang reformasi.❑

Ancas W Jati
mahasiswa FE-UGM

Selalu Terperdaya oleh Negara

Judul buku : Wartawan Terpasung
Penulis: Lais Abid, Prabowo, Togi Simanjutak

Penerbit : Institut Studi Arus Informasi, Jakarta,1998
xii + 126 halaman

PWI, organisasi wartawan ada seumur negara. PWI menjadi bagian sejarah dari tumbuhnya pers di Indonesia, memainkan perannya yang dominan dalam setiap gerak perkembangan pers Indonesia. Dalam berbagai metamorfosisnya, kegoncangan, dan keharusannya untuk berkorporatis dengan negara telah menjadikannya tetap *survive* dalam segala macam kondisi politik. Sejarah mencatat nama PWI tetap ada, tetapi soal wujud, tabiat, tujuan yang selalu berubah pada tiap penggal kisah hidupnya.



Buku tipis, 126 halaman ini membeberkan beberapa parameter di atas. Lebih tegas lagi mencoba membahas akan pentingnnya peran negara menjadikan PWI tak bisa lepas dari negara sebagai faktor dominan yang menentukan perjalanan organisasi pers ini. Secara khusus pula buku ini menempatkan negara sebagai determinan dalam penulisannya. Hingga tak heran dalam tiap-tiap bab negara selalu menempati porsi yang besar dalam mempengaruhi, dan memperdayai PWI. Memang berbeda dengan buku-buku sejenis beritme datar dan tidak meletakkan negara sebagai aktor dominan. *Wartawan terpasung* terlihat begitu ingin menunjukkan peran negara yang begitu besar dalam upaya menekan pers.

Pada awal berdirinya PWI tahun 1946, Republik Indonesia muda memang telah mulai mengintervensi bahkan mengsubordinatkan PWI. Tetapi saat itui masih bisa dimaklumi karena untuk tujuan mulia yaitu kemerdekaan. PWI memang lahir dari revolusi kemerdekaan, bahkan diceritakan dalam kongres wartawan pertama yang dimuat dalam surat kabar Merdeka 11 Februari 1946, *".. tidak hanya membawa pena, tapi juga menyandang senjata seperti pistol, golok, kelewang, keris dan belati. Ada yang mengenakan seragam Gurkha dan banyak pula yang bercambang lebat dengan rambut gondrong hingga sebahu."* (hal.15). Awal yang revolusioner itu juga ditandai dengan janji pemerintah untuk memberikan kebebasan pers, sebagai suatu konsep mutlak.

Kemesraan itu ternyata semu, ketika demokrasi liberal berlangsung, negara mulai mencari bentuk pengendalian yang tepat, tahun 1952 Sekjen Kementerian Penerangan Roeslan Abdulgani memukul genderang pengendalian dan pengawasan melalui sebuah artikelnya. Konflikpun terjadi dan ada perlawanan dari para wartawan ,agaknya negara selalu berada di atas angin.

Dalam era selanjutnya represi negara terhadap institusi negara semakin diverbalkan. Pemahaman selama ini bahwa pengekangan itu selalu dihubungkankan dengan aktor tunggal Soekarno dijungkirbalikkan oleh penelitian dalam buku ini, karena ketika keadaan darurat perang berlangsung militer juga mengambil peranan besar dalam memberangus pers, lewat Penguasa Perang Daerah (PPD), militer bertindak sebagai "raja-raja kecil" di wilayahnya masin-masing.

Sementara itu mudah ditebak PWI tak begitu bisa berbuat banyak bahkan cenderung mendukung upaya pemberangusan pers oleh negara. Sebagai organisasi pers, PWI Cenderung bersikap kompromis, dan memasukkan dirinya ke dalam kotak Pandora yang disediakan negara. Inilah masa ketidakberdayaan PWI yang tak kuasa menolak intervensi negara melalui aparatus koersifnya. (hal.51).

Di sinilah buku terbitan ISAI ini mulai menemukan bentuknya, melalui pendekatan investigatif terhadap saksi-saksi sejarah waktu itu, buku ini menjadi layak pula secara metodologis.

Memasuki kisah orde baru yang romantis awalnya, PWI menemui nasib sama, kalau tak mau dikatakan lebih buruk. Diawali dengan pembersihan wartawan yang berbau komunis secara sistematis. Pemerintah juga secara jeli memfasilitasi PWI dan membawa PWI ke dalam kontrolnya. Pemerintah kemudian hanya mengakui PWI sebagai satu-satunya wadah organisasi wartawan Indonesia. Korporatisme PWI dengan negara mencapai puncaknya ketika Harmoko menjadi menteri penerangan. Ia kerap mengeluarkan keputusan yang kontroversional, mulai dari pencabutan SIUPP ataupun upaya Golkarisasi di tubuh PWI yang sangat kentara.

Pada bagian akhir, dijelaskan bahwa politik pengendalian negara dapat berjalan hingga orde baru, karena basis materialnya yaitu struktur masyarakat pasca kemerdekaan sedikit banyak tetap sebangun seperti masa kolonial. Ketika *crony capitalism* pada rejim Soeharto ditasbihkan pengendalian itu mencapai kesempurnaanya, pengendalian tidak saja melalui perangkat politik tapi juga kekuatan modal yang berada di institusi pers itu sendiri.❑

Hery Trianto

Dalam Euphoria dan Miopia Reformasi


HERY

Budi Irawanto
Peneliti pada Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan asisten dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM.

Kamis Legi, 21 Mei 1998, berita bagus muncul di televisi: Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya. Maka kekuasaan kukuh 32 tahun itupun runtuh. Inilah klimaks dari kekisruhan ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak paruh akhir tahun 1997. Rubuhnya kekuasaan Soeharto, juga menandai berakhirnya salah satu kekuasaan tiranik terlama dan yang masih tersisa di Dunia Ketiga.

Tiba-tiba, rakyat seperti merasakan kelegaan yang luar biasa dan seakan sebuah ufuk baru telah terbit. Sistem politik otoriter telah dimakzulkan. Meski keabsahan peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie dipertengkarkan sejumlah kalangan, toh momentumreformasi itupun terjadi jua.

Tak ayal, sebentuk *euphoria* menjangkiti rakyat: keterpukauan terhadap perubahan sesaat. Ada perayaan yang baru saja merekah. Maka, merebaklah pelbagai partai politik yang mengusung aneka aspirasi dan kepentingan. Para tahanan politik dan narapidana politik di bebaskan, UU politk ditinjau, dan *beleid* yang membatasi kebebasan pers dicabut. Dengan kata lain, konsesi-konsesi politik memang banyak diobral oleh pemerintahan baru. Masyarakat pun kian lantang menagih komitmen ABRI terhadap demokratisasi.

Di lapis bawah, terjadi kebangkitan terhadap penyelewengan kekuasaan pemerintah lokal yang selama ini hanya bisa muncul dari desas-desus dan gerutuan. Unjuk rasa menjadi trend, berita menuntut mundur pejabat desa, kecamatan, bupati, bahkan gubernur menjadi santapan tiap pagi di koran. Bahkan para petani yang pernah tergusur, tiba-tiba sangat berani menanami singkong di lapangan golf yang dulu dibangun anak Soeharto. Pendeknya pelbagai penyelewengan -yang kini populer dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan biang keladinya tengah dilibas.

Rentetan perisitiwa itu seakan melunasi kepengapan politik yang menggantung selama bersimarajanya rejim Soeharto. Udara politik kita memang relatif lebih segar, kendati masih saja dipenuhi berbagai kalangan elit yang memanfaatkan momentum ini. Barangkali, inilah warna khas percaturan politik kita: banyak menampilkan tokoh daripada pokok. Dunia politik kita memang bukan tempat bagi pengujian gagasan yang bernas, tapi sekedar pentas pentas segelintir tokoh. Karenanya sejak pemerintah baru terbentuk tak cukup jelas program apa yang telah dilakukan untuk memulihkan perekonomian nasional yang nyaris hancur lebur ini.

Disisi lain, gerak reformasi agaknya mengalami penurunan intensitas. Hingar bingar gerakan mahasiswa mulai menyurut. Episode gerakan heroik mahasiswa usai persis saat Soeharto *lengser* dari tahta kepresidenannya. Jika masih muncul gerakan, itu lebih sebagai bentuk kebingungan merumuskan agenda baru perubahan pasca Soeharto. Bahkan mahasiswapun telah perlahan ditinggalkan, yang banyak muncul di media justru "tokoh-tokoh lama" yang telah malih rupa. Mereka sekedar mengeraskan hujatan terhadap rejim yang telah rontok. Seakan-akan dengan begitu massa rakyat bakal menebus dosa-dosa politik mereka sendiri. Semacam penyucian diri dari kemungkinan menerima hujatan yang lebih keras dari massa rakyat.

Maka tak pelak, terjadi *miopia* atas proses reformasi kita. Reformasi seperti memberi legalitas bagi pelampiasan dendam politik. Ini, agaknya tercermin dari penggantian beberapa pejabat sipil dan ABRI, bahkan anggota MPR dari utusan golongan yang diangkat presiden. Para pejabat yang diangkat itu sesungguhnya hanyalah mereka yang kalah dan ada di luar lingkaran percaturan politik sebelumnya. Pentas politik hanya mengganti para aktor 'lama', tanpa pernah mengubah lakon yang dimainkan.


CUMA " PRIMATA", FIFI,SR

Bukan mustahil praktik politik lama tak sepenuhnya berganti, jika letak soalnya hanya dilihat pada penggantian tokoh.

Yang kemudian terasa kosong dari hiruk pikuk reformasi selama ini, visi tentang masa depan kita. Pelbagai proses perubahan yang berlangsung tak bersifat mendasar, -sebuah perubahan tanpa perubahan-. Gambaran tentang yang kita inginkan tak pernah jelas. Barangkali kita tengah di kutuk untuk tetap ada dalam perangkap sejarah masa lalu kita. Persoalan-persoalan yang berjangka pendek telah menguras energi politik kita habis-habisan. Tak pernah ada rekapitulasi tuntas atas cacat-cacat rejim lain. Karena itu, pemerintahan baru kita ini sesungguhnya tak pernah dibangun di atas landasan yang sepenuhnya "baru".

Sepanjang perjalanan bangsa kita, agaknya upaya-upaya

ekperimentasi demokrasi tak pernah memperoleh tempat. Malahan otoritarianisme yang ditopengi oleh keluhuran budaya kita diagungkan sebagai praktik politik khas milik bangsa kita. Dari waktu ke waktu rakyat kita dirampas kesempatannya belajar berdemokrasi. Pada masa rejim Soekarno, demokrasi yang terjadi telah diringkus menjadi "demokrasi terpimpin", dan pada masa rejim Soeharto, dimanipulasi menjadi "demokrasi Pancasila". Akibatnya, kita tak cukup berendah hati dengan beragam perbedaan, toleransi hanya menjadi nilai yang peyoratif belaka. Dalam keseharian, tak ada kesediaan kita mempraktikkan nilai toleransi. Buktinya betapa gampang terbakarnya masyarakat kita oleh isu, etnis, dan kesukuan. Reproduksi atas nilai-nilai "anti demokrasi" telah menular di kalangan massa rakyat.

Yang terjadi kini, kaum reformis terlampau berasyik-asyik dengan agendanya sendiri. Aliansi yang kukuh antar reformis sendiri tak kunjung terbangun. Masing-masing saling berebut menyampaikan gagasannya.

Demokrasi oleh para penguasa memang telah dilekati stigma sebagai gagasan Barat. Kontrol dan akuntabilitas atas kekuasaan senantiasa dimatikan. Sentralisme kekuasaan dipraktikkan sebagai kelaziman, bahkan menjadi kultur politik kita. Sebagian pakar hukum menemukan akarnya pada konstitusi kita. Konstitusi yang oleh para bapak pendiri bangsa dirumuskan dalam situasi darurat telah mengalami pensakralan: musykil dirubah. Padahal sesungguhnya, pasal-pasal dalam konstitusi kita memberi dalih bagi kekuasaan (presiden) menyelenggarakan praktik otoritarianisme.

Karena itu, tanpa keberanian untuk merubah konstitusi yang berpijak pada situasi yang tengah terjadi, momentum reformasi bakal kehilangan elan vitalnya. Reformasi lantas sekedar sirkulasi elite politik belaka. Tatanan masyarakat "baru" yang adil dan demokratis tak pernah nyata. Ini hanya mungkin jika konstitusi memberi jaminan hak-hak dasar rakyat, pembatasan terhadap kekuasaan atau setidaknya menjadikan kekuasaan tidak imun dari kontrol rakyat. Setiap proses perubahan berikut, semestinya didasarkan pada ketentuan konstitusi.

Kini malah ada isyarat cukup kuat bahwa kekuatan "rejim lama" tengah melakukan konsolidasi. Apalagi kaum reformis tak kunjung menemukan *common platform* yang mengacu pada masa depan bangsa. Atmosfer otoritarianisme memang tidak serta-merta pupus oleh proses reformasi. Kembalinya kekuatan otoritarian bukan sesuatu yang musykil. Pembelokan arah reformasi kita oleh kekuatan rejim lama kini kian kuat aromanya. Lewat pelbagai kanal media, reformasi didistorsi secara sistematis sebagai biang keladi mahalnya sembako dan bangkitnya separatisme. Tuntutan terhadap perubahan struktural yang radikal buru-buru dikecam.

Tantangan terbesar bagi kaum reformis adalah menyelamatkan arah reformasi agar tak berpulang pada tatanan yang anti demokrasi. Tanpa visi tentang masa depan bangsa, mustahil hal itu dilakukan. Yang terjadi kini, kaum reformis terlampau berasyik-asyik dengan agendanya sendiri. Aliansi yang kukuh antar reformis sendiri tak kunjung terbangun. Masing-masing saling berebut menyampaikan gagasannya. Tentu perbedaan pendapat dikalangan kaum reformis bukan perkara ganjil. Namun jika perbedaan itu tak pernah didialogkan, justru bakal menyemai perselisihan. Proses reformasi bakal mengalami pembalikan arah.

Muara dari ketiadaan visi masa depan jelas: kebangkrutan bangsa kita. Jika pilar-pilar demokrasi gagal ditegakkan, maka bangun masyarakat kita ringkih diterpa guncangan-guncangan. Masyarakat kita yang pluralistik kian gampang pula mengalami keretakan. Sekali lagi, ini jika sejarah kita perlakukan sebagai himpunan trauma, dan kita tak pernah mencoba berdamai dengannya.❒



DOK. BALAIRUNG

Achmad Charis Zubair
Dosen Fakultas Filsafat UGM

Pancasila: Ideologi dan Tercabiknya Nilai

Pada era reformasi ini, pertanyaaan dan pernyataan tentang Pancasila dan relevansinya sebagai ideologi bangsa dan negara terungkap kembali. Pernyataan dan pertanyaan itu sangat wajar, apalagi mengingat selama ini Pancasila sering terhenti menjadi slogan dan nihil pada kenyataan. Pada zaman Orde Lama, Bung Karno pada akhir masa jabatannya dianggap melanggar Pancasila dan UUD 1945. Pada zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, dimana ada tradisi penataran P-4, ada asas tunggal.Serta, upaya perluasan peran dan fungsi Pancasila tidak sekedar sebagai dasar ideologi bangsa tetapi juga sikap moral bangsa, penyelewengan nilai-nilai Pancasila malah menjadi-jadi. Kendatipun dengan adanya contoh keruntuhan rejim penyeleweng Pancasila, saya justru mendapat kesan betapa "saktinya" mahakarya para pendiri republik ini.

Ideologi itu sendiri merupakan gagasan dasar dari sebuah komunitas bangsa berdasarkan pandangan hidup dan pengalaman empiriknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak dapat disangkal, bahwa setiap bangsa dan negara harus memiliki dan mengembangkan sebuah ideologi. Rapuh dan tegarnya suatu bangsa dan negara amat ditentukan oleh kekuatan sebuah ideologi dalam menghadapi tantangan dan ujiannya.



ATAS NAMA IDEOLOGI: TITIK

Idealitas suatu ideologi mengandung nilai universal yang bermakna dapat diterima dan sesungguhnya kalau mau dapat diterapkan di belahan bumi manapun, dalam kurun waktu kapanpun oleh siapapun bangsa di dunia ini. Ada tiga nilai universal yang bersifat umun, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Ketiganya berangkat dari fungsi kodrati manusia yang bersifat umum.

Pancasila memenuhi syarat sebagai sebuah ideologi tangguh. Pengalaman dari kehidupan berbangsa dan bernegara di manapun, bangsa dan negara yang mengorbankan salah satu dari nilai-nilai tersebut maka akan runtuh. Tetapi kalau kita melihat Pancasila hanya dari dimensi idealitas semata-mata, yang notabene tidak ada keberatannya dan sudah teruji, maka kita akan terjebak pada meletakkan Pancasila sebagai "hal" yang tidak aktual bahkan sekedar menjadi slogan yang akan sangat berbahaya kalau hanya dijadikan alat legitimatif bagi penguasa yang cenderung menindas.

Persoalan kita sekarang adalah sejauh mana Pancasila mampu menjawab tantangan dan ujian dimensi realitas. Realitas yang paling menonjol di Indonesia, sebenarnya adalah kemajemukan bangsa itu sendiri. Faktor penentunya adalah kenyataaan Indonesia yang secara geografis amat luas dan terdiri dari beribu pulau besar maupun kecil, yang dihuni ras maupun suku bangsa, dengan berbagai agama dan latar belakang kebudayaan. Maka persoalan serius yang muncul adalah, demi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana keanekaragaman menjadi realitas serta bagaimana menuju persatuan dan kesatuan menjadi masalah serius yang harus dipecahkan. Diperlukan sistem norma yang mampu menjadi perangkumnya. Dalam hal ini, Pancasila dalam fungsinya sebagai sistem penopang dan pengawal sub-sistem norma yang ada, terbukti efektif baik terhadap keberbedaan maupun ke-satu-an Indonesia. Sebagaimana TB Simatupang menulis :

"The five principles (pancasila) are a wide enough umbrella for everybody. Nobody has anything againts them, people can acccept them, we can alll live together under them "

(Soetapa 1991: 236-237)

Sebagai fenomena filosofis-ideologis, pada dasarnya Pancasila amat merangsang untuk diteliti. Salah satunya

Manusia Indonesia sendiri yang telah menghianati Pancasila...

justru terletak pada efektivitas Pancasila itu sendiri dalam kemampuannya menanggulangi setiap usaha yang merusak keanekaragaman Indonesia. Sebagai suatu landasan filsafati bangsa, ideologi bangsa serta negara yang salah satu fungsinya mempersatukan keanekaragaman serta keberbedaan bangsa, Pancasila terbukti mampu melakukannya.

Yang selalu harus dibuktikan secara terus-menerus adalah sejauh mana Pancasila mampu teruji dari dimensi fleksibilitas. Ungkapan Pancasila sebagai ideologi terbuka,

Yang selalu harus dibuktikan adalah sejauh mana Pancasila mampu teruji dari dimensi fleksibilitas. Ungkapan Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya merupakan keinginan untuk menunjukkan kemampuan Pancasila teruji dalam dimensi fleksibilitas. Perubahan pada dasarnya juga merupakan hal yang manusiawi sebagai makhluk kreatif. Dunia selalu mengalir, dalam bahasa filsafatnya *"Panta Rhei"*. Perubahan yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia selama ini memang ada yang bersifat alamiah, akulturatif dan memang perubahan yang direncanakan. Perubahan alamiah adalah perubahan bangsa dan negara yang tumbuh berkembang karena sifat bangsa dan negara itu sendiri sebagai bagian alam yang harus tumbuh dan mengalami perubahan. Perubahan alamiah oleh karena itu tidak menimbulkan konflik yang berarti. Akulturatif karena pergaulan antar bangsa, walaupun ada pula akulturatif yang nyaris tidak seimbang karena dominasi kultur satu terhadap yang lain seperti dalam globalisasi. Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan yang direncanakan, tujuan utamanya menghapuskan kemiskinan, mengejar ketertinggalan dan modernisasi. Paradigma pembangunan yang keliru seperti misalnya meletakkan faktor ekonomi sebagai tumpuan utama tanpa memperhatikan faktor perubahan sosial dan moral serta standard tunggal kemajuan dan modernisasi, justru dapat membahayakan Pancasila itu sendiri.

Saya tidak bermaksud menghasut, tetapi kenyataan pembangunan selama ini yang "muaranya" justru pada krisis moneter dan kebangkrutan ekonomi, ukuran modern yang melulu "amerikanisasi" , utang luar negeri yang nyaris tak terbayar. Semuanya mengindikasikan adanya kesalahan paradigmatik dalam pembangunan itu sendiri. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila telah tercabik-cabik sendiri oleh bangsa yang mengaku berPancasila. Manusia Indonesia sendiri yang telah menghianati Pancasila sebagai amanat paling luhur dari para pendiri republik, para pejuang yang telah berkorban darah, harta dan airmata.

Sebagai penutup, saya selaku akademisi mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan yang kelak akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengalaman, sehingga generasi sekarang maupun mendatang lebih mantap ber-Pancasila dalam hal-hal sebagai berikut :

Mendokumentasikan karya-karya tokoh bangsa yang telah dirumuskan secara eksplisit baik tertulis maupun lisan secara sistematik, metodik dan dipertanggungjawabkan secara kritis. Ini menjadi penting agar sejarah dapat kita tuliskan secara benar, dan berasal dari berbagai sudu pandang.

Mendokumentasikan karya-karya sastra, kesenian, arsitektur, tata lingkungan buatan, legenda-legenda yang hidup dan berkembang dalam bahasa dan tulisan.

Inventarisasi bahan berupa pemahaman masyarakat yang telah dirumuskan secara eksplisit baik tertulis maupun lisan, namun lebih merupakan slogan, pepatah, peribahasa, syair-syair lisan daripada uraian sistematik-metodik.

Inventarisasi pemahaman masyarakat yang mungkin sudah terungkap secara fragmentatis, tetapi masih bersifat implisit, yaitu tersembunyi dalam gejala-gejala hidup bersama dalam masyarakat, tercermin dalam sikap dan kelakuan masyarakat.

Melakukan komparasi kritis antara Pancasila dengan ideologi yang berkembang pada bangsa dan negara lain. Atau bahkan penelitian kontekstual mengenai Pancasila baik sebagai dasar, pandangan hidup, ideologi maupun filsafat bangsa dan negara menghadapi perubahan.

Akhirnya tujuan utama dari penelitian tentang Pancasila diatas setidak-tidaknya meliputi 4 hal :

1. Mengekonsep dan merumuskan secara jelas konsepsi-konsepsi dasar, pandangan-pandangan dasar masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Mensistemasikan semua unsur yang membentuk pandangan dasar tersebut, dengan demikian terbentuk suatu struktur dan keterarahan yang menyeluruh mengenai filsafat (bangsa) Indonesia.
3. Melihat sejauh mana konsistensi logis dalam pandangan dasar tersebut sebagai daya praktis untuk kebudayaaan Indonesia dalam arti menyeluruh dan luas. Apakah terjadi keterputusan subsistem atau tidak selama ini. Utamanya yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, keputusan tindakan, serta hasil tindakan masyarakat atau bangsa Indonesia.
4. Melihat sejauh mana Pancasila baik sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup, filsafat bangsa dan negara teruji dari dimensi idealitas, realitas, maupun fleksibilitas.

Terakhir, tentu saja pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, sebuah ungkapan yang seringkali "membosankan", hanya bisa didukung oleh pemahaman dan pengamalan agama serta sikap keteladanan terutama dari para pemimpin bangsa itu sendiri.❐

Sapardi Djoko Damono

Saya Menganggap Semua Orang Itu Rasis


REPRO : MODE

Sapardi Djoko Damono adalah penyair yang identik dengan kesederhanaan. Semua terungkap lewat cara bertutur dalam puisi-puisinya, maupun dalam keseharian. Kesederhanaan itu diolah dengan manis, menjadi senjata andalan bagi keseluruhan karyanya.

Menulis puisi sejak remaja, Sapardi dikenal luas melalui puisi-puisinya yang mengolah tema-tema abadi seperti cinta , keTuhanan dan kematian, walaupun sebagaimana yang diungkapkannya dalam wawancara dengan *Balairung* di rumahnya di Ciputat- banyak puisinya yang lain dengan beragam tema juga mendapat sambutan yang luas. Terbukti dengan sejumlah penghargaan yang ia terima baik dari dalam maupun dari luar negeri, serta usaha-usaha penerjemahan karyanya dalam beberapa bahasa.

Dalam tiga jam wawancara dengan *Balairung*, profilnya sebagai pengajar sastra di UI (sekaligus menjabat dekan fakultas sastra UI) tercermin dalam gaya yang khas ketika menjawab pertanyaan -pertanyaan yang diajukan, menganalisa masalah dan dengan sabar menggiring konsep-konsep pemahaman yang ia maksudkan. Di awal pembicaraan, Sapardi banyak mengungkap kesan-kesannya tentang dunia pendidikan tinggi saat ini beserta seluruh dinamikanya.

Berbicara masalah pendidikan tinggi, apa kira-kira perbedaan yang mendasar dengan waktu dulu?

Perbedaannya kalau mahasiswa dulu masa kuliahnya tidak dibatasi



REPRO : MODE

Menerima penghargaan di Malaysia tahun 1984

seperti sekarang. Masuk tidak diabsen, ujian hanya setahun sekali. Menurut saya pembatasan-pembatasan itu ada baiknya, karena sebenarnya mahasiswa kuliah itu kan dibiayai oleh rakyat. Sekarang itu maunya pendidikan tinggi harus efisien, jadi tidak bisa seperti dulu. Misalnya, anda enam tahun di perguruan tinggi sudah merugikan masyarakat, karena anda dibiayai mereka. Maka dibuat aturan, perguruan tinggi harus diselesaikan dalam waktu empat tahun. Semakin lama anda kuliah semakin membebani rakyat. Itu kalau ditinjau dari segi biaya.

Kalau dari segi kualitas bagaimana?

Itu lebih berat lagi. Kalau anda menghabiskan tujuh tahun hanya untuk mencapai S1, maka di luar negeri dalam jangka waktu selama itu seharusnya anda sudah menyelesaikan S2. Saya selalu katakan pada mahasiswa dan pada dosen-dosen bahwa S1 saja tidak cukup.

Masyarakat sendiri berharap banyak pada lulusan S1, artinya terpaku pada ide-ide lama bahwa orang mencari pengetahuan dalam bentuk paket, lalu setelah lulus bekerja. Bagaimana dengan penyikapan seperti ini?

Saat ini yang dikejar adalah titel kesarjanaannya. Lihat saja, lulusan pertanian atau teknik bisa bekerja di bank. Akhirnya yang tercipta adalah lulusan-lulusan yang "serba bisa" seperti itu. Jelas ada sesuatu yang salah dalam konsepsi masyarakat dan cara berpikir kita tentang perguruan tinggi dalam menghadapi tuntutan yang kontradiktif ini. Tidak jelas S1 itu mau dibawa kemana. Apakah dijadikan sekrup -artinya digunakan untuk mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan masyarakat- atau memasuki kelompok intelektual. Tapi menjadi intelektual hanya dengan gelar S1 akan ditertawakan. Kalau di luar negeri, mahasiswa S1 atau *under graduate* itu sama dengan kelompok mahasiswa hura-hura, sedang kelompok intelektual disendirikan dan diberi fasilitas tersendiri. Sementara di Indonesia, kelompok *under-graduate* ini dituntut terlalu tinggi.

Bagaimana bila itu dikaitkan dengan kesadaran intelektual dan sikap kritis yang coba ditanamkan dalam gerakan mahasiswa?

Gerakan mahasiswa kan berkembang. Masyarakat kita sejak dulu memandang tinggi mahasiswa. Apa yang dilakukan mahasiswa akan sangat dihormati. Berbeda dengan di Amerika misalnya. Tidak akan ada gerakan mahasiswa seperti yang terjadi di Indonesia. Gerakan mahasiswa disana cenderung bersifat gagasan. Contohnya pada tahun 60-an muncul gerakan *flower generation,* yang bukan gerakan fisik melainkan pemikiran. Begitu pula seharusnya dengan gerakan di sini. Seharusnya ada satu gagasan besar yang melibatkan kalangan intelektual dan mendasari seluruh gerakan itu. Itu yang tidak ada di negara berkembang. Misalnya, ada tujuan yang jelas ingin menumbangkan Soeharto. Ketika ini sudah tercapai, mereka bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya timbul banyak pendapat ini-itu. Gagasan pemikiran di Amerika tahun 60-an berhasil mencapai tujuannya karena ada landasan yang jelas. Misalnya kaum *hippies* yang berontak ingin keluar dari sistem yang teratur.

Anda sendiri bagaimana? Semangat seperti apa yang paling menguasai selama menjadi mahasiswa?

Pada tahun 60-an yang terjadi di Indonesia adalah yang sebaliknya, dimana kita malah menciptakan sistem kekuasaan yang mengekang, seperti misalnya pengangkatan presiden seumur hidup. Sistem ini kemudian didobrak oleh Orde Baru yang ternyata kemudian juga menciptakan sistem yang sama. Pada waktu itu, setiap mahasiswa yang baru masuk akan segera diperebutkan oleh badan-badan kegiatan mahasiswa seperti HMI, GMNI, Kodema, dan sebagainya. Saya sendiri memilih untuk tidak melibatkan diri.

Lalu dimana anda memposisikan diri?

Saya menjadi semacam pemikir independen. Saya berkumpul dengan siapa saja. Main drama, teater bahkan hingga menyutradarainya. Saya juga punya kelompok sendiri di Sospol. Walaupun tidak menaruh perhatian terlalu dalam, kita juga berbicara soal politik.

Penyair itu selalu bersenjatakan sekaligus bertempur dengan kata, baik ketika memilih lalu menyusunnya. Bagaimana caranya menyiasati kata sehingga puisi itu tidak "jatuh" menjadi puisi yang berbunga-bunga?

Paling penting, yang selalu saya tekankan adalah penguasaan bahasa. Sastrawan itu adalah orang yang bisa menyiasati dan menguasai kata. Kelebihan seorang penyair dibanding penulis lain adalah kemampuannya menggunakan kata sehingga karyanya bisa masuk ke dalam hati sanubari pembacanya. Tidak harus selalu berawal dari ide atau gagasan penulisan yang besar. Misalnya

tentang sebuah pemerkosaan, bisa saja disampaikan lewat berita biasa, atau diceritakan dalam sebuah puisi. Dalam bentuk berita biasa, mungkin hanya akan terdengar seperti sebuah karya ilmiah tentang perkosaan. Tetapi dengan kata, puisi menembus pertahanan yang paling dalam. Untuk itu, syaratnya kita harus menguasai tata bahasa. Kalau tidak kita tidak bisa bermain dengan kata. Seperti menendang bola, miring sedikit akan beda hasilnya. Contoh lain, dalam pengungkapan cinta. Bisa saja diungkapkan dengan sekedar "aku cinta padamu". Tapi saya memilih mengungkapkan dengan "aku ingin mencintaimu dengan sederhana...."

Bagaimana kita belajar menyiasati dan menguasai kata ini?

Kalau saudara mengerti bagaimana prosesnya belajar menari Jawa seperti di keraton, ya...seperti itu. Terus-menerus berlatih, sampai tidak terasa proses latihannya. Sambil terus menulis, gunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.

Tidak semua orang membaca puisi bahkan di kalangan anak muda malahan jarang sekali...

Puisi itu kan tidak hanya seperti yang saudara baca. Puisi itu kan seni kata. Gampangnya begini, seperti seni tari. Ada Tayub, ada Bedoyo Ketawang. Masing-masing punya penikmat yang berbeda. Orang yang menyukai tayuban tidak akan menganggap Bedoyo Ketawang sebagai bentuk kesenian. Selama tiga jam tarian Bedoyo Ketawang itu bagi mereka tampak monoton. Begitu pula sebaliknya. Semuanya merupakan bentuk kesenian sebenarnya. Sekarang juga ada tulisan-tulisan grafiti. Semua itu sangat segar dan bernilai bagi penikmatnya masing-masing. Sampai pada taraf Rhoma Irama, kan sebenarnya dia juga menulis puisi. Jadi kalau kita bicara bahwa kesenian itu, misalnya puisi, terbatas peminatnya, itu salah. Puisi yang saya tulis itu mungkin untuk saudara, hanya saudara yang mampu menikmatinya. Saya jadi tidak akan mengharapkan seorang pedagang beras di kampung untuk menikmati puisi saya. Bentuk kesenian yang berbeda akan membawa kearifan hidup yang berbeda pula. Belum tentu novel-novel populer itu tidak bermanfaat bagi pembacanya. Karya Romo Mangun akan dibaca dan bermanfaat bagi kalangan yang lain lagi. Begitu pula karya Marga T, misalnya. Bedanya adalah bahasa yang digunakan. Dalam lirik-lirik lagu yang kita sebut pop, kata-katanya kan begitu-begitu saja. Tapi dengan demikian, komunikasi bisa dijalin karena orang mengenal bahasa yang digunakan.

Anda juga menulis tentang persoalan-persoalan lain di luar sastra?

Ya, Saat ini saya menulis sebuah artikel mengenai masalah etnis Cina, tapi saya enggan untuk mempublikasikannya. Sebenarnya saya takut.

Apa yang anda takutkan?

Mungkin kedengarannya saya itu rasis. Saya menganggap semua orang itu rasis, memasang rasa curiga terhadap ras lain. Saya pikir itu naluri manusia, apalagi, pola ini sudah ada sejak jaman nenek moyang kita dulu, yang sudah merasakan pengalaman dengan ras lain. Jadi ini tidak bisa hilang. Penyikapan kita terhadap ras lain itu sudah ada sejak dulu, kita warisi dari nenek moyang kita. Misalnya saja dalam menghadapi bule. *Londo. Londo* itu adalah orang yang pintar, yang ditakuti, yang dihormati, penjajah, walaupun pemahaman ini datang kemudian. Penyikapan ini masih ada, atau paling tidak masih tersisa. Kalau tidak, mengapa kita memilih bintang film yang bule. Ini karena pengalaman bertahun-tahun. Jadi dalam masalah etnis Cina, kita yang terpaksa jadi pribumi akan terus disalahkan. Kalau kita kembali ke jaman Belanda dulu, ada kelas-kelas dalam masyarakat. Yang pertama adalah kaum kolonial, kemudian orang-orang timur asing, kemudian baru masyarakat pribumi di lapisan paling bawah. Pada saat saat tertentu ini pasti akan meledak, akan muncul apakah direkayasa atau tidak. Ini akan menyusahkan kita semua. Kita yang terpaksa jadi pribumi kan harus menanggung itu semua. Walaupun itu disebabkan oleh orang lain, kita tidak tahu siapa, tapi yang

Karya-karya Sapardi yang paling dikenal, umumnya bertemakan "romantisme", seperti "Aku Ingin" dan "Hujan Bulan Juni", ia juga banyak menulis sajak-sajak yang bertemakan sosial , seperti yang pernah ia tuliskan pada era 60-an. Hasil karya Sapardi pada umumnya adalah puisi liris atau sajak kamar. Hal ini semakin diperkukuh dengan popularitas "Aku Ingin". Soal sajak yang satu ini Sapardi menuturkan "Mungkin memang sudah nasib sajak ini untuk populer. Saya sendiri sempat heran ketika melihat kutipan sajak itu dari undangan pernikahan, bloknote, poster seminar hingga ke kaos oblong. Lalu dijadikan lagu dan dipakai Garin Nugroho sebagai lagu tema film Cinta Dalam Sepotong Roti. Semula saya kira hanya remaja yang tertarik, ternyata tidak. Setiap orang yang menulis tentang saya pasti mengutip sajak itu. Puisi ini memang mengagetkan saya. Begitu selesai saya tulis, tidak saya koreksi lagi. Saya tidak percaya, bagaimana mungkin saya dapat menciptakan puisi dengan imaji yang seperti itu."

salah tetap pribumi. Pikiran-pikiran seperti ini berbahaya sekali. Padahal ini nyata. Saya kenal betul dengan keturunan Cina karena dulu ibu saya dulu diangkat anak oleh orang Cina. Hubungan keluarganya baik sekali. Tapi pribumi tidak bisa disalahkan terus setiap kali ada masalah. Kenapa tidak ditanggung bersama-sama.

Kalau memang toh harus dikerjakan bersama-sama, dengan cara bagaimana?

Ya jangan menyalahkan pribumi terus kalau ada masalah. Kalau terus begitu, konflik ini tidak akan ada habisnya. Apakah ini pribumi yang ada dalam pengertian kita? Apakah ini bukan hanya sekedar direkayasa? Kalau begini, kita akan disalahkan terus karena kita terpaksa jadi pribumi. Mereka juga kapok jadi non-pri. Masalah ini muncul dimana-mana. Di Australia muncul partai yang anti orang Asia. Di Amerika ada yang menyeret orang kulit hitam sampai *protol kabeh* (putus semua-red) anggota badannya. Apakah ini betul-betul rasis atau hanya watak beberapa orang saja? Tetapi jelas bahwa suatu bangsa akan menaruh curiga terhadap bangsa yang lain. Kalau kita pergi ke Jepang atau ke Cina mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Mereka kan tertutup. Susah untuk ditembus, karena bahasanya juga sulit. Di sana hampir tidak ada orang asing. Susah sekali untuk menembus kebudayaan mereka..


REPRO : MODE

SDD usia 18 th

Lepas dari SMA tahun 1959, ia meneruskan studinya di Fakultas Sastra UGM jurusan Satra Inggris hingga lulus tahun 1964. Setelah itu ia sempat mengajar di IKIP Malang cabang Madiun pada 1964-1968 lalu mengajar di Universitas Diponegoro Semarang tahun 1968-1974 dan juga sempat mengelola majalah *Basis* dan *Horison* sebelum akhirnya ia terdampar di Universitas Indonesia. Terakhir ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra UI hingga sekarang. "Saya tidak pernah menjadi sangat ambisius untuk jadi penyair. Rasanya seperti menempuh jalan yang sudah dipastikan jauh sebelum saya sampai di sana," ungkapnya. Satu hal yang menegaskan kesederhanaannya, sebagaimana terungkap dalam sajak-sajaknya. Tentang kesederhanaan dalam sajak-sajaknya, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Sapardi berhasil mengolah kemiskinan bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang kaya. Suatu capaian yang tidak akan didapat tanpa kebersahajaan dan kebeningan.

Bagaimana Anda melihat cara yang kita pakai dalam memperlakukan bahasa asing, dalam persoalan dubbing, misalnya?

Ya, menurut peraturan baru yang diperlakukan sekarang ini sinetron dilarang memakai *dubbing* dalam bahasa Indonesia. Semua orang ikut bicara, termasuk organisasi yang sangat intelektual. Ketika masalah ini dibawa ke Pusat Bahasa untuk diajukan kepada pemerintah, saya katakan bahwa bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat informasi dalam bentuk apapun dalam bahasa Indonesia. Baik siaran televisi, pidato di RT, sampai menulis disertasi, karena itu

Lahir di Solo, 20 Maret 1940, Sapardi menjalani masa kecilnya di lingkungan keluarga ningrat Jawa. Berbeda dengan cara keluarga ningrat lain membesarkan anak-anaknya, Sapardi menjalani masa kecil yang "merdeka". "Saya itu diumbar," katanya. "Permainan apapun yang dikerjakan anak-anak kampung saya pernah mengalaminya. Termasuk dalam urusan mencuri buah-buahan orang sampai menangkap belut" Masa-masa itu pula yang tampaknya mengendapkan banyak momentum puitik untuknya, satu hal yang tidak pernah disadarinya hingga keluarganya pindah ke pinggiran kota, sebuah daerah yang sepi dari permainan dan hiruk pikuk anak-anak. "Saya seperti menulis tak habis-habis," paparnya. Sajak-sajaknya yang terkuat memang penuh dengan imaji-imaji kanak-kanak, seperti Catatan Masa Kecil atau Perahu Kertas. Disini ia mengakui kekuatan momen puitik yang lalu mengilhami karya-karyanya. Selain itu, pengalaman personal dan keterlibatan emosi yang dialami memang ikut menentukan seberapa jauh puisi itu mampu menerobos sanubari penikmat puisi. "Sajak saya kan macam-macam. Dan masing-masing punya penikmat tersendiri. Misalnya, saya pernah bertemu seorang guru yang sangat menggemari karya saya yang berjudul "Do'a Para Pelaut Yang Tabah." Itu sajak perjuangan."

bahasa kita. Jadi kalau ada film dalam bahasa asing, merupakan kewajiban pemerintah kita untuk *men-dub* film itu ke dalam bahasa Indonesia. Harus. Semua warta berita harus dalam bahasa Indonesia, kecuali beberapa jam dalam bahasa asing.

Tapi bagaimana dengan film asing yang memuat esensi dan nilai artistiknya dalam bahasa asing. Artinya ketika men-dub nya kita akan membuat campur tangan terhadap sebuah karya dan itu akan mempunyai implikasi artistik yang berbeda..

Ya tentu saja. Mengapa kita menyetujui karya terjemahan? Mengapa kita boleh mementaskan karya terjemahan? Karya seni itu ditulis dalam bahasa yang dikenal oleh masyarakat. Shakespeare menulis dalam bahasa yang dikuasai masyarakatnya. Lalu Shakespeare mati, pendukungnya mati, tetapi karyanya mengembara kemana-mana. Menembus ruang dan waktu, hadir di tengah *audience* yang berbeda. Mereka tidak akan menangkap inti kisah ini sebagaimana *audience*-nya yang pertama dulu. Di Inggrispun Hamlet diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang dikuasai banyak orang. Justru disinilah letak kecanggihan kesenian itu. Kesenian itu ditransfer ke dalam masyarakat lain, dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk diceritakan kembali agar bisa dinikmati, bukan sebagai barang antik. Coba saudara bayangkan, kalau film-film Walt Disney itu tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa gunanya, siapa yang akan nonton. Akan sayang sekali, karena film -film itu mengandung pendidikan yang berguna. Kita harus menggali konsep-konsep yang dimiliki oleh bangsa lain. Dalam sastra sudah banyak dilakukan. Tapi bahasa lisan kita belum mencoba untuk menangkap konsep-konsep yang dimiliki bangsa lain. Bila itu dilakukan, khasanah bahasa kita akan menjadi semakin kaya.

Bagaimana dengan pengajaran sastra dalam sistem pendidikan kita?

Kita harus mulai dengan merumuskan sastra itu apa dan apa yang ingin kita berikan. Kesusasteraan itu terentang dari mulai klasik, artinya kekayaan kesusastraan dunia, hingga kesusatraan kuno kita sendiri. Juga dongeng, legenda turun temurun dan sebagainya. Lalu kita rumuskan mana yang mau kita berikan, dan dengan cara bagaimana. Anak kelas tiga SD belum tentu tidak bisa diberikan Siti Nurbaya. Kalau memang dibutuhkan,



FATCHUR /BUL

Bakdi Sumanto

Bakdi Sumanto tentang Sapardi
"Ketenarannya adalah ketenaran yang diam."

Sejauh mana Anda mengenal Sapardi?

Sapardi dulu teman saya di fakultas Sastra. Saya angkatan 1962, Sapardi masuk lebih dulu, angkatan 1959. Begitu saya masuk, dia sudah sarjana muda. Hubungan kami cukup dekat.

Sebagai seorang sastrawan, bagaimana Anda menilai puisi-puisi Sapardi?

Puisi-puisi Sapardi itu kalau menurut istilah orang luar disebut puisi imajis. Puisi imajis itu adalah puisi yang sangat membutuhkan sekaligus bermain-main dengan imajinasi manusia atau pembaca. Misalnya puisi "Mata Pisau", yang kurang lebih isinya menceritakan tentang sebilah pisau yang diasah tajam oleh pemiliknya, lalu berbalik mengancam orang yang mengasahnya. Kemudian ada sebuah puisi yang ditulis ketika Sapardi dalam keadaan sakit parah, sehingga dia merasa sudah begitu dekat dengan kematian. Dalam sakitnya, dia lalu "menyapa" Tuhan, "Tuan, tuan Tuhan bukan? " dan oleh Tuhan sapaan ini dijawab "Sebentar, Saya sedang keluar." Jadi, kalau kita terbiasa membaca puisi Sapardi dan menikmatinya, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa secara batiniah.

Di tahun 60-an, ketika terjadi dikotomi 'sastra antara Lekra dan Manikebu, dimanakah Sapardi berada?

Mungkin dia tidak termasuk golongan manapun di sana. Dia berkarya dan mengatakan apa adanya. Kelemahan Sapardi itu sama dengan Gunawan Muhammad, mereka tidak vokal. Hasil karyanya bagus dan terkenal, tapi kalau diminta membaca puisi tidak bisa. Dia tidak seperti Rendra. Untuk membaca puisinya, dia harus minta tolong orang lain. Ketenarannya adalah ketenaran yang diam, tapi menggema, dalam dan akan terus diingat. Puisi-puisi Sapardi berfungsi mengingatkan kita akan kesendirian kita. Dengan kekuatan bahasa, puisinya, Sapardi menjelajah kemana-mana, menjangkau wilayah tersembunyi *(terra incognita).*

Selama Anda mengenal Sapardi , bagaimana dengan pribadinya sehari-hari?

Sapardi itu orang yang sangat baik hati. Dulu saya ingat dia punya sepeda bagus, merek *Gazelle*. Tapi sering saya lihat dia tiba-tiba jalan kaki. Nah, kalau sudah begitu, saya tahu sepedanya sedang digadaikan, untuk membantu teman atau untuk membiayai keperluan teater. Dia bukan orang yang ambisius. Ya, dia ambisius tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin dia bercita-cita untuk menjadi *the best poet* dan terus giat menulis, tapi tidak dengan menjatuhkan orang lain.

Hery, Eka

kita bisa mengadaptasinya. Petualangan Guliver yang lebih dikenal sebagai cerita anak-anak itu aslinya terdiri dari lima ratus halaman dan itu sebuah kritik keras terhadap situasi politik pada saat itu. Kita juga perlu khasanah sastra dunia. Kita pilih, kita terjemahkan dan kita adaptasi bila perlu. Dan kita perlu memberikannya sejak usia dini, dengan penyesuaian-penyesuaian yang saya maksud tadi. Dan yang harus disadari adalah sastra klasik itu sukar disampaikan tanpa mitologi sementara kita itu lepas dari mitologi.

Apa hubungannya dengan mitologi?

Lho, bahasa itu bisa padat kalau diacukan pada hal yang disepakati bersama. Sastra itu bisa bergaung dengan baik bila dasarnya adalah mitologi. Cerita akan *nyanthel* pada mitologi-mitologi itu. Kalau tidak, tidak akan bisa jalan.

Tapi akan ada banyak hal yang mengalami krisis dan pergeseran makna, yang membuatnya tidak lagi bisa dijadikan rujukan bersama..

Ya, justru karena itu. Sastra bisa membongkar mitos, tapi pertama kali harus ada mitosnya dulu. Kalau tidak mau membongkar apa. Mitos itu bukan untuk diiyakan. Malin Kundang itu selama ini dijadikan sebagai sesuatu yang buruk. Tapi oleh Goenawan Mohamad, Malin Kundang akan memiliki makna yang berbeda. Harus ada dulu mitosnya, baru kemudian dibongkar.



REPRO : MODE

SDD beserta istri

Tapi ada banyak hal yang carut marut dalam kebudayaan kita yang membuat pembongkaran-pembongkaran mitos ini tidak bisa berlangsung selinier yang anda katakan...

Carut marut itu bagi orang yang nggak tahu. Kalau bagi yang benar-benar paham kan nggak carut marut. Garin Nugroho itu nggak carut marut. Surat untuk Bidadari itu mitologis *banget.* Kalau soal teknisnya itu soal lain. Tapi justru itu, dia menciptakan tokoh-tokoh berdasarkan mitologi, meskipun namanya lain. Dan mitologi kebanyakan pinjaman dari luar. Wayang itu pinjaman. Mau nggak mau itu yang kita pakai. Tanpa sikap demikian akan susah sekali untuk menggaungkan sastra. Nyanyian Angsa-nya Rendra akan susah ditangkap keindahannya tanpa kita tahu mitologi Katolik. Mitos itu bisa merupakan pengetahuan, juga konsep. Pengetahuan mengenai musim, mengenai cuaca, itu juga merupakan mitos. Tanpa pengetahuan mengenai musim, Anda tidak akan bisa menikmati Hujan Bulan Juni.❐

Eka Rinanda
Hatta, Bekti Dwi Andari

SEKS CLINTON

Satmoko Budi Santoso
Staf redaksi Tabloid Taferil ISI Yogyakarta

...beauty is a culturally imposed physical standart which them the male dominated culture uses to force woman into an annatural competition for resourses that men have aptoriated for themselves.

Kutipan di atas adalah pernyataan Naomi Wolf, seorang feminis radikal Amerika Serikat, ketika mempresentasikan perihal mitos kecantikan yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang kodrati pada diri perempuan. Tak salah memang, jika kemudian FX. Rudi Gunawan menafsirkan pengertian sebagai konsep keindahan alamiah dari seorang perempuan dalam bukunya pelacur dan politikus (PT Pustaka Utama Grafiti, 1997)

Bisa jadi, untuk konteks kekinian, apa yang terungkap dalam pikiran Naomi Wolf diterjemahkan oleh Bill Clinton, pembesar gedung putih, pemimpin rakyat Amerika Serikat sebagai satu kekaguman maha dahsyat terhadap sosok perempuan.

Nama-nama yang kemudian menyeruak sebagai 'korban' Clinton, diantaranya: Susan McDougal, Sheila Lawrence, Dolly Browning, Katleen Wiley, Connie Hamzy, Jo Jenkins, Deborah Mathis, Sally Purdue, Lencola Sullivan, Elizabeth Ward Gracen, Suzie Witacre, Paula Jones sampai pada Monica Lewinsky.

Tulisan ini sendiri dimaksudkan untuk melihat sejauh mana ideologi sexis beroperasi dalam rasionalitas hegemoni sistem kekuasaan tertentu. Toh Clinton sendiri, sebagai presiden, sepertinya bisa merasa aman dan tak tergoyahkan kepemimpinanya.

Lewat paparan di atas setidaknya ada beberapa praduga yang menyebabkan Clinton menghembuskan superioritasnya sebagai laki-laki lewat hubungan initimnya dengan banyak perempuan.

Pertama, Clinton tengah menunjukkan satu konsep perihal *Game of Superiorituy and Inferiority*. Artinya, ia tengah membebaskan dan memerdekakan superioritas kelelakiannya untuk memposisikan perempuan berada dalam struktur inferior. Tentu saja, untuk konteks dunia kekuasaan Jawa, hal ini amat mirip dengan "perlakuan" raja-raja Jawa yang memusatkan superioritasnya dalam kekuasaan memilih perempuan, "mengeksploitasi" dan mendudukan perempuan senantiasa berada dalam struktur atau kelas bawah entah disengaja atau tidak.

Konsep *Game of Superiority and Inferiority* ini, mengindikasikan adanya abstraksi sub ordinansi yang selalu ditekankan pada perempuan-perempuan terdekat penguasa. Dengan begitu, otoritas pribadi, otoritas keperempuanan sekedar ditentukan oleh satu cara pandang yang naif; perempuan adalah wilayah minor yang kedudukannya tak lebih hanya sekedar obyek pemuas.

Kedua, Clinton tengah mensosialisasikan konsep *power in the servis of sex,* bukan *sex in the servis of power.* Bisa jadi, dalam konteks ini, Clinton sadar - seperti pernah diungkap Michael Foucoult, seorang pemikir strukturalis Perancis, rasionalitas kekuasaan sebagai rasionalitas taktik-taktik yang seringkali sangat eksplisit pada tingkat penerapannya. Satu rasionalitas kekuasaan yang justru mendapat dukungan dalam wilayah kedudukan -biasanya berwujud jabatan atau legitimasi sosial berupa pekerjaan.



'WHITE' DESIRE, FIFI JR

Hal di atas tentu saja, amat bertentangan dengan cita-cita Clinton sendiri yang pada mulanya kompeten sebagai seorang yang pro gerakan feminis, dalam pidato penerimaan pencalonan sebagai presiden di komunitas Partai Demokrat Amerika. Menarik pasca kampanye pencalonan presiden, memang banyak perempuan Amerika yang bersimpati dan akhirnya memberikan suara secara bulat. Lebih dari 54% suara perempuan Amerika memberikan dukungan pada Clinton (baca: Gegar Gender, Naomi Wolf- terjemahan Omi Intan Naomi- Pustaka Semesta Press, 1997).

Maka wilayah *sublimasi* kekuasaan Clinton justru merupakan penutup perjuangan kaum feminis yang semestinya telah mencapai puncak eksistensinya dengan diakuinya kedudukan diri mereka. Setidaknya, menjadi setara dengan kaum laki-laki.

Dengan demikian, karena Clinton mengingkari obsesinya, dengan bukti banyaknya skandal seks. Maka wilayah *sublimasi* kekuasaan Clinton justru merupakan penutup perjuangan kaum feminis yang semestinya telah mencapai puncak eksistensinya dengan diakuinya kedudukan diri mereka. Setidaknya, menjadi setara dengan kaum laki-laki. Satu kedudukan yang biasanya amat dipertanyakan terutama dalam relasi kerja atau dalam hubungan kerumahtanggaan yang konon justru merupakan pengesahan atas konvesi superioritas dan inferioritas yang beroperasi dari waktu ke waktu.

Sampai di sini apa boleh buat perjuangan feminisme memang menghadapi kendala. Benar, kata budayawan dan pengamat politik Rocky Gerung bahwa, perjuangan feminisme selalu berada dalam "Ruang Tunggu". Artinya, perjuangan feminisme sendiri tak bisa secara kongkrit menembus dua lapis superioritas terbesar yang mengungkunginnya. Pertama, kenyataan perihal dominasi kekuasaan, hegemoni kebijakan penguasa. Kedua, perihal posisi *ambigu* yang cukup riskan dari kebudayaan massa yang melingkupinya, yang sepertinya selalu menutup-nutupi kemenangan perempuan dalam perjuangan sosial tertentu. Perjuangan feminisme sendiri pada akhirnya adalah sebuah hierarki yang tetap tertutupi dengan atas nama pengkelasan atau apapun.

Apapun yang diperbuat Clinton dengan sendirinya merupakan satu tendangan keberuntungan. Dan, di dalam iklan rokok yang pernah ditayangkan di stasiun televisi, sempat kita lihat adanya kenyataan sorang penerbang yang jatuh mengalami kecelakaan, namun ketika banyak orang telah menduganya meninggal dunia, ia masih bisa selamat dengan posisi tubuh bergeteyongan dalam keranda tali sehingga membuat seorang perempuan cantik muncul dan terheran-heran, lantas jatuh cinta, Disitulah orisinalitas perjuangan Amerika. Orisinalitas taktik superioritas yang sempat terabstraksikan sebagai iklan rokok.

Yeah. Selamat Clinton.❑

Siapa Bilang Sastra Bukan Pemberontak!

Tidak ada sastra yang bukan kritik. Sastra lahir dari kondisi yang memang tidak mapan, dimana semuanya bisa terlahir kapan saja, dan dalam kondisi kacau sekalipun. Termasuk saat bangsa kita muak dengan kesewenang-wenangan.

Ketika isu tentang sebuah perubahan digulirkan dan orang ramai berbicara tentang masyarakat Indonesia ideal di masa yang akan datang, ternyata sastra pun telah lama bergelut dengan yang namanya perubahan. Sastra melakukan *counter wacana* terhadap wacana yang selama ini telah menghegemoni rakyat Indonesia. Memunculkan wacana alternatif untuk menciptakan masyarakat Indonesia. Sebuah tawaran baru.

Jika ditilik dari perjalanan kesusastraan Indonesia, hakikat karya sastra adalah usaha pemberontakan terhadap *mainstream* yang ada. Jika dalam bahasa Umar Junus, sastrawan melakukan pemberontakan terhadap mitos-mitos yang berkembang dan berusaha memunculkan mitos baru. Seorang sastrawan ataupun penyair selalu berusaha mencari bentuk-bentuk ekspresi dan pemaknaan realitas yang baru dan personal. Artinya, karya-karya yang dia hasilkan menjadi sesuatu yang khas dan berbeda dengan yang telah muncul sebelumnya. Demikian pula isinya. Ia berusaha merambah segala sesuatu yang belum disentuh oleh sastrawan atau penyair lain. Menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak terpikirkan orang. Dan sastrawan yang lain pun melakukan hal yang sama begitu seterusnya.



TIMBUL/DOK BAL

Salah satu bentuk Sastra Perlawanan

Semisal politik. Rejim yang berkuasa telah berhasil menghegemoni rakyat dengan memunculkan sikap apolitis -- menggantinya dengan "kemapanan" ekonomis. Sikap ini tidak hanya berkembang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan melainkan juga tumbuh subur dalam penciptaan hasil-hasil kebudayaan, termasuk sastra. Sastra tidak diperbolehkan menyentuh politik dengan stabilitas nasional sebagai alat legitimasi.

Segala karya sastra yang dianggap oleh rejim berbeda ideologi dilarang terbit. Pementasan teater, pembacaan puisi atau cerpen yang berisi kritik sosial atau kritik terhadap rejim tidak diperbolehkan --termasuk juga pencekalan terhadap orang-orangnya.

Padahal, menurut Faruk H.T, sastra itu semua merupakan kritik sosial."Tidak ada sastra yang bukan kritik. Paling tidak mengemukakan ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam kehidupan baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok,"

Masih menurut Faruk, sastra mengandung imajinasi dan nilai-nilai. Jadi kalau sastra misalnya melakukan kritik sosial, itu berarti berimajinasi, membayangkan sebuah negara atau masyarakat yang baik itu bagaimana.

Sastra Tahun 60-an: Pengalaman Pahit

Tolok ukur yang dipakai oleh rejim sebagai alat legitimasi ketidakbolehan sastra menyentuh hal-hal yang berbau politik adalah perkembangan sastra pada tahun 60-an yang sebenarnya juga dipengaruhi oleh oleh situasi politik pada saat itu. Sastra, waktu itu digunakan oleh partai-partai politik sebagai alat penyebarluasan ideologi partai. Sastrawan dipaksa oleh kondisi sosial-politik masuk ke dalam salah satu partai. Dan mereka harus "berjuang" untuk partai yang mereka jadikan patron sebagai ongkos yang harus dibayar. Sampai puncaknya ketika terjadi perebutan dominasi



B. Rahmanta



Faruk H.T.



Landung Simatupang

hegemoni antara sastrawan LEKRA dengan sastrawan Manifes. Pertarungan yang terjadi kemudian bukan hanya dalam kerangka ide atau pandangan yang berbeda, tapi juga sampai pada teror individu.

Setelah rejim Orde Lama digantikan Orde Baru, maka mulailah sastra dipisahkan dari dunia politik. Kesusastraan tahun 60-an dianggap sebagai mimpi buruk. Sebuah perjalanan budaya yang harus disingkirkan jauh-jauh, disimpan dalam almari besi dan tidak boleh disentuh. Padahal semestinya kesusastraan tahun 60-an itu menjadi pengalaman pahit untuk tempat berpijak sebuah refleksi. Ditambah lagi kritikus maupun pekerja sastra sendiri yang trauma dengan kondisi saat itu yang semakin menjauhkan sastra dari dunia politik.

Dalam perkembangannya kemudian sastra menjadi terasing karena tidak hanya ketakutan terhadap politik saja, melainkan juga persinggungan sastra dengan masyarakat dan sistem nilai yang ada pun berusaha dihindari. Sastrawan atau penyair lebih menyukai eksplorasi bentuk daripada isi. Akibatnya perkembangan estetika bentuk berjalan pesat sementara eksplorasi *sense* (isi) menjadi terabaikan.

Sastra dan Masyarakat Indonesia

Sastra bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tempat ia tumbuh dan berkembang. Lalu sebenarnya dimanakah posisi sastrawan dan karyanya dalam masyarakat tempat keduanya lahir ketika masyarakat menghadapi realitas yang tidak berbeda dengan yang sastrawan hadapi. Menurut Landung Simatupang, seorang penyair atau sastrawan merupakan penyaksi. Mereka menyajikan realitas yang ada dan dirasakan bersama. Masyarakat merasakan yang supervisial, lalu mereka membukakan struktur persoalan kepada pemaknaan yang lebih esensial dan filosofis.

"Selain menyampaikan perasaan juga membukakan kesadaran bersama tentang permasalahan-permasalahan yang ada, yang lebih mendalam dari sekedar yang tampak," lanjutnya.

Jadi yang terpenting adalah kejujuran penyair atau sastrawan dalam menyampaikan realitas. Seperti yang dipaparkan oleh Kiswondo, salah satu anggota Forum Pecinta Sastra Bulaksumur, bahwa realitas seburuk apa pun harus disampaikan dengan jujur, bukan ditutup-tutupi.

"Berangkat dari itu kita coba mematahkan konsep borjuis yang selama ini berkembang yang sebenarnya telah berkembang sejak jaman romantis di Eropa yang berpendapat bahwa seni itu harus mengungkapkan yang indah-indah saja dan menyenangkan. Dan seniman itu menjadi individu yang sangat otentik pada dirinya sendiri dan dia tidak terpengaruh oleh masyarakatnya," katanya.

Namun, menurut Agus Noor, ketika pretensi untuk menyampaikan sesuatu itu demikian besar, sastra menjadi verbal. Ketika sastrawan atau penyair bicara dengan gamblang, ada pretensi untuk menyatakan sesuatu dengan berani, seperti kritik sosial, dengan kisah-kisah yang sudah banyak diketahui, menjadi tidak beda dengan berita-berita koran.

"Artinya sastra tidak menyampaikan banyak pesan semata pada publik. Ada pretensi yang kemudian dibungkus sedemikian rupa kemudian disampaikan," lanjut cerpenis itu.

Bagi Kiswondo bentuk ekspresi berkait dengan *distance* (jarak) antara realitas yang ada atau terjadi dalam masyarakat dengan realitas dalam cerita. Semakin jauh jarak tersebut, maka karya sastra semakin sukar dipahami.

Soal keberpihakan sastra lebih lanjut diungkapkan oleh Faruk sebagai sebuah kewajaran.

"Sastra yang paling pokok menyentuh atau menggugah perasaan orang dan sastra itu selalu politis secara otomatis. Dalam artian mencoba menggerakkan orang untuk membuat suatu kehidupan yang lebih baik. Sejak awal dia berpihak, tidak netral," lanjutnya.

Bagi Landung Simatupang masuknya kepentingan-kepentingan termasuk politik dalam karya sastra boleh-boleh saja. Misalnya merespon suatu kondisi yang terjadi secara sesaat. Tapi setelah selang waktu lama kehilangan makna.

"Kalau sastra berbicara tentang hal yang lebih esensial dia lebih tahan lama dan dapat berbicara pada publik yang lebih luas," katanya lagi.

Sementara Indra Trenggono melihat kedudukan karya sastra dalam masyarakat ada dua. Pertama bahwa karya sastra bisa jadi hanya sebuah kanal saja bagi berbagai tekanan sosial. Tetapi bisa juga karya sastra terkait langsung dengan berbagai isu yang muncul. Artinya ia mencoba mengakomodasi berbagai hal yang berkait dengan persoalan-persoalan dan perubahan masyarakat. Dan yang

terjadi sekarang seperti pembacaan puisi dalam demonstrasi hanyalah sebagai katup pelepas tekanan yang ada.

Kekuatan Hegemonik Sastra

Sebagai teks, ternyata karya sastra memiliki kemampuan untuk menghegemoni masyarakat (audience). Tetapi sejauh manakah kekuatan hegemoni sebuah karya sastra? Ini yang menjadi pertanyaan kemudian, karena sastra memiliki berbagai keterbatasan.

Sudah klise --tapi sebenarnya sangat mendasar jika berbicara tentang pengaruh sastra pada masyarakat-- bahwa salah satu keterbatasan sastra adalah audience. Di Indonesia menurut Agus Noor, sastra belum bisa menjadi wacana publik. Diduga penyebabnya adalah tradisi sastra Indonesia yang baru tumbuh dan adanya diskontinyuitas perkembangan sastra di Indonesia.

"Sebuah teks hanya terbatas pada wilayah audience (pembaca) tertentu saja. Misalnya teks sajak Wiji Thukul menjadi kesadaran diantara teman-teman pergerakan tapi terbatas pada komunitas tertentu dan saya juga tidak yakin itu menjadi pandangan hidup, menjadi kesadaran sosial," katanya.

Agak berbeda dengan Agus Noor ,Rahmanto melihat, pengaruh sastra pada masyarakat tergantung pada masyarakatnya. Apakah masyarakat mau membaca atau tidak. Jika masyarakat tidak memiliki apresiasi terhadap sastra, maka tidak ada pengaruhnya.

Dalam pandangan Kiswondo ini merupakan dosa lama sastrawan yang sibuk dengan dirinya sendiri dan menjadikan karya sastra sebagai sebuah menara gading. Masyarakat menjadi enggan membaca karya sastra karena berbicara tentang sesuatu yang asing, yang jauh dari kehidupan yang mereka jalani.

Inilah yang semestinya dibenahi, Sastrawan sudah saatnya menulis tentang sesuatu yang biasa terjadi dan dialami orang. Namun realitas itu tidak diabstraksikan seperti halnya hasil penelitian ilmiah atau berita koran, melainkan dikonkretkan. Sehingga ketika orang menemukan seperti apa yang diceritakan dalam karya sastra dia merasa tersentuh dan tergugah.

Jadi disini komunikasi antara sastrawan dengan masyarakat menjadi penting. Seperti yang disampaikan Butet Kertarajasa," Kesenian apa pun harus berkomunikasi dengan lingkungannya, memberikan ruang kemungkinan untuk berkomunikasi. Maksudnya kalau karya sastra itu hadir dan hanya bisa dinikmati sekelompok kecil orang, tidak akan membawa manfaat sosial bagi masyarakat. Tapi kalau karya sastra hadir, lingkungannya terinspirasi lalu lingkungannya itu bisa berubah, maka karya sastra telah melakukan fungsinya yaitu komunikatif. "

Tetapi pengaruh karya sastra tidak bisa langsung membuat pembaca melakukan suatu tindakan. Proses mempengaruhi dari karya sastra berlangsung lama, sedikit demi sedikit, dan lamban. Bahkan proses itu bisa jadi berlangsung sampai beberapa generasi, baru cara berpikir atau cara hidup masyarakat berubah.

Kenapa Orang Memilih Sastra?

Sastra bisa dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan ide, pendapat tentang sesuatu baik itu pernyataan setuju ataupun tidak setuju. Dan sepertinya sastra memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh media (tulis) ekspresi yang lain.

"Sastra lebih pada imajinasi, perasaan, watak. Kalau data bisa abstrak tapi manusia konkret, lebih hadir dalam imajinasi dan perasaan kita," tutur Agus Noor. "Karakteristik itu yang membuatnya menarik. Ada pretensi yang kemudian dibungkus sedemikian rupa, kemudian disampaikan," ungkapnya lagi.

Pembacaan puisi saat demonstrasi oleh Landung Simatupang dimaknai sebagai usaha untuk membentuk solidaritas. Selain itu publik yang berkumpul lebih karena alasan emosional sehingga pembacaan puisi lebih tepat daripada pidato. Sebab puisi bukan hanya menyentuh fikiran saja melainkan juga emosi.

"Fungsi ini (pembentukan solidaritas -red) pernah dijalankan oleh teater-teater tradisional. Sekarang dilakukan yaitu dengan menggunakan ekspresi bahasa yang sudah umum sehingga mudah dipahami," ungkapnya.

Bagi Indra Trenggono dunia sastra adalah dunia simbol, bukan dunia praktis. Sebab orientasinya bukan pada kekuasaan melainkan pada nilai-nilai yang ikut tumbuh dalam sebuah masyarakat. Jadi lebih pada bagaimana sastra ikut dalam persemaian nilai dalam masyarakat dan bukan langsung berhubungan dengan hal-hal yang praktis. Dan pembacaan puisi pada saat demonstrasi lebih sebagai katup pelepas, sebuah wahana saja.

Terlepas dari apakah sastra hanya sebagai katup pelepas berbagai tekanan yang dirasakan oleh masyarakat ataupun sastra berhasil merespon dan menampung berbagai macam situasi sosial-politik yang berkembang dalam masyarakat, tampaknya bagaimanapun sastra tidak bisa lepas dari masyarakat yang melahirkan dan memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dan dialektika sastra dengan masyarakat ini akan terus berlangsung sepanjang sejarah perkembangan sastra Indonesia❐

Imam Risdianto,
Radyah Maharastri, Jhon Mbama

Atmakusumah: Pers Kampus Tak Seru Lagi


IKA YUNIARTI

Direktur Lembaga Pers Dokter Sutomo (LPDS), Atmakusumah mengaku saat ini ia tak lagi merasa seru ketika melihat hasil penerbitan mahasiswa sekarang. Pendapat itu dikemukakan ketika memberikan penilaian terhadap penerbitan mahasiswa pada penganugerahan ISAI award, pertengahan bulan Juni lalu. Menurutnya, menurunnya greget penerbitan kampus saat ini karena semangat pers umum telah mengalahkan pers kampus.

Namun begitu, media kampus pada tahun-tahun lalu sebetulnya sudah membuka cakrawala.pers yang sangat luas. Sesuatu yang dulu menjadi kebanggaan para pegiat-pegiat pers kampus.

"Media kampus sudah bertahun-tahun mencerminkan kebebasan pers yang diidealkan media pers umum. Tetapi karena ketakuatan oleh ketentuan hukum yang represif, maka media umum tidak bisa menjalankan idealismenya. Itulah yang kemudian diambil oleh media mahasiswa jauh sebelum momentum reformasi digulirkan", papar pengamat pers ini.

Lebih lanjut ditambahkan, di Indonesia saat ini ada 800 penerbitan kampus. Bahkan banyak diantaranya yang tampil sangat bagus baik artistik, kekayaan rubrik, maupun analisanya. Ada beberapa diantaranya yang lebih bagus dari penerbitan umum.

Memang romantisme masa lalu sebelum Soeharto terjungkal tinggal cerita. Artinya penerbitan mahasiswa tengah menghadaapi tantangan yang tidak ringan, tampil seperti format semula dengan resiko tertinggal oleh pers umum yang lebih kuat infrastrukturnya, atau berusaha melakukan reorientasi baru bagi penerbitannya.❒

Hery

Pak Bambang dan Panser Polisi


FATCHUR/ BUL

Jum'at 3 April 1998 Boulevard UGM mendung, tapi suasana teramat panas setelah hujan batu dan letupan gas air mata dua hari berturut-turut meningkahi bentrokan berdarah antara aparat dan mahasiswa tak kunjung usai. Di atas panser polisi, persis di selatan hutan pinus Bulaksumur Ir. Bambang Kartika berbicara singkat,"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Para mahasiswa saya harap mundur, bubar!"

"Yaa, tapi militer mundur dulu!", balas mahasiswa.

"Oke, bapak aparat ditarik dulu", seru Pak Bambang. Kalimat ini lalu bergema ke seluruh dunia, sebab rekaman suara itu jam 20.15 WIB malam harinya di*release* ulang oleh radio *British Broadcasting Corporation* (BBC) siaran Bahasa Indonesia. Jalan tengah itulah yang akhirnya menyelesaikan perang batu sore itu.

Orang seringkali kikuk dan kesulitan menuliskan gelar akademik Pak Bambang dengan menambahkan M.Sc. atau M.S. dibelakangnya. Padahal staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini jelas-jelas hanya bergelar Ir, sudah. Banyak juga kalangan yang mengehendaki Pak Bambang tetap menduduki posisi PR III itu. Meski ia sendiri kadang enggan dengan alasan ingin mengurus studinya. Setidaknya sikap bijak Pak Bambang sangat dibutuhkan ketika saluran tuntutan mahasiswa terhadap perubahan di negeri ini macet semua serta selalu dan selalu ditabrakkan dengan kekerasan rotan dan perisai *fiberglass* aparat.

Hujan batu boleh tidak terjadi lagi di Boulevard UGM, karena itu anarkis, tidak ilmiah dan terkesan akrab dengan kekerasan, tetapi pentungan aparat boleh jadi akan selalu bertimpukan di tubuh mahasiswa, lalu perubahan yang diinginkan mahasiswa pun juga tak kunjung datang, lantas apa salahnya jika Pak Bambang tetap berkantor di sayap barat lantai II Gedung Pusat UGM itu, serta mendampingi Prof. Dr. Ichlasul Amal?❒

kru Balairung Interaktif

Tebyan A'maari Sempat Jualan Batik


KOEN ANGGORO

Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Teknik Arsitektur UGM. Meski orang tua mengharapkan ke kedokteran, kenangnya saat ditemui *Balairung* di sela kesibukan kantornya.

Alumni UGM yang satu ini-- Tebyan A'maari-- lebih akrab dipanggil Pak Teb' sempat aktif baik di organisasi ekstra maupun intra. Salah satu nya adalah sebagai komisariat dan pengurus Himpunan Mahasiswa Arsitektur.

Perawakan yang tegas menunjukkan konsistensi pribadinya, yang tanpa segan mengakui agak terlambat menyelesaikan kuliah." Justru banyak pengalaman yang saya dapatkan," ujar alumni yang kini Direktur Utama Wisata Niaga Jaya. Ia pun menuturkan pengalaman 'pahit' semasa kuliah yang di

Marzuki Usman dan Sekaratnya Dunia Pariwisata



Jadi menteri dimasa sulit memang tidak mudah. Setidaknya begitu yang dirasakan Marzuki Usman yang *'ketiban sampur'* menjadi Menteri Pariwisata,Seni dan Budaya. Saat menerima amanah, misi utama yang ingin dicapainya adalah kerakyatan. "Bagaimana agar pariwisata bisa mencakup orang-orang kecil, itu yang harus dipikirkan." ungkapnya saat ditemui *Balairung* di ruang kerjanya yang nyaman. Alumnus FE UGM ini berpendapat, selama ini pariwisata belum menyentuh masyarakat kelas bawah. Mengadakan *event-event* sederhana namun berarti adalah salah satu programnya. Misalnya perlombaan kuda lumping, yang pelakunya tidak berpendidikan. Kemudian menampilkannya sebagai kebanggaan bangsa, bukankah itu sangat menarik. "Alangkah sayangnya jika bangsa kita sendiri tidak bisa menampilkan kesenian dan kebudayaannya dan harus menyaksikan penampilan orang asing ,apakah kita tidak sakit hati ?" demikian ungkapnya memprihatinkan kepedulian orang Indonesia yang acuh tak acuh terhadap budaya bangsa.

Saat banyak orang mengatakan dunia pariwisata, sedang sekarat, Ketua ISEI ini justru menganggapnya suatu peluang. Pariwisata bukan hanya berupa bangunan maupun infrastruktur yang nyata saja, melainkan juga keberadaan dan kelestarian seni dan budaya yang berkembang di Indonesia. Pakailah *ASOI* (Akal Sehat Orang Indonesia) dalam menghadapi peluang pariwisata, begitulah kiat khususnya dalam menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pendapatan devisa negara. Semoga sukses ya Pak.❒

F. Ika Yuniarti

Ir. Susanto: Ingin Punya Arti



Alumnus peternakan UGM ini, kini menjadi direktur utama PD Dharma Jaya, Perusahaaan Daerah yang bergerak di bidang jasa pemotongan ternak serta hasil ternak.

Beliau adalah Ir. Susanto. Begitu lulus dari Fakultas Peternakan ia langsung bekerja di Dinas Peternakan Jakarta. Kemudian ia mendapat kesempatan belajar lagi, yaitu mengambil S2 Ekonomi Pertanian di Bogor.

Menurutnya, sebagai mahasiswa harus benar-benar mengerti tentang disiplin ilmunya jika masih ingin eksis di jaman seperti ini. Selain itu juga dibarengi dengan sikap diri dan keyakinan. Itulah yang menjadi kunci kesuksesannya selama ini. Beliau sendiri mengaku berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga terpacu untuk maju.

Olahraga adalah hobinya sewaktu SMA, namun karena kesibukannya saat ini, hobi tersebut terpaksa ditinggalkannya. Sejak kecil memang Pak Sutanto ini sudah senang beraktivitas, berkomunikasi dan bergaul dengan lingkungannya. Mempunyai arti di dalam lingkungan masyarakat itu adalah prinsip hidupnya.❒

Yuki Susanti

kemudian hari ternyata menjadi sebuah kenangan yang amat manis baginya.

Dalam suatu kuliah perencanaan, pernah diasuh seorang dosen dengan reputasi cukup bagus, akan tetapi ternyata karyanya mendapat nilai terjelek. "Kemudian hari saya kaget sebab perencanaan tadi ternyata dipakai oleh suatu perusahaan luar negeri dan direalisasikan di sini, yakni bangunan Hotel Hilton," kenang Pak Teb yang saat kuliah sempat kost di Bausasran.

Saat kesibukannya yang cukup padat , Pak Teb - begitu panggilan akrabnya, masih menyempatkan diri untuk menulis puisi dan melukis, itulah salah satu kiat nya dalam mengatasi stres. Namun bagaimanapun juga tak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah seorang eksekutif romantis yang kental dengan nilai seni yang tak pernah ditinggalkan. Begitulah kesan yang ditangkap *Balairung* saat melihat kumpulan karya manisnya.

Dalam situasi seperti ini kita haruslah tabah, dan tidak cepat putus asa dan hidup haruslah tetap bersemangat," demikian sarannya di akhir perbincangan.❒

Koen Anggoro

Bambang T. Cahyono dan Komitmen Pada Kerakyatan



Langkah-langkahnya di bidang pendidikan kerapkali dijegal pemerintah. Namun hingga kini ia masih *survive*. Adalah Bambang Tri Cahyono pemilik sekolah Pasca Sarjana termurah di Indonesia. Di saat sekolah-sekolah serupa terancam bangkrut, ia justru bisa mengepakkan sayapnya. Bahkan ia bisa menarik lebih dari 7000 siswa. "Itu karena dukungan dari kalangan bawah", begitu katanya ketika ditanya tentang kesuksesannya.

Doktor lulusan Amerika ini memang dikenal kreatif. Selalu menciptakan terobosan-terobosan baru di bidang pendidikan. Menurutnya pendidikan di Indonesia sangat mahal. Oleh karena itu ia ingin membuat biaya semurah mungkin agar pendidikan kita dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hingga kini komitmennya pada kerakyatan memang masih tinggi. Sebab ia memang benar-benar bergelut dari bawah. Dulu Ia diterima di UGM di 2 jurusan sekaligus, yaitu teknologi pertanian dan ekonomi pertanian. Menurutnya pertanian identik dengan kerakyatan. Semasa mahasiswa ia juga aktif di berbagai kegiatan seperti HMI, persma dan pers umum. Sehingga tidak mengherankan kalau pak Bambang yang berprinsip banyak memberi banyak menerima ini hinggga kini masih memihak kalangan bawah.❒

F. Ika Yuniarti, Yuki Susanti

Anekdot edisi Soeharto KO

Lengser Keprabon

Sebelum dipaksa turun, seorang putri presiden berkata pada ayahnya, "Bapak 'khan sudah 30 tahun berkuasa dan barusan ibu meninggal, apa sebaiknya tidak lengser keprabon saja.?

"Kamu ini gimana, saya khan baru dua tahun berkuasa."

"Lho, kok bisa," celetuk putrinya agak kaget.

Eyang presiden pun menjawab dengan santai, "Selama 28 tahun itu yang berkuasa ibumu."❐

Asep Mulyana

Sukar Mengatakan

Seorang anak kecil bertanya pada neneknya,"Orang seperti apakah Sukarno itu".

"Sukarno adalah seorang orator ulung dan pecandu wanita." Jawab neneknya.

"Dan orang macam apakah Suharto itu?"

"Selain koruptor, kadang ia amat jahat," jawab si wanita tua.

"Nenek, Orang macam apakah Habibie?"

"Sukar mengatakannya nak," jawab sang nenek. "Bila sudah tak berkuasa kita akan tahu".❐

Hery

Bicara Politik

Pada waktu Suharto masih berkuasa, lima orang duduk termenung mengelilingi meja sebuah kedai kopi. Salah seorang dari mereka menghela nafas panjang, seorang lagi tercenung. Orang ketiga menggelengkan kepala putus asa, dan orang keempat menangis.

Orang kelima berbisik dengan ketakutan. "Hati-hati kawan! Kalian semua tahu bahwa tidak aman membicarakan politik di depan umum."❐

Hery

Biar Ken-tut

Sebagai putra pertama presiden mbak Tutut rajin melakukan kunjungan ke daerah. Ketika berkunjung ke Aceh dalam upacara penyambutan Mbak Tutut dianugerahi gelar kebangsawanan oleh pemuka masyarakat Aceh dengan nama *Cut Nyak Tut.*

Mbak tutut marah. Ia merasa nggak sreg dengan nama itu, lalu ia protes pada gubernur,

"Lha gimana lagi lho *Bu-Tut,*" Jawab Gubernur tak berdaya.

Tutut tambah marah ia makin merasa terhina oleh gubernur yang menyebutnya *Bu Tut.* Mengadulah pada bapaknya, Suharto. Tapi apa lacur Suharto kayaknya tak begitu peduli dengan persolan putri sulungnya dan menjawab,

"Mbok biar*ken-Tut"*

Tututpun terdiam.❐

Hery, *dari Deni*

Di Bawah Kaki Suharto

Di neraka, berkumpulah mantan pejabat Indonesia yang saat berkuasa giat berkorupsi dan menindas rakyat. Mereka direndam pada air yang mendidih. Tubuh mereka tenggelam sesuai tingkat dosa mereka.

Harmoko tenggelam sebatas leher. IB Sujana sebatas perut. Tutut bahkan tenggelam habis. Tapi disitu terlihat Suharto hanya tenggelam sebatas mata kaki.

Proteslah Harmoko melihat hal itu.

"Tuhan bukanlah dulu bapak presiden yang mnyebabkan kami melakukan korupsi dan penindasan.

Dengan tenang Tuhan menjawab,

"Harmoko, tak tahukah engkau dibawah kaki Suharto itu ada Hartono."❐

Hery

Seminar Pasca Krisis

Beberapa tahun ke depan, dunia seminar Indonesia bakal marak lagi. Beberapa tema-tema mengenai pembangunan ekonomi mulai dikembangkan.

Beberapa judul yang bertempelan di spanduk-spanduk dijalan cukup mengundang perhatian. "Memanipulasi Kesejahteraan Buruh, Manajemen Keuangan Persaudaraan, Nepotisme ? Mengapa Tidak, Membangun Manajemen Perusahaan dengan Kekuatan Senjata." Demikian beberapa judul yang terlihat.

Pembicara yang paling laris, siapa lagi kalau bukan Suharto dan keluarga.❐

Dodo



FIFI.JR





Bebaskan Tumbuh

Kasih sayang kepada anak
semestinya tidak diartikan dengan memanjakan secara berlebihan
Dan mencetaknya sebagai bayang-bayang diri kita.
Tidak pula dengan menyumbat kebebasan kreatifnya
dengan alasan kodrat diri sebagai lelaki dan perempuan.
Jika itu yang terjadi
saat itulah kita sedang memenjarakannya
dari ribuan kemungkinan dan pilihan.
Tugas kita, hanyalah menciptakan jalan lapang
bagi hari depannya.






Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan atas kerjasama
Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak dan **Majalah BALAIRUNG - UGM**

Bebaskan Tumbuh

Membangun Bangsa Cerdas dengan BALAIRUNG

TERIMA KASIH KEPADA ANDA YANG TELAH MENJADI PELANGGAN ABADI:

1. TONSAH MINANDA, S.H.	DUMAI
2. PROF. DR. HJ. SOETINAH SOEWONDO	UJUNG PANDANG
3. A. BUDI PURNOMO, MA	YOGYAKARTA
4. HARI SANDJOJO, SE	JAKARTA
5. A. TONY PRASETYANTONO, M.Sc	YOGYAKARTA
6. MARZUKI USMAN, SE	JAKARTA
7. Ir. TEBYAN A'MAARI	YOGYAKARTA
8. KHOIRUL ROSYADI, SS	GRESIK
9. Ir. ABDUL HAMID DIPOPRAMONO	JAKARTA
10. MUSTAJAB, SE	YOGYAKARTA
11. AMONG KURNIA EBO	LAMONGAN
12. SOEWARDJONO	YOGYAKARTA
13. ARIEF OETOJO	SURAKARTA
14. Drs. DJAHRI ARSYAD	JAKARTA
15. MOE'ALI	BLITAR
16. DIDIK SUPRYANTO, SP	JAKARTA
17. Ir. AGUNG SUPRIHANTO	JAKARTA
18. YUDI HERMAWAN	JAKARTA
19. AHMAD RAPANIE	PALEMBANG
20. AGUS AMAN SANTOSO	SULSEL
21. Drs. BERTHO DARMO P.A.	JAKARTA
22. Ir. ATANG JAUHARI	KUPANG
23. WAHYUDI MARHAEN	JAKARTA
24.Drs. IMADUDDIN	SURABAYA
25. Drs. WIDODO SUNARYO, MBA	JAKARTA

Anda ilmuwan, eksekutif, ataupun intelektual muda?
Ingin menjadi pelanggan abadi Balairung?
Kirimkan minimal Rp 100.000,00 ke bagian sirkulasi.
"Setiap edisi terbaru akan kami kirimkan ke alamat Anda"

FORMULIR PELANGGAN ABADI

Dengan ini saya:

Nama :

....

Alamat :

....

Bersedia menjadi pelanggan abadi **Majalah *Balairung* UGM**. Untuk itu saya memberikan dana berlangganan sebesar **Rp.**____________

(...)

melalui via wesel / transfer Tabanas Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta, No. Rek. 029-33-08-3367-4 (atas nama Sholihah,)atau via wesel ke alamat: Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281, telp. (0274) 901703, Fax. (0274) 566171.

Tanggal...................................

Pelanggan Abadi

....

What's BALAIRUNG

?

Campus papers still thrive, but they tend to be tame organs for university public relations rather than an expression of student discontent. Some campus publications have adapted by claiming the political middle ground, displaying commercial nous and journalistic sophistication in both content and lay-out. Gadjah Mada University's **BALAIRUNG**, for example, produced a special edition to celebrate its eight-year (windu) anniversary in 1994. The 128-page glossy magazine was slick and well-produced, marketed through major bookshop chains such as Gramedia, for Rp 3.000,00. It included a lengthy article about, and interview with, prominent leftist author Pramoedya Ananta Toer, seventeen researched essays by student leaders on their vision for Indonesia's future, together with a student analysis of the election of the university's new Rector. The magazine listed on its advisory board not only Amir Effendi Siregar, who in addition to lecturing in the university's highly-regarded journalism program is also a director of *Warta Ekonomi* economic weekly, but also *Kompas* chief Yakob Utama.

(**Hill, David.T.**,1995. *The Press in New Order Indonesia*, Uwap. University of Western Australia Press, Nedlands, Western Australia, pp.116-117)

"... Sebagai majalah mahasiswa BALAIRUNG sudah sangat memadai. Secara visual tampilannya sangat baik, sementara dari isinya ... tak bakal dijumpai pada pers umum."

Mochtar Lubis
Budayawan, Direktur Yayasan Obor Indonesia